

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next

Edisi 67

Juli -September
2024



23 Tahun Kominfo:

Menghubungkan Negeri, Membangun Masa Depan

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Helmi Fajar Andrianto

Redaktur Pelaksana:
Verawati

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
Daoni Diani Hutabarat
Fahmie Trihatin J.
Annisaa Bonita P.

Reporter:
Adhi Sakti
Adelia Nabiiila Safira
Agung Windhi Prasetya
Ahmad Irso Kubangun
Desideramus Bitan
Meita Pusparini
Yusuf

Fotografer:
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma
Paulinus Hardi Subianto
Anhar Rizki Affandi

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi & Distribusi:
Sofia Wahdiati
Ardhia Mafaza

Keputusan Kepala Biro Humas
Nomor 30 Tahun 2024

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat



**Bagi sivitas yang ingin
menyumbangkan tulisannya
dapat mengirimkan ke email :**
majalahkominfonext@kominfo.go.id

 **0811-563-344**

Yuk, isi survei untuk Majalah
KominfoNext lebih baik lagi



<https://s.id/SurveiKominfoNext>

HUT Ke-23 Kominfo: Semangat Kolaborasi Wujudkan Transformasi Digital Indonesia



Rhina Anita

Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next

Mengawali suasana penuh sukacita, kami sampaikan salam hangat dan jumpa kembali dengan para pembaca Majalah Kominfo Next. Pada edisi ke-67, kami hadirkan beragam informasi yang sangat spesial karena bertepatan dengan perayaan HUT Ke-23 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dua puluh tiga tahun perjalanan Kementerian Kominfo adalah cerminan dedikasi dan komitmen serta semangat kolaborasi untuk memajukan sektor komunikasi dan informatika di Indonesia.

Dari berbagai inisiatif dan program yang telah diluncurkan, kita semua telah menyaksikan perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses dan menggunakan teknologi informasi. Inilah momentum untuk menyambut transformasi digital nasional.

Dalam edisi kali ini, kami mengajak pembaca sekalian untuk menyelami, merefleksi, dan mendalami tentang pencapaian yang telah diraih selama 23 tahun ini. Melalui berbagai naskah artikel, Anda akan menemukan kisah sukses, tantangan yang telah diatasi, dan rencana-rencana inovatif untuk masa depan.

Majalah Kominfo Next juga akan menampilkan wawancara eksklusif dengan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria yang turut mendukung kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika selama lebih dari satu tahun terakhir dalam periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin.

Sebagai bagian dari perayaan HUT ke-23, kami juga dengan bangga mempersembahkan rangkaian kegiatan Kominfo Karnaval yang telah diadakan bersamaan dengan momentum perayaan HUT Ke-79 Republik Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan perayaan HUT ke-23 ini, serta kepada Anda, para pembaca setia Majalah Kominfo Next.

Semoga edisi ini dapat memberikan inspirasi dan wawasan yang berharga bagi kita semua. Mari kita rayakan pencapaian ini dengan penuh kebanggaan dan semangat untuk terus berinovasi demi masa depan yang lebih baik.

Selamat HUT Ke-23 Kementerian Kominfo!

Selamat membaca!

Daftar Isi

3 Surat dari MMB9

6 Kabar Istana

10 Rak Buku

12 Kominfopedia

14 Teknologi & Gadget

20 Liputan Utama

52 Tokoh

56 Liputan Khusus

80 Photo Story

84 Liputan Khusus

92 Kominfo Daerah

98 Kata Sivitas

102 Kominfo Karnaval

108 Opini

114 Ngopi Bareng Kominfo

120 Portal Kominfo

136 Publikasi Standar Pelayanan

138 Lintas Kominfo

Selamat Bertugas Angga Raka Prabowo

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia





Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangannya usai memimpin Upacara Penurunan Bendera Sang Saka Merah Putih pada Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara.

Presiden Jokowi Bersyukur Rangkaian Upacara HUT Ke-79 RI di **IKN Berjalan Lancar dan Khidmat**

Suasana di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, pada Sabtu pagi, 17 Agustus 2024, dipenuhi semangat dan kebanggaan. Ribuan warga

dari berbagai penjurо Nusantara berkumpul untuk menyaksikan momen bersejarah: Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi yang pertama kali digelar di ibu kota baru.

Di antara mereka, ada kisah-kisah yang mencerminkan kebanggaan, rasa syukur, dan harapan yang besar bagi masa depan Indonesia. Salah satunya Edi Sopyan, seorang warga suku Dayak Benuaq asal Kalimantan Timur, yang tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya.

"Bangga, sangat bangga, karena ini memang momen pertama dan kita masyarakat biasa diundang ke sini," ujarnya.

Tidak hanya merasa bangga diundang, Edi juga beruntung mendapat sepeda dari Presiden Jokowi. Ia beruntung karena menggunakan pakaian adat yang memadukan elemen dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, yang dinilai mencerminkan semangat kebinekaan yang menjadi ciri khas Indonesia.

"Kami berharap IKN terus berlanjut sehingga ini berdampak khususnya masyarakat di Kalimantan," tuturnya, menyuarakan harapan bagi masa depan Ibu Kota Nusantara.

Senada, Eka, seorang warga Balikpapan, mengatakan bahwa menghadiri upacara di Ibu Kota Nusantara merupakan pengalaman yang penuh dengan keharuan. Sebagai warga Balikpapan, kota yang menjadi penyangga IKN, Eka mengungkapkan kekagumannya terhadap kemajuan pesat pembangunan ibu kota baru ini.

"Dari yang awal saya datang ke IKN cuma hutan-hutan, jalanannya belum sebgus ini, dan ternyata progres dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun sudah jadi semegah ini, luar biasa sekali," ucapnya penuh takjub.

Eka juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan berharap presiden terpilih, Prabowo Subianto, bersama Wapres terpilih Gibran Rakabuming, dapat melanjutkan pembangunan IKN. "Semoga IKN tetap terus berlangsung, berkembang lebih maju, jadi ikon Indonesia yang bebas polusi dan lebih baik lagi," harapnya.

Sementara itu, sekelompok anak muda dari Sulawesi, Tutut, Retno, dan Hajra, juga tidak ketinggalan berbagi cerita. Mereka merasa bangga dapat menjadi bagian dalam upacara perdana di Ibu Kota Nusantara.

"Berkesan banget karena ini merupakan upacara pertama kalinya selain di Ibu Kota Jakarta, dan ini merupakan ibu kota baru dan pertama kali dirayakan 17 Agustus di sini," kata Hajra dan teman-temannya dengan antusias.

Mereka bertiga juga sepakat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah sesuatu yang luar biasa. Menurutnya, IKN sangat maju dan upaya pelestarian lingkungannya masih tetap terjaga di tengah pembangunan masif.

"Konsepnya sendiri merupakan kota hijau di mana bisa dilihat sekitar wilayah IKN ini masih banyak pohon-pohon yang masih asli, yang benar-benar asli dari hutan itu sendiri," ucap Retno.

Kami berharap IKN terus berlanjut sehingga ini berdampak khususnya masyarakat di Kalimantan.

Presiden Joko Widodo menyatakan rasa syukurnya atas kelancaran pelaksanaan rangkaian Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Dalam keterangannya usai memimpin Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Negara IKN, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa semua rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar dan khidmat.

"Alhamdulillah dimulai dari tadi malam renungan suci, kemudian tadi pagi, siang, dan penurunan bendera sore hari ini, semuanya berjalan dengan lancar, semuanya berjalan dengan baik," kata Presiden Jokowi.

"Cuaca juga sangat mendukung. Pas kita istirahat hujan sehingga suasana sejuk, suasana tidak panas, suasana upacara menjadi sangat khidmat," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan ucapan selamat HUT Kemerdekaan RI kepada seluruh rakyat Indonesia. "Pada kesempatan yang baik ini, sekali lagi saya mengucapkan, dirgahayu, hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79 untuk seluruh rakyat sebangsa dan setanah air," ucapnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai ketidakhadiran mantan presiden dalam upacara kali ini, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa para mantan presiden memiliki agenda penting di tempat lain.

"Ya, karena beliau-beliau juga ada kegiatan yang sangat penting di tempat yang berbeda. Saya kira kita harus menghargai karena beliau-beliau juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan di Jakarta, di Pacitan, saya kira merayakan di manapun sama," jelas Presiden.

Ketika ditanya apakah upacara tahun depan akan kembali diadakan di IKN, Presiden Jokowi menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden terpilih. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang turut hadir di kesempatan tersebut memberikan sinyal bahwa upacara akan kembali digelar di IKN tahun depan.

"Insyaallah akan di sini lagi," ucap Prabowo.

**Alhamdulillah
dimulai dari
tadi malam
renungan suci,
kemudian tadi
pagi, siang,
dan penurunan
bendera sore hari
ini, semuanya
berjalan dengan
lancar, semuanya
berjalan
dengan baik..**

Terkait dengan pertanyaan mengenai lokasi upacara yang dilakukan di dua tempat, yakni Jakarta dan Nusantara, Presiden Jokowi menyatakan bahwa hal tersebut akan diputuskan kemudian, tetapi menekankan bahwa upacara inti akan tetap dilakukan di IKN. "Ya kita lihat nanti. Tapi intinya upacara di sini," ujarnya.

Sementara itu, berkaitan dengan pembangunan Indonesia ke depan, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi pendorong pemerataan pembangunan yang indonesiasentris.

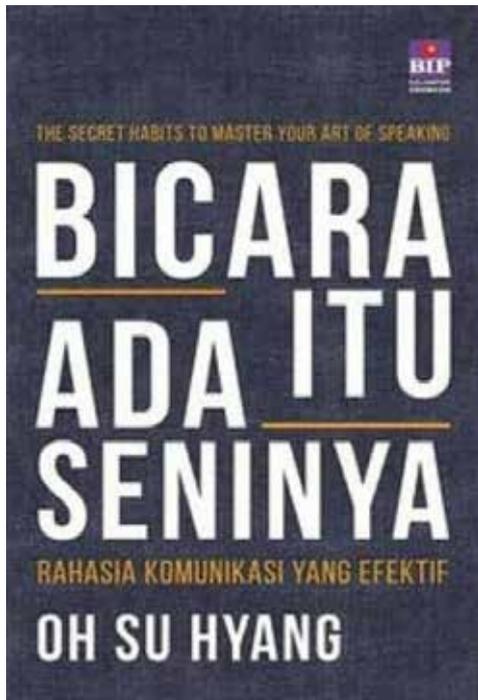
"Ya, ini negara besar, Indonesia ini negara besar. Perlu pemerataan di semua wilayah, timur, tengah, barat, semuanya harus mendapatkan kue yang sama, sehingga 10 tahun lalu saya menyampaikan bukan jawasentris, tapi indonesiasentris. Tidak dari pusat, tetapi membangun dari pinggiran, membangun dari desa, membangun dari wilayah terluar," jelasnya.



<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-jokowi-bersyukur-rangkaian-upacara-hut-ke-79-ri-di-ikn-berjalan-lancar-dan-khidmat/>



Presiden Joko Widodo kembali bertindak sebagai inspektur upacara pada Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih yang digelar di halaman Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN), pada Sabtu sore, 17 Agustus 2024. Foto: BPMI Setpres/Vico



Bicara Itu ada Seninya: Rahasia Komunikasi yang Efektif

Penulis : Oh Su Hyang

Penerbit : Bhuana Ilmu Populer

Ketika komunikasi menjadi hal yang penting untuk bersaing, pakar komunikasi Oh Su Hyang mengeluarkan buku yang sangat berarti. Selain berisi tentang pengalaman peningkatan diri, buku ini juga memuat berbagai konten mengenai teknik komunikasi, persuasi, dan negosiasi. Lalu bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan napas? Tidak! Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara memiliki kemampuan menghidupkan suasana dan kekuatan kalimatnya yang terus terang. Anda harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri Anda kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan menjadi lebih maju daripada yang

lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, Anda harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Jika Anda membacanya dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya.

Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo (*offline*) dan di E-Perpus/Ruang Buku Kominfo (*online*).

Gadis Minimarket

Penulis: Sayaka Murata

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Novel ini menceritakan tentang Keiko, seorang perempuan yang bekerja sebagai pegawai di minimarket. Keiko digambarkan sebagai seseorang yang pekerja keras. Hal ini disinyalir sebagai sebuah sindiran terhadap stereotip Workaholic di Jepang. Hidup Keiko hanya berputar di sekitar pekerjaannya saja. Ia terus-menerus memikirkannya, bahkan ketika dia tidak bekerja di sana. Segala sesuatu yang lain di hidupnya tidak ada artinya. Ia pun pada akhirnya berubah menjadi layaknya minimarket itu sendiri, ia hidup untuk melayani orang lain, melakukan apa yang orang lain inginkan. Namun demikian, Keiko memiliki pandangannya sendiri tentang apa yang membuatnya bahagia. Meskipun pandangannya ini tidak cocok dengan kebanyakan orang, tetapi dia dapat menemukannya dan dapat hidup karenanya. Kisah Keiko mengajarkan bahwa seseorang dapat menjalani kehidupan yang memuaskan tanpa mengikuti standar kebahagiaan orang lain.

Buku ini tersedia di Perpustakaan Kementerian Kominfo (*offline*) dan di E-Perpus/Ruang Buku Kominfo (*online*).



Kiat Komunikasi Antar Pribadi Dalam Zaman Now

Penulis : Dr. Agung Gunawan, TH.M

Penerbit : MNC Publishing

Setiap pribadi memiliki keinginan untuk dapat melakukan komunikasi dengan orang lain dengan baik dan benar. Kemampuan untuk dapat memiliki komunikasi antar pribadi yang baik perlu dipelajari, dilatih dan dipraktikkan secara konsisten. Memiliki komunikasi antar pribadi yang sehat dan produktif tidak akan terjadi tanpa ada usaha keras. Untuk mencapainya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik antar pribadi tergantung dari pribadi-pribadi yang terlibat dalam komunikasi. Dibutuhkan banyak kesabaran, ketekunan dan tidak cepat putus asa dari pribadi-pribadi yang merindukan terciptanya komunikasi antar pribadi yang kondusif dan produktif.

Buku ini tersedia di E-Perpus/Ruang Buku Kominfo (*online*).

12 FEB

KominfoPedia

30°

0



Spectrum Analyzer

Halo SobatKom!

Apa kabar? Masih ingat dengan tulisan yang berjudul "Taktik Frekuensi dalam Perang Elektronik"? Kali ini, kita akan membahas sesuatu yang masih berkaitan dengan topik tersebut, yaitu *spectrum analyzer*.

Di era digital saat ini, dengan semakin banyaknya penggunaan telekomunikasi nirkabel, *spectrum analyzer* menjadi salah satu alat yang sangat penting. Alat ini digunakan untuk mengukur dan menganalisis sinyal elektromagnetik, baik dalam pengembangan dan pemeliharaan perangkat elektronik, maupun dalam bidang militer, terutama dalam perang elektronik seperti yang kita bahas sebelumnya.

Fungsi Spectrum Analyzer

Spectrum analyzer adalah alat yang digunakan untuk menganalisis spektrum frekuensi radio di suatu lokasi tertentu. Setidaknya, *spectrum analyzer* memiliki beberapa fungsi berikut, SobatKom:

- 1. Observasi Pita/Kanal Frekuensi Radio:** Perangkat *spectrum analyzer* ini setidaknya dapat mendeteksi apakah sebuah kanal frekuensi tertentu sedang digunakan atau tidak.
- 2. Pengukuran Parameter Teknis:** *Spectrum analyzer* digunakan untuk mengukur parameter teknis seperti frekuensi pusat (*center frequency*), *bandwidth*, level sinyal, dan *noise floor*.
- 3. Deteksi Sumber dan Arah Sinyal:** Beberapa *spectrum analyzer* dilengkapi dengan fitur *direction finding* untuk mendeteksi sumber dan arah pancaran frekuensi. Fitur ini sangat penting dalam penanganan gangguan frekuensi radio.



Pusing dengan istilah-istilah teknis di atas? Tenang Sobatkom, kamu tidak sendiri. Yuk, kita bahas satu per satu istilah teknis terkait *spectrum analyzer*. Yang pertama *center frequency*, yaitu frekuensi tengah dari rentang frekuensi yang sedang dianalisis atau diproses oleh *spectrum analyzer*. Ini merupakan titik acuan dimana pengukuran dan analisis sinyal akan difokuskan. Misalnya, jika menganalisis frekuensi antara 900 MHz dan 1.100 MHz, maka *center frequency*-nya adalah 1.000 MHz

Istilah berikutnya yaitu *bandwidth*. *Bandwidth* adalah rentang frekuensi yang digunakan oleh suatu sinyal atau sistem komunikasi yang menentukan seberapa banyak data dapat ditransmisikan. *Bandwidth* yang lebih besar memungkinkan transmisi data lebih cepat dan efisien, serta membantu mencegah interferensi antar sinyal.

Kalau level sinyal adalah ukuran kekuatan atau amplitudo suatu sinyal, biasanya dinyatakan dalam satuan dBm (decibel milliwatt) atau volt. Level sinyal menunjukkan seberapa kuat sinyal tersebut saat diterima atau dipancarkan. Level sinyal ini penting sebagai indikator untuk memastikan kualitas dan keandalan transmisi dalam sistem komunikasi.

Berikutnya yaitu *noise floor*, yang merupakan istilah untuk menggambarkan tingkat minimum gangguan atau “kebisingan” yang ada di suatu sistem atau lingkungan, diukur dalam satuan dBm. *Noise floor* menetapkan batas terendah dimana sinyal dapat dideteksi, sehingga sinyal di bawah *noise floor* akan sulit atau tidak mungkin terdeteksi secara jelas.

Mirip dengan perangkat perang elektronik, *spectrum analyzer* digunakan oleh militer untuk menganalisis frekuensi yang digunakan oleh musuh. Tujuannya adalah untuk membutakan musuh, menyadap, atau bahkan mengganggu telekomunikasi musuh, sehingga mempersulit koordinasi di medan perang.

Sementara itu, *spectrum analyzer* yang digunakan oleh Kementerian Kominfo berfungsi untuk memastikan bahwa setiap frekuensi di wilayah Indonesia digunakan sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan. Frekuensi yang tepat guna akan menciptakan telekomunikasi yang lancar dan menegaskan kedaulatan frekuensi.

Hasil Survei

Kepuasan Masyarakat

Layanan Informasi Publik
PPID Kementerian Kominfo

Selengkapnya:



<https://s.id/SKMPPID2023?s=qr>

Teknologi Asistif untuk Atlet Penyandang Disabilitas di Paralimpiade

Di tahun 2024, dunia olahraga diramaikan dengan gelaran Olimpiade yang disusul dengan penyelenggaraan Paralimpiade di Paris, Prancis. Ajang kompetisi olahraga internasional ini mempertandingkan berbagai cabang olahraga yang diikuti oleh para atlet dari seluruh dunia. Khusus untuk Paralimpiade, atlet yang bertanding adalah para atlet penyandang disabilitas.

Sebagian besar cabang olahraga yang dipertandingkan di Paralimpiade sama dengan di olimpiade, namun beberapa peraturan permainan

dimodifikasi agar para atlet penyandang disabilitas tetap dapat bertanding dengan keterbatasan yang mereka miliki.

Salah satu bentuk modifikasi aturan tersebut adalah diperbolehkannya para atlet menggunakan berbagai alat bantu yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan mereka saat bertanding. Berbagai alat bantu ini memanfaatkan teknologi asistif yang berperan penting bagi atlet penyandang disabilitas untuk berkompetisi di Paralimpiade.

01

Kaki Prostetik

Atlet cabang olahraga para atletik yang memiliki keterbatasan fungsi kaki akan menggunakan alat bantu kaki prostetik. Kaki prostetik ini biasanya digunakan untuk cabang olahraga yang membutuhkan pergerakan kaki untuk berlari dan melompat. Prostetik ini dirancang untuk meniru fungsi kaki alami dengan menyimpan dan melepaskan energi setiap langkah, memungkinkan atlet berlari dengan efisien.



02

Kursi Roda

Selain kaki prostetik, kursi roda juga merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pergerakan atlet penyandang disabilitas. Kursi roda digunakan dalam cabang olahraga seperti balap kursi roda. Kursi roda yang digunakan adalah kursi roda balap yang sangat aerodinamis, ringan, dan dapat disesuaikan. Kursi ini dirancang untuk memaksimalkan kecepatan, stabilitas, dan kontrol. Selain itu terdapat juga kursi roda khusus yang digunakan untuk cabang olahraga yang membutuhkan manuver cepat seperti para basket dan para tenis.



03

Sepeda Asistif

Cabang balap sepeda dalam Paralimpiade memiliki perbedaan dengan balap sepeda pada umumnya. Salah satunya adalah penggunaan sepeda khusus yang digerakkan dengan tangan, bukan dengan kaki seperti sepeda biasa. Sepeda yang disebut *handbike* ini digunakan oleh atlet dengan disabilitas kaki. Sepeda ini digerakkan oleh tangan dan dirancang untuk kecepatan dan kontrol baik di jalan maupun trek khusus sepeda. Ada juga sepeda tandem yang digunakan oleh atlet dengan gangguan penglihatan. Atlet ini menggunakan sepeda tandem dengan bantuan atlet lain dengan penglihatan normal yang duduk di kursi depan dan bertindak sebagai pilot.



04

Teknologi untuk Gangguan Penglihatan

Di Paralimpiade, atlet dengan gangguan penglihatan dapat mengikuti perlombaan di cabang olahraga para renang dengan berbagai alat bantu yang disiapkan untuk memastikan mereka tetap berenang di jalur yang seharusnya. Salah satunya adalah penggunaan tali lintasan sebagai pemandu mereka dalam berenang lurus di lintasan. Tim yang mendampingi atlet juga memiliki alat sederhana berbentuk galah yang diujungnya terpasang bantalan yang digunakan untuk mengetuk kepala atlet sebagai sinyal mereka sudah sampai ke ujung lintasan.



05

Peralatan Adaptif Lain

Masih banyak alat bantu lain yang digunakan untuk membantu atlet penyandang disabilitas bertanding. Berbagai alat ini digunakan spesifik untuk cabang olahraga tertentu. Contohnya cabang olahraga para panahan menggunakan berbagai alat canggih untuk membantu menarik busur dan membidik target secara akurat bagi atlet dengan keterbatasan fungsi lengan dan penglihatan. Ada juga cabang olahraga boccia misalnya yang menggunakan ramp dan pointer khusus bagi atlet yang memiliki gangguan anggota dan batang tubuh yang signifikan.

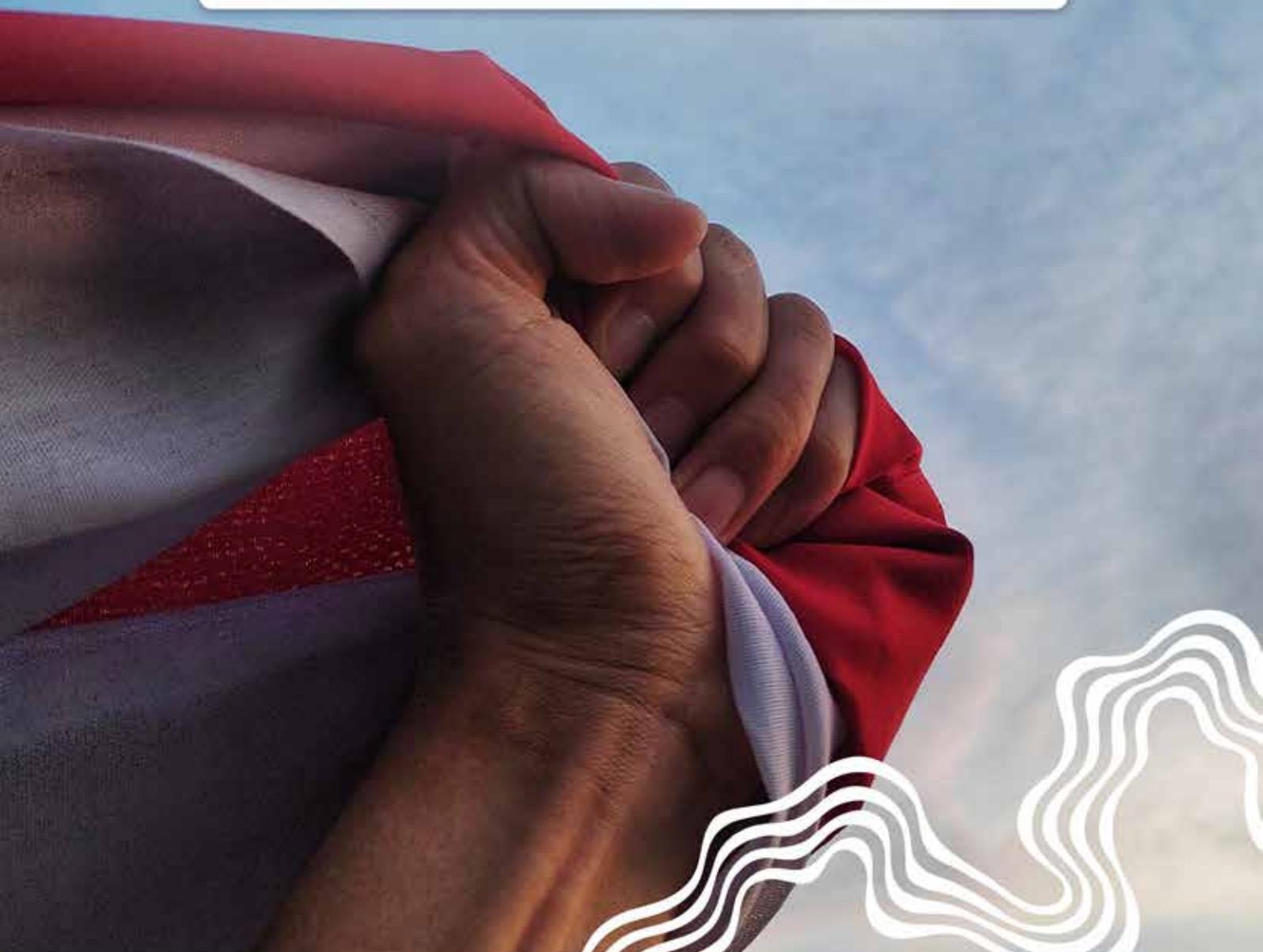


Teknologi asistif ini tidak hanya membantu menyetarakan kompetisi, tetapi juga memungkinkan atlet untuk mendorong batas kemampuan mereka dan mencapai performa luar biasa di Paralimpiade.

Dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, atlet penyandang disabilitas kini memiliki aksesibilitas yang semakin baik dan mampu berkompetisi di berbagai cabang olahraga Paralimpiade.

DIRGAHAYU KE-79 REPUBLIK INDONESIA

Nusantara Baru Indonesia Maju



KoMinFo 2024 KARNAVAL

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali menggelar Kominfo Karnaval 2024 dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia dan HUT ke-23 Kementerian Kominfo. Acara tahunan ini tidak hanya menjadi ajang rekreasi bagi seluruh sivitas Kominfo, tetapi juga sarat dengan pesan moral yang relevan dengan tantangan zaman.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam sambutannya pada acara *Kick Off* Kominfo Karnaval 2024, menekankan pentingnya memerangi perjudian *online*. "Kita harus ingat bahwa kemerdekaan kita adalah hasil perjuangan yang berat. Jangan sampai kita mengkhianati perjuangan para pahlawan dengan terlibat dalam aktivitas yang merusak seperti judi *online*," tegas Menteri Budi Arie.

Kekhawatiran Menteri Budi Arie ini bukan tanpa alasan. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat sejumlah pegawai Kominfo yang terlibat dalam aktivitas perjudian *online*. "Ini adalah masalah serius yang harus kita atasi bersama," ujarnya.

Selain isu perjudian *online*, Menteri Budi Arie juga mengingatkan pentingnya peran Kominfo dalam mendorong transformasi digital Indonesia. "Kominfo memiliki tanggung jawab besar dalam membangun Indonesia yang maju dan berdaya saing di era digital. Kita harus terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegasnya.





Semarak Lomba dan Solidaritas

Kominfo Karnaval 2024 dimeriahkan dengan berbagai lomba tradisional seperti balap karung, estafet sarung, dan tarik tambang. Namun, yang menjadi daya tarik tersendiri tahun ini adalah lomba masak estafet yang menguji kerjasama tim dan kreativitas peserta.

Seluruh sivitas Kominfo, mulai dari pejabat tinggi hingga staf pelaksana, turut berpartisipasi dalam acara ini. Mereka terbagi dalam sepuluh kontingen yang mewakili masing-masing unit kerja di lingkungan Kominfo.

Kominfo Karnaval 2024 bukan sekadar perayaan semata, tetapi juga menjadi momentum bagi

seluruh sivitas Kominfo untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab mereka dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Pesan moral yang disampaikan oleh Menteri Budi Arie, yakni pentingnya memerangi perjudian online dan mendorong transformasi digital, menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa.

Kegiatan *Kick Off* Kominfo Karnaval yang dilaksanakan di lapangan Anantakupa, Kementerian Kominfo ini juga dihadiri ratusan sivitas Kominfo yang terbagi dalam sepuluh kontingen seperti Setjen, Kuasi, SDPPI, PPI, Aptika, IKP, BPSDM, Itjen, BAKTI dan Tenaga Pendukung Perkantoran/SOC untuk mengikuti segenap perlombaan khas 17-an.

Berikut Rekap Pemenang Lomba Khas 17-an dalam Kominfo Karnaval 2024:

Lomba Balap Kelereng



Lomba Balap Karung Putra



Lomba Balap Karung Putri



Lomba Ambil Koin di Buah



Lomba Estafet Sarung**Lomba Estafet Masak****Lomba Tarik Tambang Putra****Lomba Tarik Tambang Putri****Lomba busana pahlawan**

Selanjutnya, Kominfo Karnaval 2024 memasuki masa perlombaan dalam rangka HUT ke-23 Kementerian Kominfo yang pada tahun ini menyajikan beberapa perlombaan baru seperti Mini Soccer sebagai pengganti kompetisi Futsal, Kominfo RUN sebagai pengganti Virtual Run and Bike, Senam SKJ sebagai pengganti Senam KORPRI, serta tambahan kompetisi seperti Konten Medsos Tematik dan Cerdas Cermat "Si Paling Kominfo".

Kominfo Karnaval 2024 juga menghadirkan kegiatan eksibisi Bola Voli dan Bola Basket sebagai penanda kompetisi menuju acara puncak HUT ke-23 Kementerian Kominfo dimulai. Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni dan segenap pejabat eselon II dan sivitas Kominfo yang mengikut eksibisi Bola Voli dan Bola Basket.

Berikut ini adalah rekap pemenang Kompetisi Kominfo Karnaval 2024:

Kominfo Run Putra



Muhammad Yunizar

APTIKA



Husni Abubakar Silim

PPI



Fadli Zaini

PPI

Kominfo Run Putri



Ranap Dewi Natalia sirait

SDPPI (Balmon Pekanbaru)



Naomi Agustina

IKP



Sulastri Sitohang

PPI

Badminton Ganda Putra



Muh. Quraishihab Harianto & Mochammad Darajat Setiawan

Ditjen SDPPI



Gilang Kusuma & Angga

Ditjen APTIKA



Widhy Baskoro & Purno Adhi Nugroho

Ditjen SDPPI

Badminton Ganda Putri



Zahidah Bara R & Dwinta Rahmayani

Ditjen SDPPI



Sherliana Jasriani & Nur Azizah Fara Salsabilah

ITJEN



Mutia Feryani & Emilia Christiana Ishak

Ditjen PPI

Badminton Ganda Campuran



Kurniaty Ibrahim & Adi Ismono

Ditjen SDPPI



Febryana Pintakasari & Timbul Suyata Hermanto

Ditjen SDPPI



Ninik Wahyuni & Aditiya Purnomo

ITJEN

Voli Putra

Ditjen SDPPI



SOC



Ditjen PPI

Voli Putri

Ditjen SDPPI



SOC



Ditjen PPI

Basket Putra 5X5

APTIKA



Ditjen SDPPI



BPSDM

Basket Putri 3X3

SETJEN



ITJEN



Ditjen SDPPI

Mini Soccer

Ditjen SDPPI



SETJEN



KUASI

Tenis Meja Ganda Putra

-  **Kevin & Ardha**
BAKTI
-  **Irfan & Sadewa**
Ditjen SDPPI
-  **Pluto & Toding**
Ditjen PPI

Tenis Meja Ganda Putri

-  **Gading & Fadhilah Mathar**
BAKTI
-  **Ainun & Dian**
Ditjen PPI
-  **Sudi & Melly**
SETJEN

Tenis Meja Ganda Campuran

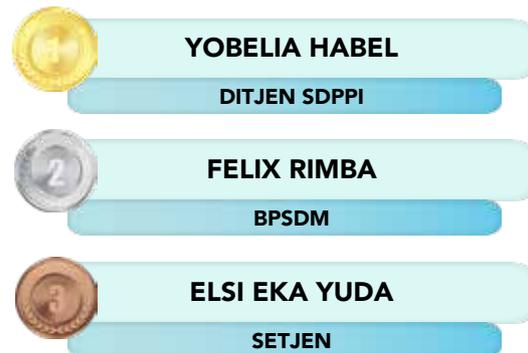
-  **Kevin & Gading**
BAKTI
-  **Ardha & Fadhilah Mathar**
BAKTI
-  **Pluto & Ainun**
Ditjen PPI

Catur

-  **Agus Joko Sudiarto**
Ditjen PPI
-  **Sunnas Ginanjar**
Ditjen APTIKA
-  **Jauman Gultom**
BPSDM

e-Sport Mobile Legends

-  **DJPPI Team**
Ditjen PPI
-  **Dark System**
Ditjen APTIKA
-  **Super PI**
Ditjen APTIKA

Senam SKJ**MC****Vocal Group****Konten Medsos Tematik**

Cerdas Cermat buat kamu yang paling Kominfo









23 Tahun Kominfo Berkiprah, Kawal Transformasi Digital Nasional

September setiap tahunnya adalah bulan bersejarah bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nomenklatur lembaga pemerintah ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak 23 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September 2001.

”

Dari nama Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika, organisasi ini terus berkiprah pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Selama 10 tahun terakhir di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah sukses meninggalkan jejak capaian pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informatika, melaksanakan fungsi Government Public Relations atau Humas Pemerintah, hingga menjadi institusi bergengsi yang menjaga ruang digital dan ekosistemnya di tengah gempuran Revolusi Industri 4.0 juga menyongsong era baru Digital Society 5.0. Kementerian inilah yang kemudian menjadi salah satu ujung tombak dalam mengakselerasi transformasi digital nasional melalui arahan dan kebijakan yang

disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Dalam kiprahnya mengawal transformasi digital, Kementerian Kominfo saat ini dipimpin Menteri Budi Arie Setiadi. Tidak hanya seorang menteri, sejarah baru lahir ketika untuk pertama kalinya kementerian ini memiliki dua wakil menteri sekaligus, yakni Wakil Menteri Kominfo (Wamenkominfo) Nezar Patria dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo.



Arahan Penting Menkominfo Budi Arie Setiadi

Mengingat pentingnya peran sentral mengawal transformasi digital, momentum perayaan 23 tahun usia Kementerian Kominfo juga mendorong kemajuan infrastruktur telekomunikasi, mengupayakan ruang digital dan arus informasi yang sehat dan bijaksana, serta memastikan pemanfaatan teknologi untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat.

Puncak perayaan HUT Ke-23 Tahun Kominfo jatuh pada hari Jumat, 20 September 2024. Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan berbagai capaian telah diraih dalam upaya akselerasi transformasi digital. "Saat ini pemerintah bersama seluruh ekosistem telah melakukan pembangunan BTS di wilayah blank spot terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Sebanyak 1.665 diantaranya merupakan BTS USO serta 5.168 titik lainnya merupakan BTS 4G. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan akses internet di 18.697 lokasi layanan publik.

Pembangunan infrastruktur digital tersebut menjadi modal awal mewujudkan pelayanan publik yang terus meningkat dan lebih berkualitas," tutur Menteri Budi Arie.

Bagaimana capaian Kementerian Kominfo dalam meningkatkan daya saing talenta digital Indonesia? Menurut Menteri Budi Arie, beberapa program pengembangan SDM digital justru telah mencapai hasil yang signifikan. "Program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) telah diikuti oleh 24,6 juta peserta, program Digital Talent Scholarship (DTS) telah diikuti oleh sebanyak 608.798 peserta, dan program Digital Leadership Academy (DLA) telah memberi manfaat kepada 1.236 peserta. Pencapaian ini tidak terlepas dari kerja keras, kerjasama dan dedikasi seluruh insan sivitas Kominfo, mitra kerja dan masyarakat yang senantiasa mendukung program serta kebijakan Kominfo," jelasnya.

Berantas Judi Online

Perwujudan lain dari transformasi digital adalah bersihnya ruang digital dari segala bentuk kejahatan siber, penyalahgunaan platform digital baik media sosial hingga aplikasi, dan yang terpenting adalah memberantas kegiatan praktek ilegal perjudian *online*.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan akhir-akhir ini judi *online* menjadi salah satu tantangan yang memerlukan kolaborasi serta sinergi lebih erat. Transformasi digital terus berkembang memerlukan inovasi berkelanjutan dan kebijakan yang terus responsif guna memastikan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.

“Dari sekian banyak tantangan, judi *online* merupakan ancaman serius bagi perkembangan generasi muda kita kedepan. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberantasan judi *online* harus dilakukan secara tegas dan konsisten oleh seluruh satuan kerja Kominfo,” ungkap Menteri Budi Arie.

Dalam hal ini, Menkominfo Budi Arie menegaskan keseriusannya dalam memberantas judi *online* di Indonesia sejak

dilantik sebagai Menteri Kominfo. Berbagai langkah-langkah strategis untuk memberantas praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara pun telah dijalankan dengan baik.

“Dalam kurun waktu satu tahun dua bulan sejak saya dilantik, kita telah berhasil menutup akses 3,4 juta konten perjudian *online*. Selain itu juga kita menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, organisasi masyarakat dan organisasi mahasiswa hingga kelompok emak-emak dalam meningkatkan efektivitas dalam mengkampanyekan bahaya judi *online*. Sosialisasi yang masif ini tentunya harus terus dilakukan kepada masyarakat,” imbuhnya.

Kementerian Kominfo juga terus memperkuat sisi penguatan sistem dengan memiliki teknologi canggih untuk mendeteksi dan memblokir situs judi *online* secara lebih efektif sehingga mengurangi praktik dan dampak negatifnya bagi generasi penerus bangsa.

Dengan demikian, melalui momentum puncak perayaan HUT Ke-23 Kominfo, Menteri Budi Arie mengajak seluruh sivitas dan mitra kerja untuk bersama-sama mewujudkan transformasi digital nasional melalui Visi Indonesia Digital 2045 demi menyongsong perwujudan Indonesia Emas 2045.





**MENKOMINFO
BUDI ARIE**



**WAMENKOMINFO
NEZAR PATRIA**

Arah Baru Kominfo di Tangan

Budi Arie dan Nezar Patria



Menteri Budi Arie yakin Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Maju dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur digital yang inklusif.”

Pada 17 Juli 2023, Presiden Joko Widodo melantik **Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) serta Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo)**. Pelantikan ini bertujuan untuk memperkuat sektor teknologi, komunikasi, dan informatika, yang menjadi pilar utama dalam pembangunan Indonesia Maju.

Budi Arie, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, diamanahkan untuk menggantikan Mahfud MD sebagai Plt. Menkominfo. Sedangkan, Nezar Patria sebelumnya menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN akan mendampingi Budi dalam memimpin Kementerian Kominfo hingga akhir masa jabatan 2019-2024.

Dalam pernyataan usai pelantikan, Budi Arie menegaskan komitmennya untuk menjalankan empat tugas utama yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Pertama, pemerataan infrastruktur digital agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses teknologi. Kedua, pengendalian platform digital yang dinilai berdampak negatif. Ketiga, memperkuat ekosistem digital dengan mengadaptasi teknologi seperti IoT, *Cloud Computing*, dan AI. Terakhir, membangun narasi Pemilu Damai 2024 bersama Kemenko Polhukam.

Menkominfo menekankan pentingnya optimisme dalam menghadapi berbagai tantangan. Menteri Budi Arie yakin Indonesia bisa mencapai visi Indonesia Maju dengan memanfaatkan teknologi dan infrastruktur digital yang inklusif.

Wujudkan Visi Indonesia Maju Lewat Pembangunan Infrastruktur Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mempercepat pemerataan infrastruktur digital untuk mencapai transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI pada 10 Juni 2024, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyampaikan bahwa enam program strategis terkait infrastruktur digital telah diselesaikan selama 2023 dan 2024.

Salah satu program penting adalah **migrasi siaran televisi dari analog ke digital atau Analog Switch Off (ASO)**, yang menjadi landasan digitalisasi penyiaran televisi nasional. Melalui program ini, Kemenkominfo telah mendistribusikan Set Top Box kepada lebih dari 1,3 juta rumah tangga miskin, memungkinkan mereka mengakses siaran digital berkualitas tinggi.

Di bidang telekomunikasi, Kemenkominfo berhasil membangun 6.672 Base Transceiver Station (BTS) untuk menyediakan layanan *Mobile Broadband* 4G di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting dalam mempercepat akselerasi transformasi digital di berbagai wilayah Nusantara.

Tol Langit Sambungkan Nusantara

Pada 28 Desember 2023, Menkominfo Budi Arie meresmikan pengoperasian BTS 4G dan peluncuran satelit SATRIA-1 di Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun infrastruktur telekomunikasi pada tiga tingkatan, yaitu tulang punggung (*backbone*), *middle-mile*, dan *last-mile*.

Untuk jaringan tulang punggung, pemerintah membangun Jaringan Kabel Serat Optik Palapa Ring sepanjang 12.229 km, yang mencakup jalur darat dan bawah laut. Di tingkat *middle-mile*, pemerintah meluncurkan **Satelit Multifungsi SATRIA-1 pada Juni 2023 dengan kapasitas 150 Gbps**. Satelit ini diharapkan menyediakan akses internet di 37.000 titik layanan publik di seluruh Indonesia, mulai kuartal pertama 2024.

Pada tingkat *last-mile*, Kemenkominfo telah membangun BTS di 7.300 lokasi, termasuk 1.682 BTS Universal Service Obligation (USO) yang sudah *on air*, dan 4.990 BTS 4G lainnya yang sudah beroperasi, meski masih terdapat 628 BTS yang dalam proses penyelesaian karena kendala logistik. Selain itu, pemerintah juga menyediakan 14.441 titik akses internet di lokasi strategis seperti sekolah, kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, dan pertahanan.



Penguatan Teknologi melalui IDTH

Pemerintah juga memperkuat ekosistem digital melalui peresmian **Indonesian Digital Test House (IDTH) di Depok pada 7 Mei 2024**. IDTH adalah pusat pengujian perangkat berstandar internasional, yang akan mendukung pengembangan riset dan sertifikasi produk digital dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global.

Fasilitas ini memungkinkan pengujian berbagai fitur perangkat digital, seperti telekomunikasi, radio frekuensi (RF), Electro Magnetic Compatibility (EMC), *electrical safety*, hingga Specific Absorption Rate (SAR). Dengan adanya IDTH, Indonesia diharapkan bisa menjadi pemain penting dalam rantai pasok teknologi global.

IDTH

IDTH adalah pusat pengujian perangkat berstandar internasional, yang akan mendukung pengembangan riset dan sertifikasi produk digital dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global.



Penguatan Keamanan Siber

Seiring dengan pembangunan infrastruktur digital, Kominfo juga fokus pada **penguatan keamanan dan tata kelola ekosistem Pusat Data Nasional (PDN)**. Pembangunan PDN di Cikarang dan Batam bertujuan mendukung konsolidasi data nasional dan meningkatkan keamanan data pemerintah. Insiden *ransomware* yang menyerang PDNS-2 beberapa waktu lalu menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah dalam menjaga keamanan digital.

Menkominfo Budi Arie menegaskan pemerintah saat ini berkomitmen mempercepat pemulihan layanan digital di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pemulihan dilakukan dengan menggunakan metode dekripsi untuk membuka data yang terkunci akibat serangan siber.

Dengan berbagai program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan, Kemenkominfo berada di garis depan dalam menyediakan infrastruktur digital yang merata, aman, dan berkelanjutan. Mulai dari pembangunan BTS hingga peluncuran satelit SATRIA-1, serta penguatan ekosistem Pusat Data Nasional dan Indonesian Digital Test House (IDTH), pemerintah berkomitmen menghadirkan Indonesia yang semakin terkoneksi, makin digital, dan makin maju. Tantangan tetap ada, tetapi melalui pendekatan terintegrasi, Kemenkominfo optimis dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai pemain kunci di era digital global.

Pengendalian Platform Digital, Inisiatif, dan Optimisme Tanggulangi Judi Daring

Judi daring (*online*) telah menjadi salah satu tantangan terbesar dalam dunia digital di Indonesia. Dampaknya tidak hanya merusak kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah mengambil berbagai langkah tegas untuk memberantas praktik judi daring yang meresahkan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Indonesia melalui Kemenkominfo terus memperkuat upaya pemberantasan platform yang meresahkan masyarakat, khususnya situs judi daring. Dalam kurun waktu Januari 2024, selama 167 hari masa jabatan, Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi berhasil memblokir lebih dari 800 ribu konten judi daring. Jumlah ini mencerminkan hasil pemblokiran konten judi daring yang setara dengan lima tahun sebelumnya.



Sejak 17 Juli 2023 hingga 30 Desember 2023, total konten judi *online* yang ditangani mencapai 805.923 konten. Rinciannya termasuk 596.348 situs dan IP, 173.134 platform Meta, 29.257 akun platform file sharing, 5.993 platform Google dan YouTube, 367 platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), 170 platform Telegram, 15 platform TikTok, 8 platform App Store, dan 1 platform Snack Video.

Menanggapi dampak yang ditimbulkan oleh judi daring, Presiden Joko Widodo mengadakan rapat dengan para menteri kabinet pada Mei 2024 untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi *Online*. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik judi daring. Satgas ini dipimpin oleh Menkopolkam, dengan Menkominfo sebagai ketua bidang pencegahan, dan Kapolri sebagai ketua penindakan.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa selama periode 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024, pemerintah berhasil menurunkan sebanyak 1.904.246 konten judi daring. Selain itu, sebanyak 5.364 rekening *e-wallet* yang terafiliasi dengan judi daring sudah diblokir, dan 555 *e-wallet* diajukan ke Bank Indonesia untuk pemblokiran lebih lanjut.

Atasi Keyword dan Phishing di Platform Digital

Salah satu tantangan besar dalam pemberantasan judi daring adalah evolusi kata kunci atau *keyword* baru di platform digital. Kemenkominfo bekerja sama dengan platform seperti Google dan Meta untuk mengontrol dan melarang penggunaan *keyword* terkait judi daring. Hingga pertengahan 2024, terdapat 20.241 *keyword* baru di Google dan 2.637 *keyword* di Meta yang terkait dengan judi daring dan terus diawasi oleh pemerintah.

Selain itu, fenomena *phishing*, di mana konten judi daring menyusup ke situs lembaga pendidikan dan pemerintahan, juga menjadi perhatian. Menurut Menkominfo, sebanyak 14.823 konten judi daring ditemukan di situs pendidikan, sementara 17.001 konten judi daring menyusup ke situs pemerintahan.

Ciptakan Lingkungan Digital yang Aman

Menkominfo Budi Arie menekankan pentingnya menciptakan lingkungan digital yang aman dan bebas dari praktik meresahkan seperti judi daring. Pemblokiran dan pemberantasan judi daring bukan hanya langkah teknis, tetapi juga langkah moral untuk melindungi masyarakat dari penipuan. Beliau berharap langkah-langkah sistematis dan komprehensif ini akan mempercepat tercapainya Indonesia yang lebih aman dan sehat secara digital.

Menkominfo juga menyerukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), balai monitoring daerah, dan stakeholder terkait untuk turut serta dalam kampanye masif yang menyadarkan masyarakat bahwa judi *online* adalah bentuk penipuan. Kolaborasi di semua tingkatan sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan upaya ini.

Langkah-langkah strategis dilakukan dengan menyusun enam strategi utama dalam pemberantasan judi *online*. Keenam langkah strategi situ meliputi pemblokiran VPN gratis yang digunakan untuk mengakses judi daring, pemutusan Network Access Provider (NAP) yang beroperasi dari Kamboja dan Filipina, pengendalian Domain Network Server (DNS) publik dengan peringatan kepada beberapa platform digital, pembatasan transfer pulsa maksimal satu juta rupiah per hari, kecuali untuk agen pulsa, audit terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang berpotensi digunakan untuk aktivitas judi *online*, serta penyusunan Instruksi Presiden tentang Pelarangan dan Pemberantasan Kegiatan Perjudian dalam Jaringan.

Menkominfo menegaskan pemberantasan judi daring memerlukan kerja sama erat dengan platform digital besar seperti Google, Meta, TikTok, dan YouTube untuk meminimalisir penyebaran konten yang merugikan masyarakat. Dari Maret hingga Mei 2024, sebanyak 290.850 konten judi daring berhasil di-*takedown*, dengan rata-rata 10 ribu konten per hari.

Dengan berbagai langkah tegas yang diambil, Kementerian Kominfo optimis judi daring akan dapat diberantas secara menyeluruh dari Indonesia. Lebih dari 3 juta situs judi daring telah berhasil ditutup sejak Juli 2023 hingga September 2024. Upaya berkelanjutan ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia bebas dari praktik-praktik yang merugikan dan merusak tatanan sosial.

Menkominfo berharap dengan dedikasi dan semangat tinggi, pemerintah akan terus berhasil memerangi praktik judi daring, melindungi masyarakat, dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih besar. "Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi, kami berharap dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat bagi seluruh warga negara serta menyelamatkan masyarakat dari wabah penipuan yang dibawa oleh judi daring," ungkapnya.

Bangun Ekosistem Digital, Upaya Strategis Kominfo Hadapi Transformasi Teknologi

Dalam era perkembangan teknologi yang pesat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Untuk mencapai tujuan ini, Kominfo telah menetapkan tiga langkah strategis utama: pemutusan akses dan penghapusan konten ilegal, keterlibatan dalam forum internasional untuk penguatan tata kelola global, serta penyusunan regulasi untuk mengatur ekosistem digital di Indonesia.

1. Pemutusan Akses dan Take Down Konten Pelanggaran

Sejak 17 Juli hingga 14 November 2023, Kominfo berhasil memutus akses dan menghapus 962.719 konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna internet di Indonesia, serta mencegah penyebaran informasi yang merugikan masyarakat. Penghapusan konten ilegal ini berfokus pada melawan penyebaran konten berbahaya dan menjaga kualitas informasi yang tersedia di dunia maya.

2. Keterlibatan di Forum Internasional

Sebagai wujud kontribusi Indonesia di tingkat global, Kominfo aktif terlibat dalam berbagai forum internasional, termasuk AI Safety Summit. Di forum ini, Kominfo menyuarakan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang aman dan bertanggung jawab. Partisipasi ini menunjukkan posisi strategis Indonesia dalam pembentukan regulasi global terkait teknologi AI, memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam tata kelola teknologi global.

3. Penyusunan Regulasi untuk Ekosistem Digital yang Inklusif

Wakil Menteri Kominfo, Nezar Patria, mengungkapkan bahwa Kominfo sedang memfinalisasi beberapa regulasi penting, termasuk revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), aturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Pedoman Etika AI. Regulasi ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem digital yang aman dan inklusif, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat di Indonesia dapat menikmati manfaat dari transformasi digital secara adil.



Bangun Masa Depan Jurnalisme Berkualitas dengan Perpres *Publisher Rights*

Salah satu langkah penting dalam mendukung ekosistem digital adalah pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang dikenal sebagai Perpres *Publisher Rights*. Perpres ini diharapkan menjadi fondasi bagi hubungan bisnis yang sehat antara platform digital dan penerbit.

Menurut Wamen Nezar Patria, Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur *Publisher Rights* dibandingkan dengan negara lain seperti Australia dan Kanada. Sementara negara-negara tersebut lebih fokus pada aspek bisnis, Indonesia menggabungkan elemen kompetensi dan etika jurnalisme. "Perpres ini bertujuan untuk memprioritaskan jurnalisme berkualitas sesuai dengan Undang-Undang Pers, sekaligus menjamin transparansi dan keadilan dalam hubungan bisnis antara perusahaan platform digital dan penerbit," jelasnya.



Perpres ini juga mencakup pembentukan komite yang akan mengawasi pelaksanaan peraturan dan memastikan bahwa platform digital memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan media. Komite ini akan bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa dan memastikan kompensasi yang adil, sesuai dengan negosiasi antara pihak-pihak terkait.

Pengembangan Tata Kelola AI

Tantangan lain dalam membangun ekosistem digital adalah tata kelola kecerdasan buatan (AI). Kominfo terus berupaya mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengatur pemanfaatan teknologi AI. Pada 19 Desember 2023, Kominfo merilis Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan, yang menjadi panduan bagi pelaku usaha dalam memanfaatkan AI dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika.

Menurut Wamen Nezar Patria, AI memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Tren penyusunan tata kelola AI yang semakin intensif menunjukkan betapa besar potensi AI. Namun, kita juga harus waspada terhadap tantangan seperti bias algoritma dan ancaman disinformasi," tegasnya.

Kominfo juga sedang menyelaraskan rancangan peraturan menteri tentang tata kelola AI dengan aturan-aturan yang sudah ada, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Regulasi ini diharapkan dapat segera diselesaikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebelum berakhir pada Oktober 2024.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kominfo telah mengambil berbagai langkah strategis untuk membangun ekosistem digital yang aman, inklusif, dan mendukung pertumbuhan jurnalisme berkualitas serta pemanfaatan teknologi AI. Dengan penyusunan regulasi yang tepat dan keterlibatan dalam forum global, Indonesia siap menghadapi tantangan digital di era modern, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk keuntungan masyarakat secara luas.



Literasi Digital dan Ajakan Dorong Partisipasi Masyarakat

Menjelang Pemilu 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. "Demi Indonesia cerdas memilih, saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital, dan tidak begitu saja percaya, apalagi menyebarkan hoaks," tegas Menkominfo.

Sementara itu, pada hari pemungutan suara, 14 Februari 2024, Menkominfo bersama keluarganya akan menggunakan hak pilih di TPS 001, Senayan, Jakarta Selatan. Ia mengimbau masyarakat yang belum memilih untuk segera mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak suara mereka. "Masyarakat antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Apalagi hari ini banyak diskon belanja bagi pemilih," ujarnya.

Menkominfo berharap hasil Pemilu 2024 dapat membawa persatuan dan kedamaian di tengah masyarakat Indonesia. "Semoga Pemilu Damai untuk menyatukan bangsa dapat kita wujudkan," harapnya.

Sejak menjabat, Menkominfo Budi Arie Setiadi bersama Wakil Menteri Nezar Patria telah menjalankan berbagai tugas penting, termasuk menyelesaikan proyek BTS yang terhenti dan menanggulangi masalah judi *online*. Menkominfo juga berterima kasih kepada mitra Komisi I DPR RI atas kerja sama yang baik. "Kita ingin berbuat sesuatu yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan negara kita tercinta," tutupnya.



Dimensi Temporal Kominfo:

Meletakkan Fondasi Transformasi Digital Indonesia

(Wawancara Eksklusif bersama **Wamenkominfo Nezar Patria**)

Oleh: Ahmad Irso Kubangun

Dimensi waktu dari masa ke masa dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selalu menarik untuk disimak. Indonesia, termasuk negara yang cukup gesit dan responsif dalam menyikapi perkembangan digitalisasi secara global. Dalam dimensi waktu, orang berbicara tentang suatu peristiwa masa lalu, kini, dan masa depan. Istilah ini dikenal juga dengan dimensi temporal, bahwa setiap kejadian yang merupakan penanda sejarah dicatat sebagai hari penting.

Maka hari-hari ini, kita turut menyaksikan bagaimana upaya pemerintah meletakkan legacy yang konkret dalam merespons perkembangan global. Legacy itu diletakkan melalui fondasi **Transformasi Digital Nasional**.



Wakil Menteri Kominfo Pertama

Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 April 2023 mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam pasal 1 ayat 2 Perpres ini menyatakan "Dalam memimpin Kemenkominfo, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukkan Presiden". Lewat Perpres ini, sejarah baru lahir. Di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah Kementerian Kominfo memiliki seorang Wakil Menteri.

Pada tanggal 17 Juli 2023, tepat tiga bulan kemudian setelah Perpres 22/2023 disahkan, Presiden Jokowi melantik Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria. Kepada keduanya, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyelesaikan berbagai program dan kebijakan yang mendukung akselerasi transformasi digital nasional.

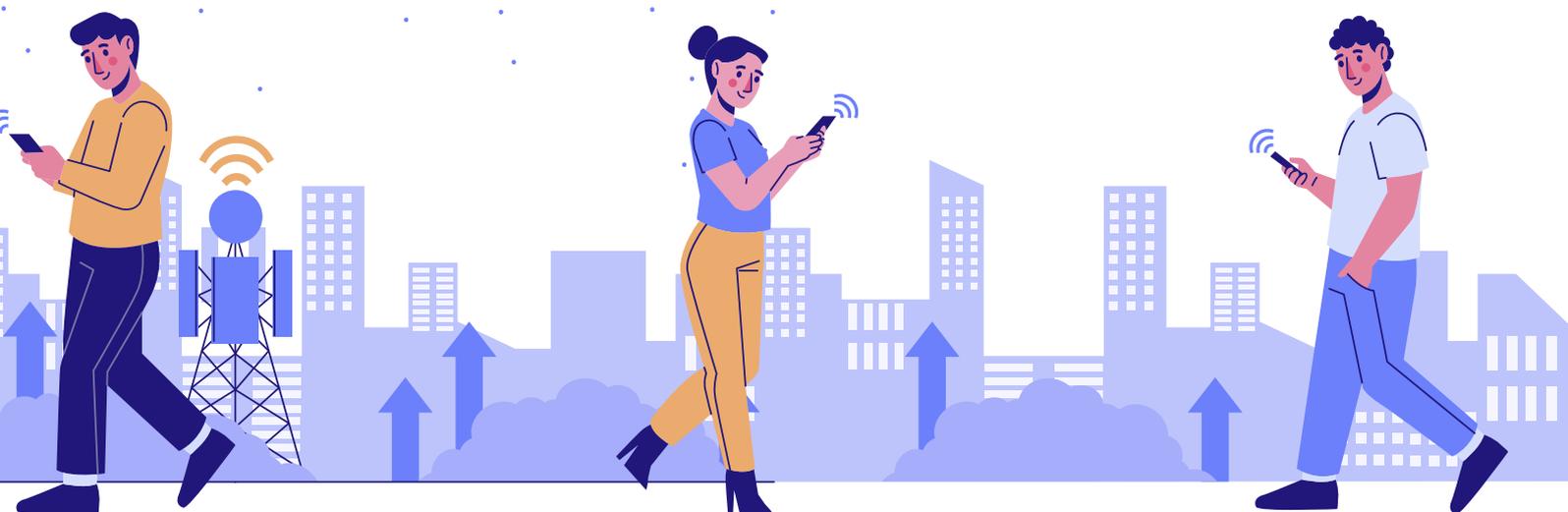
Melihat cakupan pekerjaan Kementerian Kominfo yang luas, posisi Wakil Menteri Kominfo sangat berperan penting untuk memastikan program dari hulu ke hilir dapat berjalan lancar. Dari program penataan spektrum frekuensi radio, pembangunan infrastruktur telekomunikasi, regulasi yang terkait dengan pos, telekomunikasi dan penyiaran hingga kebijakan strategis yang mengarah kepada tata kelola informasi dan teknologi.

Wamenkominfo Nezar Patria mendeskripsikan perannya membantu percepatan transformasi digital, memastikan pekerjaan dari hulu seperti konektivitas dan pengelolaan data sampai ke hilirnya melalui pesatnya penggunaan



digitalisasi untuk memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi dan juga penataan lalu lintas informasi yang sehat.

"Sehingga dengan ruang lingkup yang besar itu, pekerjaan ini sangat wajar kalau seorang Menteri Kominfo dibantu oleh Wakil Menteri," Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo RI.



Tata Kelola AI dan Ekosistem

Sejak dilantik, Wamenkominfo Nezar Patria mencatat empat aspek penting yang berhasil dikebut dengan berbagai capaian dalam kurun waktu satu tahun dua bulan berjalan. Pertama, **Tata Kelola dan Regulasi** percepatan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights atau Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Kedua, **Penyusunan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan**. Dalam penyusunan SE ini, Presiden Jokowi menugaskan langsung Menteri Kominfo dan Wakil Menteri Kominfo untuk merespons cepat pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI).



Ketiga, **Aktif di Forum Internasional**. Beberapa forum internasional menjadi panggung penting Indonesia di sektor digitalisasi. Wamenkominfo Nezar Patria hadir dalam forum-forum itu untuk meyakinkan dunia bahwa Indonesia siap pada era baru adopsi teknologi AI dan tata kelola ekosistemnya.

Adapun sejumlah pertemuan global itu antara lain Internet Governance Forum (IGF) 2023 di Kyoto, Jepang pada Oktober 2023. Wamenkominfo Nezar Patria dalam forum ini menyuarakan moderasi konten, keberimbangan dan non-diskriminasi, serta upaya penguatan literasi digital. Kemudian, AI Safety Summit 2023 di London, Inggris pada November 2023.

Pada forum ini, Indonesia menawarkan gagasan kepada dunia agar penggunaan AI memprioritaskan keamanan yang dapat menjamin integritas kerahasiaan dan ketersediaan data. Forum AI Safety Summit 2023 juga menghasilkan Bletchley Declarations, salah satu deklarasi yang cukup penting setelah the Hiroshima AI Process.

Kemudian, dalam Unesco Global Forum on Ethics of AI di Slovenia pada Februari 2024. Wamen Nezar Patria memamerkan sekitar 198 perusahaan rintisan atau *startup* karya anak bangsa telah mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial. Forum tersebut juga penting bagi Indonesia dalam menyampaikan komitmennya menghadirkan regulasi dan tata kelola AI di Indonesia dan kawasan.

Forum global lain yang tidak kalah pentingnya adalah the Third Summit for Democracy Forum KTT ke-3 di CEOX, Seoul, Korea Selatan pada Maret 2024. Indonesia dalam forum ini bersuara mengenai tantangan yang dihadapi negara berkembang di era digital. Salah satunya berkaitan dengan perang melawan information disorder seperti hoax, bullying, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan fitnah.

Wamen Nezar Patria menyatakan penyelesaian tantangan itu membutuhkan penanganan secara holistik sesuai konteks negara Selatan-Selatan. Sehingga persoalan selanjutnya yang dihadapi negara-negara *low and middle income* di era digital adalah keterbatasan sumber daya, kendala bahasa, kesenjangan ilmu pengetahuan, minimnya infrastruktur digital serta hambatan politik dan juga hukum.

“**Jadi serangkaian kegiatan forum-forum global ini mewarnai beberapa *policy* yang kemudian kita keluarkan di Kominfo...**”

“Jadi serangkaian kegiatan forum-forum global ini mewarnai beberapa policy yang kemudian kita keluarkan di Kominfo. Artinya, kita berangkat dari situasi riil yang ada di Indonesia terutama tentang tata kelola ekosistem penggunaan AI. Kemudian, kita lihat bagaimana dunia saat ini mengatur perkembangan teknologi yang mutakhir ini dan kita coba membuat semacam perbandingan, lalu tentu saja kita bertolak dari situasi dan kebutuhan khusus yang ada di dalam negeri,” jelas Wamenkominfo Nezar Patria.

Dari rangkaian forum global itu dapat kita cermati bahwa penguatan tata kelola AI menjadi agenda prioritas Kementerian Kominfo dalam satu tahun terakhir. Langkah-langkah yang telah dilakukan beberapa diantaranya adalah memastikan implementasi SE Etika AI dan kerjasama dengan UNESCO menghasilkan Readiness Assessment Methodology Artificial Intelligence (RAM AI).

RAM AI diperuntukkan untuk mengukur tingkat kesiapan suatu negara mengadopsi pengembangan AI. Dalam konteks ini, Indonesia mencoba melihat bagaimana kesiapan infrastruktur teknologi, ekonomi dan kesiapan masyarakat hingga aspek regulasi yang mendukung untuk pengembangan AI.

Keempat, **Pendampingan Penanganan Insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS-2) Surabaya.** Sebagaimana diketahui, PDNS-2 yang terkena *cyber attack* berupa ransomware beberapa waktu lalu menghebohkan publik. Proses normalisasi pun membutuhkan waktu karena

impact yang dihasilkan oleh serangan siber juga mengancam pelayanan publik secara keseluruhan.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Kominfo bersama kementerian dan lembaga lainnya secara bertahap melakukan proses pemulihan hingga seluruh layanan publik kembali berjalan normal.

Sebagai negara berkembang yang terus berkomitmen membangun kerjasama global di sektor digital, Kementerian Kominfo menjalankan *one track diplomation* yang telah terjalin dengan negara sahabat. Tentu dalam hal ini sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Kominfo berkontribusi dalam penguatan tata kelola di sektor digital baik level global, regional, maupun bilateral melalui pertemuan yang bersifat *sharing knowledge, sharing experience*, hingga membangun kerjasama yang lebih konkrit seperti dalam G20 2022 dan ASEAN Digital Ministers Meeting guna memastikan posisi Indonesia dalam percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan adopsi *emerging technologies*.



Kolaborasi dan Kerja Nyata

Percepatan transformasi digital nasional yang digaungkan oleh Kementerian Kominfo terus berlanjut. Di masa kepemimpinan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Pemerintah memastikan kolaborasi dan kerja nyata bersama stakeholders untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan transformasi digital.

“Transformasi digital ini sudah berlangsung hampir satu dasawarsa dan menjadi agenda pemerintah secara umum, terutama untuk membuat apa yang disebut sebagai e-Gov,” jelas Wamen Nezar

Dalam tiga tahun terakhir, Presiden Jokowi memberikan perhatian seriusnya mengakselerasi proses transformasi digital. Kementerian Kominfo sebagai leading sektornya, membantu kementerian PAN-RB membuat pelayanan pemerintahan digital yang kini disebut INA Digital. Untuk sektor pemerintahan terdapat INA Gov, INAKU untuk layanan publik dan ada INA Pass untuk identitas digital sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai ID Digital.

Kolaborasi juga dilakukan dengan kementerian dan lembaga lain karena dalam INA Digital ada layanan pendidikan, kesehatan, asuransi, perlindungan sosial seperti BPJS, layanan yang berkaitan dengan legalisasi dan sebagainya dalam hal pengurusan kartu keluarga, KTP, perpanjangan SIM. Kemudian, kolaborasi antar pimpinan Kementerian Kominfo ditingkatkan melalui kerja keras pemberantasan konten negatif di ruang digital khususnya perjudian *online*.

Sedangkan program fisik, pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah 3T tetap tak luput dari fokus utama dan prioritas. Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Kominfo merampungkan pembangunan BTS termasuk sejumlah masalah yang tersangkut dengan masalah

hukum diselesaikan secara hukum. Optimalisasi dan utilisasi satelit SATRIA-1 juga dilakukan melalui Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Dari aspek legislasi, Kominfo melakukan percepatan pembahasan regulasi prioritas yang saat sedang menjadi konsentrasi seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden tentang Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah tentang tata kelola pelindungan anak oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, serta revisi Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

“Saya kira dalam waktu satu tahun lebih, sekitar 15 bulan amanat itu berada di tangan kami. Saya dan Pak Menteri Budi Arie Setiadi, kita coba lakukan percepatan agar program-program prioritas itu bisa dilakukan secara maksimal dan optimal dalam satu tahun. Kalau menurut evaluasi yang kita buat, semua program prioritas itu alhamdulillah bisa berjalan dengan optimal,” ungkap Wamen Nezar.

Dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Kominfo ditugaskan sebagai salah satu tim komunikasi publik untuk menyampaikan capaian pemerintah dalam Perjalanan 10 Tahun kepemimpinan Jokowi. Pada projek ini, tim akan menyusun mengenai program apa saja yang dapat dijadikan pelajaran atau role model bagi pemerintahan selanjutnya. Masyarakat Indonesia juga dapat mengingat setiap capaian dan keberhasilan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam 10 tahun kepemimpinannya.

“Kita membuat *project* pencapaian 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi sebagai bagian dukungan komunikasi publik Kominfo untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang capaian ini dalam rangka mendukung transisi pemerintahan. Supaya ada program-program yang bisa berkelanjutan sesuai dengan target kita. Indonesia Emas 2045 dibutuhkan, satu keberlanjutan program yang konsisten yang berjalan dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya,” jelas Wamen Nezar Patria.

Jurus VID Menuju Indonesia Emas 2045

Dalam rangka percepatan transformasi digital, Kementerian Kominfo merumuskan Visi Indonesia Digital (VID) 2045 sebagai proyeksi yang inline dengan Visi Indonesia Emas 2045. VID 2045 dijalankan dengan empat landasan yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Wamenkominfo Nezar Patria menilai dibalik optimisme mengawal transformasi digital nasional tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini. Aspek paling penting dari tantangan tersebut adalah penyiapan talenta digital atau pengembangan SDM.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo menginisiasi program pelatihan tingkatan kecakapan talenta digital dari tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, tingkat menengah Digital Talent Scholarship, dan tingkat lanjutan Digital Leadership Academy.

“Kita konsen dengan keberlanjutan dan peningkatan skala program pengembangan SDM, karena untuk mencapai target 9 juta digital talent di 2030 harus dilakukan dengan cukup sistematis dari sekarang. Karena kita belum sampai separuhnya dari target yang kita inginkan. Dengan demikian, diperlukan akselerasi dan juga fokus dalam pembangunan digital talent ini dengan

melakukan kolaborasi seluas mungkin dengan stakeholders dan ekosistem digital Indonesia,” ungkap Wamen Nezar.

Wamenkominfo Nezar Patria menjelaskan perlunya program-program yang terpadu untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM Indonesia dalam bidang digital. Target 9 juta sebut saja di bidang pendidikan untuk peningkatan mutu dan kompetensi digital talent tidak hanya dibebankan ke satu atau dua kementerian, tapi harus menjadi konsen dan komitmen hampir di semua sektor pemerintahan terutama yang masuk ke dalam laju transformasi digital di sektor pemerintahan.

Artinya apa? Pemerintah harus bisa menjadi fasilitator dan juga menjadi enabler untuk membangkitkan ataupun membuka peluang-peluang bagi siapapun mendalami yang namanya keterampilan digital.

"Jadi dibutuhkan lebih banyak digital talent center misalnya, digital transformation office, kemudian juga nanti dengan UU PDP ada data protection officer, belum lagi kita berbicara bagaimana hilirisasi ataupun downstream dari proses digitalisasi ini bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomi atau yang kita sebut dengan value creation. Ada banyak sekali yang bisa kita lakukan disana, termasuk misalnya bagaimana pengembangan program aplikasi untuk mendayagunakan pencapaian teknologi AI," jelasnya.

Kementerian Kominfo tidak saja menyiapkan kualitas talenta digital melalui tingkatan pelatihan, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa sarana pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) di Yogyakarta telah dipersiapkan untuk bertransformasi menjadi Politeknik Digital Yogyakarta.

"Gedungnya segera kita resmikan, gedung yang cukup lengkap dan mendapatkan sambutan baik dari ekosistem masyarakat digital di Indonesia terutama pelaku bisnis digital, global *technology* karena mereka ingin berpartisipasi kampus ini dalam rangka pembangunan ataupun pembinaan *digital talent* yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, Politeknik Digital Yogyakarta ini saya kira capaian yang penting untuk kita catat dari serangkaian upaya atau program untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi digital talent kita," tandasnya.

Sebagai bangsa besar, Indonesia telah menunjukkan kepiawaiannya dalam merespons perkembangan global dengan menyiapkan berbagai langkah dan strategi melalui inisiatif program dan kebijakan. Di bidang digital, pemerintah telah membuktikan kerja nyata itu dengan menyiapkan fondasi yang kokoh dalam bingkai transformasi digital nasional. semua capaian ini akan membawa Indonesia sebagai bangsa digital yang diakui dunia dan diakui pula sebagai salah satu negara maju di masa yang akan datang.



Komando Baru Dirjen IKP Orkestrasi Komunikasi Publik di Tengah Disrupsi Teknologi

Belasan tahun malang melintang di industri media membuat sosok Prabu Revta Revolusi, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, memiliki cara pandang yang luas terhadap tantangan komunikasi publik di era disrupsi teknologi.

Sosok yang akrab disapa Prabu Revolusi ini menilai, perubahan zaman telah mengubah cara pemerintah menyampaikan pesan kepada masyarakat. Saat ini, penyampaian informasi harus disesuaikan dengan segmen audiens yang berbeda, karena setiap segmen memiliki karakter komunikasi yang unik.

“Tantangannya jadi berbeda ya, kalau kemarin itu lebih kepada bagaimana menyampaikan pesan dari pusat ke daerah, ke daerah terluar atau 3T itu, sekarang bukan saja hanya itu, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan lintas generasi, ke semua generasi, karena semua generasi atau setiap generasi itu punya karakter komunikasi yang beda-beda,” ujar Dirjen Prabu.



...bagaimana menyampaikan pesan lintas generasi, ke semua generasi, karena semua generasi atau setiap generasi itu punya karakter komunikasi yang berbeda

Meskipun Direktorat Jenderal IKP sudah meletakkan dasar-dasar komunikasi publik dan manajemen sistem informasi untuk pemerintah, namun masih diperlukan berbagai inovasi untuk memastikan informasi dari pemerintah diterima oleh seluruh golongan masyarakat.

“Kalau ke depan bisa dibilang IKP itu ya harus menjadi IKP 5.0 gitu, jadi IKP yang sudah bisa berkomunikasi, melakukan manajemen informasi di semua platform informasi yang ada, apakah itu konvensional, tradisional, ataupun juga platform media baru atau digital,” jelasnya.

Dirjen Prabu menjelaskan karakter diseminasi informasi telah berubah, di masa lalu, masyarakat hanya bersifat pasif dalam menerima informasi, diantaranya melalui surat kabar, radio, dan televisi yang seluruh kontennya disiapkan oleh tim redaksi yang telah memastikan kebenaran informasi yang disampaikan.

Sedangkan saat ini setiap orang bisa memilih sendiri konten yang akan dikonsumsi di berbagai platform sesuai dengan keinginannya.

“Kalau saya enggak suka tayangan drama, ya enggak nonton drama, nontonnya film thriller misalnya, kalau saya enggak suka film sinetron, saya sukanya horor, ya saya yang pilih horornya. Kalau dulu kan enggak bisa, sekarang kan kita meng-custom sendiri informasi yang kita konsumsi atau yang kita akses. Kalau saya enggak suka berita politik, saya suka berita ekonomi, itu kan semuanya kita yang pilih, tailor-made gitu, jadi kita yang memilih informasinya,” tuturnya.

Kondisi yang seperti ini membuat pemerintah harus kreatif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan menyesuaikan isi pesan sesuai dengan segmen audiens yang dituju.

Selain itu, pesan juga harus disampaikan melalui kanal yang tepat sesuai dengan target audiens, contohnya penggunaan kanal media sosial untuk menjangkau Generasi Z atau menggunakan perantara komunitas UMKM untuk menyampaikan pesan kepada para pelaku UMKM.

Regulasi Media Sosial

Tidak seperti media sosial, media tradisional seperti media cetak dan penyiaran sudah memiliki regulasi yang lengkap.

Berbagai regulasi seperti Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), dan Kode Etik Jurnalistik bertujuan untuk menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Sedangkan platform media baru, termasuk media sosial, belum memiliki regulasi seperti media tradisional, padahal informasi yang disampaikan dikonsumsi oleh publik secara luas.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo akan menginisiasi regulasi untuk media baru di Indonesia.

“Jadi ke depan kita akan menginisiasi regulasi yang tepat untuk media baru, tidak hanya sosial media sebetulnya, sosial media salah satunya,” katanya.

Dirjen Prabu memastikan regulasi tersebut tidak ada kaitannya dengan pembatasan kebebasan berekspresi, namun bertujuan untuk mencegah beredarnya informasi yang salah, seperti hoaks, disinformasi, misinformasi, dan malinformasi.

“Saya kembali lagi mengatakan, ini seperti wah semuanya diatur, enggak gitu, sama sekali tidak mengatur, nanti podcast enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak, biasa, berkarya sebebaskan-bebasnya, bebas, tapi jangan menyebarkan informasi yang salah dong, jangan menyebarkan hoaks dong, jangan menyebarkan misinformasi dong, itulah yang akan kita regulasi,” tegasnya.

Regulasi media sosial ini merupakan hal yang umum diterapkan di negara-negara lain, termasuk negara-negara maju, aturan yang diterapkan salah satunya adalah pembatasan usia minimal untuk membuat akun di media sosial.

“Jangan berpikir bahwa, wah di Indonesia dibatasi, enggak ya. Kita justru malahan saat ini negara yang belum meregulasi konten sosial media, sementara negara-negara lain itu sudah melakukan hal tersebut, di Australia misalnya, ada aturan sekarang yang akan diberlakukan juga, remaja sebelum berusia 16 tahun tidak boleh bersosial media, itu kan aturan tuh, di kita belum ada aturan itu,” ungkapnya.

Menurut Dirjen Prabu, dengan adanya regulasi yang jelas maka setiap platform media sosial yang beroperasi di Indonesia harus patuh terhadap aturan yang ada dan bertanggung jawab terhadap informasi yang disebar di platform mereka.

Jaga Etika di Dunia Maya

Dirjen Prabu juga menyoroti masalah etika para pengguna media sosial yang terkadang gemar menuliskan kata-kata untuk mencaci-maki dan kata-kata lain yang tidak pantas.

Padahal di dunia nyata, bisa jadi mereka ini memiliki kepribadian yang berbeda dengan yang mereka tunjukkan di media sosial.

Menurut Dirjen Prabu, fenomena tersebut terjadi karena banyak pengguna media sosial tidak menyadari konsekuensi yang bisa didapatkan akibat dari konten yang mereka unggah.

Sebagai contoh, banyak pengguna media sosial yang tidak mengetahui bahwa mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada seseorang bisa dilaporkan ke aparat penegak hukum dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Contoh lain adalah perbuatan netizen yang mencuri dan mengunggah data pribadi seseorang bisa diancam pidana oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

“Mencuri informasi sama dahsyatnya, sama beratnya dengan mencuri properti yang kamu punya, karena itu kan informasi pribadi yang bisa disalahgunakan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendorong adanya sinergi dengan sektor pendidikan untuk memasukkan materi etika sosial media ke dalam pembelajaran di sekolah, mulai dari Sekolah Dasar.

“Anak-anak kita sekarang belum diajari tentang etika bersosial media sejak kecil, sehingga saat dewasa menggunakan sosial media, ya enggak punya batasan,” ujarnya.

Selain masalah etika, Dirjen Prabu juga meminta masyarakat memiliki daya kritis dalam menalar informasi untuk membedakan informasi yang benar dan tidak.



"Masyarakat kita harapkan juga bisa meningkatkan literasinya dengan daya kritis yang lebih tinggi, sehingga ada filtrasi terhadap informasi yang masuk," ujarnya.

Dirjen Prabu menambahkan kemudahan bagi siapapun untuk membuat konten di media sosial banyak dimanfaatkan untuk menyebarkan konten hoaks demi tujuan tertentu.

Dirjen Prabu menegaskan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dibutuhkan komunikasi yang baik dari pemerintah dan ruang digital yang bersih dari informasi yang tidak benar.

Direktorat Jenderal IKP akan terus bertugas mengawal agar informasi-informasi yang benar dapat sampai kepada masyarakat sehingga pemerintah dapat mewujudkan target Indonesia Emas 2045 dengan dukungan dari publik.



**Mencuri informasi
sama dahsyatnya,
sama beratnya dengan
mencuri properti yang
kamu punya, karena
itu kan informasi
pribadi yang bisa
disalahgunakan**



Kominfo dan *Stakeholders* Deklarasi Berantas Judi Online

© 2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO



Geliat judi *online* telah menjadi salah satu tantangan besar di era digital saat ini. Kegiatan nonproduktif nan membahayakan sungguh mempengaruhi berbagai segmen masyarakat dengan dampak yang sangat merugikan. Tidak hanya itu, masalah serius lainnya telah mengancam banyaknya tatanan kehidupan masyarakat, sosial, ekonomi hingga telah memakan korban dalam ruang lingkup keluarga.

Secara regulasi, Pemerintah Indonesia mengacu pada beberapa peraturan yang mengikat mengenai aktivitas perjudian *online* di ruang digital, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang

penyebaran konten ilegal termasuk judi *online*. Pemerintah melalui Kementerian Kominfo melaksanakan peraturan lainnya dalam pemberantasan judi *online* yakni Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71 PSTE).

Untuk mempertegas komitmen pemberantasan judi *online*, Presiden Jokowi telah membentuk Satuan Tugas Perjudian *Online* yang ditangani oleh lembaga dan kementerian terkait dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal ini bertugas melakukan pencegahan yang berkolaborasi dengan berbagai mitra dan *stakeholders*.



Sejak dilantik pada tanggal 17 Juli 2023, Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Wamenkominfo Nezar Patria telah memutus akses atau *takedown* terhadap lebih dari 2,8 juta situs dan konten judi *online*. Bersamaan dengan itu, Kementerian Kominfo mempertegas komitmennya untuk tidak saja memutus akses situs dan konten, tapi juga tidak segan memblokir aplikasi ataupun platform yang memfasilitasi perjudian *online*.

Meskipun dari segi pencegahan dan penindakan tegas telah dilakukan, geliat judi *online* masih terus beredar di tengah masyarakat. Namun kembali lagi, pemerintah khususnya Kementerian Kominfo tidak akan berhenti melakukan berbagai upaya guna memutus mata rantai perjudian *online* di Indonesia.

Deklarasi Lintas *Stakeholders*

Menkominfo Budi Arie Setiadi menggelar serangkaian deklarasi bersama berbagai *stakeholder* dalam upaya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengambil bagian penting seperti sosialisasi bahaya judi *online*. Sebut saja sepanjang bulan Juli sampai dengan Agustus 2024, Menteri Budi Arie melakukan pertemuan audiensi sekaligus deklarasi bersama beberapa organisasi dan komunitas dengan tujuan yang sama: memberantas judi *online* secara efektif.

Berikut adalah organisasi dan komunitas yang mendukung Kementerian Kominfo berantas judi *online* di Indonesia:



Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI)

Sebagai organisasi mahasiswa Islam tertua dan terbesar di Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menilai penting menjadi bagian dari ekosistem masyarakat yang mendukung pemberantasan perjudian *online*. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PB HMI Muhammad Jusrianto dalam pertemuannya dengan Menteri Budi Arie di Kantor Kementerian Kominfo, Selasa (23/7/2024).

"Kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mengancam segala bentuk tindakan judi *online* yang menjadi sumber keresahan bagi masyarakat Indonesia," kata Sekjen PB HMI Muhammad Jusrianto.

Kata Jusrianto, PB HMI mengimbau masyarakat Indonesia untuk bersama-sama memerangi judi *online* demi terwujudnya keamanan dan kenyamanan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Sementara itu, Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PB HMI Ramon Hidayat juga menyatakan siap mendukung pemerintah dalam memberantas judi *online*. "Pengurus Besar HMI siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberantas judi *online*," ujar Ramon.



Kami Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam mengancam segala bentuk tindakan judi *online* yang menjadi sumber keresahan bagi masyarakat Indonesia.



Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat Anwar Iskandar bersama sejumlah jajaran pengurus berkunjung ke Kementerian Kominfo dan bertemu langsung dengan Menkominfo Budi Arie pada Kamis (25/7/2024).

Usai melakukan pertemuan singkat, MUI dan Menteri Budi Arie kemudian menggelar konferensi pers. Dalam konpers itu, Ketum MUI Pusat Anwar Iskandar menyatakan dukungan kepada Pemerintah khususnya Kementerian Kominfo dalam pemberantasan judi *online* merupakan upaya menyelamatkan anak bangsa dari bahaya judi *online*.

"Kami punya jutaan santri, pelajar, dan jamaah di Indonesia yang tergabung di dalam pendidikan yang bersifat formal dan tidak formal, majelis taklim dan semuanya nanti kita harapkan mengedukasi masyarakat (soal bahaya judi *online*)," tuturnya. Menurut Ketum MUI Pusat upaya ini juga mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat Islam di seluruh Indonesia.

"Kami bersama lebih dari 87 organisasi masyarakat Islam di seluruh Indonesia bersepakat dan akan kebersamai Kementerian Kominfo untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa dari judi *online*," tegasnya.

Kami bersama lebih dari 87 organisasi masyarakat Islam di seluruh Indonesia bersepakat dan akan kebersamai Kementerian Kominfo untuk membulatkan tekad menyelamatkan bangsa dari judi *online*.



Pengurus Pusat Pemuda Katolik

Komitmen dan dukungan yang sama datang dari Pengurus Pusat Pemuda Katolik. Dalam pertemuan dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi, Ketua Umum PP Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara komprehensif dalam memberantas judi *online* di Indonesia.

“Pemuda Katolik akan melakukan berbagai upaya preventif, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai dampak negatif judi *online*,” ujarnya di Ruang Kerja Menteri Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (29/07/2024).

Ketum PP Pemuda Katolik Stefanus Asat Gusma mengapresiasi kinerja Kementerian Kominfo yang telah melakukan pemberantasan judi *online*. Oleh karena itu, secara organisasi, Stefanus Asat Gusma menyatakan Pemuda Katolik siap memerangi judi *online*.

“Pemuda Katolik mengapresiasi Kementerian Kominfo yang dalam waktu yang singkat mampu memberantas judi *online*,” ungkapnya.

Ketum PP Pemuda Katolik menekankan akan menjadi garda depan dalam upaya pencegahan

Pemuda Katolik akan melakukan berbagai upaya preventif, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai dampak negatif judi *online*.

dan penindakan terhadap praktik perjudian *online*. Bahkan menegaskan kesediaan untuk bekerja sama dengan pemerintah.

“Pemuda Katolik juga akan proaktif dalam melaporkan segala bentuk aktivitas perjudian *online* kepada pihak berwajib,” tandasnya.



©2024 BIRO HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO

Kreativitas Perempuan Indonesia Maju

Dari kalangan ibu-ibu, dukungan datang dari Kreativitas Perempuan Indonesia Maju yang mengapresiasi upaya Pemerintah memberantas judi *online* di Indonesia. Emak-emak ini menyerahkan Petisi Berantas Judi *Online* dan Pinjaman *Online* Ilegal kepada Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2024).

Ketua Kreativitas Perempuan Indonesia Maju Restianti mendesak pemberantasan atas praktik kegiatan ilegal di ruang digital yang makin marak di masyarakat.

“Bentuk judi apapun dilarang dilakukan di Indonesia dan juga dilarang oleh agama apapun. Hal ini berbahaya karena merugikan dan juga menyesatkan moral masyarakat Indonesia. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari judi *online* dan pinjaman *online* yang mayoritas berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah,” ungkapnya.

Restianti menyatakan kaum perempuan menilai apabila judi *online* dan pinjaman *online* dibiarkan akan merusak tatanan masyarakat sehingga perlu tindakan tegas dan serius dalam membasmi kegiatan ilegal tersebut.

Tangkap bandar judi *online* dan blokir semua rekening penampungan hasil judi *online* dan pinjaman *online* ilegal. Tegakkan hukum seadilnya agar supremasi hukum berjaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta

“Tangkap bandar judi *online* dan blokir semua rekening penampungan hasil judi *online* dan pinjaman *online* ilegal. Tegakkan hukum seadilnya agar supremasi hukum berjaya di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta,” tegasnya.



Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis)

Organisasi dan aktivis mahasiswa selain PB HMI dan Pemuda Katolik, dukungan juga diberikan oleh Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis). Dukungan itu disampaikan usai berdiskusi dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi di Kantor Kementerian Kominfo pada Selasa (27/8/2024).

Ketua Umum PP Hima Persis Ilham Nur Hidayatullah menyatakan gerakan mahasiswa yang berbasis pondok pesantren, perguruan tinggi dan majelis taklim yang dipimpinnya berkomitmen memberantas judi *online*.

"Tentu komitmen kita seperti di dalam spirit agama Islam bahwa judi itu haram menjadi langkah konkret ke depan bagaimana melakukan gerakan-gerakan untuk memberantas judi *online*, baik di kalangan umum ataupun khusus di generasi muda," tandasnya.

Ilham Nur Hidayatullah mengapresiasi keterbukaan Menkominfo melibatkan setiap organisasi pemuda dalam pemberantasan judi *online*. "Kami diskusi membahas pemberantasan judi *online* terutama untuk generasi muda. Pak Menteri pun saya kira cukup terbuka, inklusif dan kolaboratif mau bekerjasama dengan berbagai elemen, generasi muda dan berbagai kelompok dalam memberantas judi *online*," jelasnya.

Tentu komitmen kita seperti di dalam spirit agama Islam bahwa judi itu haram menjadi langkah konkret ke depan bagaimana melakukan gerakan-gerakan untuk memberantas judi online, baik di kalangan umum ataupun khusus di generasi muda

Ketua Umum PP Hima Persis menyatakan bangga menjadi bagian dalam kampanye pemberantasan judi *online* nasional. Menurutnya, langkah dan kebijakan yang dilakukan Kementerian Kominfo menghentikan pergerakan judi *online* di Indonesia telah menghasilkan dampak signifikan.

"Seperti yang Pak Menteri sampaikan ada penurunan yang cukup signifikan dari uang yang bisa diselamatkan," tandasnya.



Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan 11 Asosiasi

Pada akhir Agustus 2024 lalu, dukungan secara serentak oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan 11 Asosiasi dan Perhimpunan Sistem Pembayaran Nasional melakukan deklarasi dan penandatanganan Pakta Integritas dukung pemberantasan judi *online* pada Rabu (28/8/2024). Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam momentum itu menegaskan pakta integritas dan deklarasi itu merupakan dua terobosan kebijakan dalam pemberantasan judi *online* di Indonesia. Menteri Budi Arie juga optimis kedua terobosan tersebut dapat mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas dalam menutup celah transaksi dan aktivitas yang berkaitan dengan judi *online*.

“Optimisme tersebut cukup mendasar, mengingat data PPATK menunjukkan bahwa terobosan-terobosan yang selama ini dilakukan oleh Kominfo bersama dengan kementerian dan lembaga lain maupun ekosistem telah membuahkan hasil,” jelasnya.

Adapun 11 asosiasi dan perhimpunan tersebut terdiri dari:

- Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
- Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO)

- Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)
- Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
- Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)
- Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS)
- Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO)
- Perhimpunan Bank-bank Internasional Indonesia (PERBINA)
- Asosiasi Payment Gateway Indonesia Himpunan Bank Negara (HIMBARA).

Selain organisasi dan komunitas yang disebutkan di atas, Menkominfo Budi Arie masih terus menerima dukungan dan apresiasi yang datang dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie menilai banyaknya dukungan itu menjadi kekuatan bagi Kementerian Kominfo untuk terus memerangi perjudian *online* di Indonesia. Terlebih dari itu, upaya pemberantasan judi *online* telah menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Juli 2024, terdapat penurunan akses masyarakat terhadap situs judi *online* sebanyak 50% dan penurunan jumlah deposit masyarakat pada situs judi *online* menjadi Rp34,49 Triliun.

Teken Pakta Integritas, Sivitas Kominfo Tolak Judi Online

Kementerian Komunikasi dan Informatika terus berupaya melakukan pemberantasan judi *online* baik melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, pemblokiran konten judi *online*, pembentukan Satgas judi *online* hingga penandatanganan pakta integritas sivitas Kementerian Kominfo menolak judi *online*. Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba menyatakan komitmen sivitas Kementerian Kominfo menolak judi *online* diawali dengan penandatanganan pakta integritas.

“Pada intinya, pakta integritas ini merupakan bentuk penolakan kita, segenap sivitas Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo, terhadap segala bentuk perjudian, termasuk judi *online* dan/atau judi slot,” tegasnya dalam Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Aktivitas Perjudian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo di Press Room, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (16/07/2024).

Sesuai Keputusan Menteri Kominfo Nomor 313 Tahun 2024 tentang Tim Penanganan Judi *Online* dan/atau Judi Slot di Lingkungan Kementerian Kominfo, Setjen Kementerian Kominfo berupaya menerapkan pencegahan aktivitas perjudian. Penandatanganan pakta integritas merupakan tindak lanjut Instruksi Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi *Online* dan/atau Judi Slot. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama bertugas mengawasi lingkungan kerja masing-masing agar terbebas dari aktivitas perjudian. Selain meningkatkan pengawasan, Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo juga menyediakan layanan konseling bagi sivitas yang terjerat judi *online* serta melakukan pembinaan tentang moral dan etika kerja.

Sekjen Mira menegaskan, pakta integritas merupakan bentuk komitmen nyata sivitas untuk tidak melakukan, mengajak, menyebarkan informasi, memfasilitasi, mempromosikan, serta berkomitmen untuk tidak terhubung ataupun terafiliasi dengan hal-hal maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan segala bentuk perjudian, termasuk judi *online* dan/atau judi slot. Untuk itu, ia meminta seluruh sivitas untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh komitmen yang ditandatangani dalam pakta integritas. Bahkan, jika ada yang bermain judi *online* akan dikenakan sanksi tegas.

“Pakta integritas ini kita tanda tangani hari ini adalah serius, ini akan memperkuat basis bila kemudian hari ada yang masih bermain judi *online*, Kementerian tidak akan segan atau ragu untuk memproses,” tegasnya.





”

Pakta integritas ini kita tanda tangani hari ini adalah serius, ini akan memperkuat basis bila kemudian hari ada yang masih bermain judi *online*, Kementerian tidak akan segan atau ragu untuk memproses.





Energi dan Semangat Baru Perkuat Manajemen dan Kepemimpinan Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika baru saja menerima Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (19/8/2024). Di hari yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi melantik tiga orang Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Madya di lingkungan Kementerian Kominfo, yaitu Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Prabunindya Revta Revolusi, Staf Ahli Bidang Hukum, Robinson Hasoloan Sinaga, serta Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa, Molly Prabawaty di Kantor Kementerian Kominfo. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, bergabungnya Wakil Menteri

Komunikasi Angga Raka Prabowo membawa energi baru untuk memperkuat tim di lingkungan Kementerian Kominfo.

“Bergabungnya Pak Wamen Angga tentu membawa energi dan semangat baru untuk memperkuat tim kerja di lingkungan Kementerian Kominfo. Pak Nezar (Nezar Patria, Wamenkominfo) tidak lagi sendirian, tapi sekarang bisa tandem dengan Pak Angga. Ini harus membuat kita semua lebih lincah, lebih gesit, dalam menuntaskan agenda-agenda prioritas Kementerian,” ujarnya.



Perkuat Manajemen dan Kepemimpinan Kominfo

Sementara itu, terkait dengan pelantikan tiga pimpinan madya, Menteri Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat manajemen dan kepemimpinan di Kementerian Kominfo serta optimalisasi kualitas layanan publik di sektor komunikasi dan informatika. Menurutnya, pelantikan ini dimaksudkan untuk memperkuat kinerja kementerian dalam mengelola berbagai program dan kebijakan strategis, terutama di tengah upaya percepatan transformasi digital nasional. Momentum ini selaras dengan prioritas Kementerian Kominfo untuk menuntaskan berbagai target kinerja pembangunan di sektor komunikasi dan informatika.

"Penyambutan Wakil Menteri dan Pelantikan Pejabat Tinggi Madya ini adalah momentum penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang prima dan optimalisasi kualitas layanan publik di sektor komunikasi dan informatika," ujar Menkominfo.

Untuk itu, Menteri Budi Arie, menegaskan agar para pejabat yang baru dilantik harus fokus menyelesaikan target capaian kinerja kementerian untuk periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Oktober mendatang. Ia juga menginstruksikan agar para pejabat ikut memberikan kontribusi pemikiran dan aksi strategis untuk kebijakan dan program kerja yang tertuang dalam RPJPN 2025-2045 serta RPJMN 2025-2029.

"Periode Pemerintahan 2019-2024 akan segera berakhir, sehingga perlu percepatan dan penuntasan target capaian kinerja pemerintah. Beberapa Program Prioritas wajib diselesaikan secara optimal, termasuk komunikasi publik capaian 10 tahun pemerintahan, perbaikan arsitektur dan tata kelola Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) dan penuntasan pembangunan PDN, penyelesaian berbagai regulasi termasuk aturan turunan Undang-Undang PDP, percepatan pemberantasan judi *online*, adopsi teknologi AI untuk pelayanan publik, dan sederet pekerjaan rumah lainnya. Saya minta semua Pejabat di lingkungan Kominfo memiliki *sense of urgency*. Jadi tidak bisa lagi berlambat-lambat," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa soliditas seluruh elemen dalam Kominfo diperlukan, mengingat urgensi percepatan program prioritas nasional. Menurutnya, menjelang akhir masa pemerintahan dan menyambut transisi pemerintahan baru, seluruh elemen Kominfo perlu sigap untuk mencapai tujuan bersama.

"Sinergi antar elemen menjadi modal penting bagi Kominfo agar dapat melaksanakan program kerja secara efektif dan efisien," tambahnya.

Tidak lupa juga ia menyampaikan optimismenya terhadap kinerja para pejabat yang baru dilantik untuk memperkuat misi Kominfo dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

"Saya menaruh harapan dan optimisme yang besar bahwa bergabungnya Pak Wamen Angga, Pak Dirjen Prabu, Bu Sahli Molly, dan Pak Sahli Robinson mampu menggelorakan semangat, layaknya api nan tak kunjung padam. Mari kita kerja dengan hati, ini ungkapan cinta kita pada Ibu Pertiwi. Kita curahkan waktu, tenaga, dan dedikasi demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Mengabdikan dengan Karya Terbaik, Dua ASN Kominfo Terima Penghargaan



Gelaran acara ASN Talent Fest2024 dan Anugerah ASN 2023 menjadi momentum yang sangat berharga bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam moment ini, dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Kominfo mendapat penghargaan sebagai ASN Terbaik 2023. Mereka adalah Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail, dan Dosen pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Siti Chotijah. Usai menerima penghargaan, Dirjen Ismail berharap ajang Anugerah ASN dapat terus berlanjut karena dapat memberikan motivasi bagi ASN di seluruh Indonesia.

“Untuk memberikan pengabdian dan karya-karya yang terbaik buat bangsa dan negara,” ungkapnya usai menerima penghargaan di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat, Selasa (27/08/2024).

Dalam ajang tersebut, Dirjen Ismail menerima penghargaan kategori Pimpinan Tinggi Madya terbaik kedua dengan inovasi Inisiator Sistem Pendaftaran IMEI Terpusat. Menurutnya, sistem itu memiliki arti penting dalam mencegah kebocoran keuangan terutama pajak dan ketertiban data pengguna perangkat telekomunikasi. "Alhamdulillah saat ini sudah cukup tertib sehingga bisa mencegah terjadinya kebocoran, kerugian keuangan negara akibat banyaknya perangkat ilegal masuk ke wilayah Indonesia tanpa membayar pajak dan bea cukai," jelasnya.

Menurut Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, penghargaan bukan tujuan, namun menjadi momentum untuk mewujudkan karya nyata dari pengabdian yang berguna bagi masyarakat. "Penghargaan dan sebagainya ini hanyalah sebuah momentum dalam kehidupan kita. Yang lebih penting lagi hasil karya kita ini bisa dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tandasnya. Ia pun menilai penghargaan ini merupakan hasil dukungan dan kolaborasi banyak pihak, seperti kementerian, lembaga, operator, industri, dan vendor. "Inovasi sistem ini kami bangun bersama dengan Kementerian Perindustrian dengan teman-teman operator telekomunikasi," tuturnya.

Untuk itu ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamenkominfo Nezar Patria dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Menurutnya, dengan arahan pimpinan di Kementerian Kominfo, semua tugas yang dipercayakan dapat dijalankan dengan baik. Terutama, Program Prioritas Pemerintah di bidang digitalisasi, infrastruktur digital dan pemanfaatan infrastruktur digital untuk menyejahterakan masyarakat. "Ini juga buat industri dan digitalisasi di Indonesia yang harus terus berlanjut menjadi dasar bagi pembangunan ke depan," ujarnya.

Selain itu, Dirjen Ismail juga mendorong ASN di Kementerian Kominfo terus bekerja keras dalam mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. "Saya berharap rekan-rekan terutama adik-adik generasi muda ASN dan Non-ASN di Kementerian Kominfo untuk kiranya terus bekerja keras, berdedikasi menjaga integritas dan berkarya untuk bangsa dan negara secara ikhlas," ungkapnya.



Sementara itu, Dosen pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta Siti Chotijah menerima penghargaan atas inovasi Pengembangan Komunitas Genpi Indonesia. Siti Chotijah berharap penghargaan ini dapat memberi inspirasi bagi dosen untuk terus berkarya dan berkolaborasi meningkatkan literasi digital di Indonesia. "Karena pada dasarnya memang kita juga berkolaborasi pentaheliks, dengan komunitas, pemerintah lalu dengan berbagai media untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia," jelasnya.

Ia menilai semua upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi digital nasional agar SDM di Indonesia dapat mengoptimalkan ekonomi digital. Menurutnya, inovasi ini bisa menjadi salah satu program yang terus didukung oleh Kominfo. Untuk itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan di Kementerian Kominfo, terutama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan STMM Yogyakarta. "Saya mengucapkan terimakasih. Kami sangat bersyukur untuk anugerah yang kita dapatkan pada hari ini," ungkapnya.



PRESS CONFERENCE

Sunday, 1 September 2024



Jadi Ajang Perkuat Kolaborasi, Pemerintah Ajak Seluruh Elemen Sukseskan HLF-MSP dan IAF

Pemerintah Indonesia mengajak seluruh elemen bangsa berpartisipasi aktif menyukseskan gelaran High Level Forum Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 yang berlangsung pada 1 s.d. 3 September 2024 di Bali.

Dukungan dari seluruh elemen bangsa sangat diperlukan, karena kedua forum ini menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk memperkuat

kolaborasi lintas sektor dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

HLF-MSP dan IAF merupakan platform strategis yang bertujuan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Tema tahun ini,

“Strengthening Multi-Stakeholder Partnerships for Development: Towards a Transformative Change,” mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong dialog kebijakan dan memperkuat komitmen global terhadap pembangunan berkelanjutan.

Dengan lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari kepala negara, pejabat tinggi, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, filantropi, dan akademisi, forum ini tidak hanya menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan dalam diplomasi global tetapi juga untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Afrika.

Oleh karena itu, partisipasi seluruh masyarakat sangat penting untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan forum ini. Keberhasilan penyelenggaraan forum internasional ini tidak hanya menjadi refleksi citra Indonesia di mata dunia, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam memajukan pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama global.

Dengan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat, Indonesia berharap dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam diplomasi global dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan hubungan internasional yang dinamis dan saling menguntungkan.

Dukungan Kominfo dan Apresiasi Peran Jurnalis

Menyambut penyelenggaraan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership (HLF MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024, Kementerian Kominfo telah mempersiapkan berbagai fasilitas, termasuk media center bagi jurnalis.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2024, Kementerian Kominfo bertanggung jawab atas komunikasi dan media untuk HLF MSP dan IAF 2024. Lewat *media center*, Kominfo memfasilitasi penyebaran informasi selama acara berlangsung.

Fasilitas yang disiapkan di *Media Center* termasuk workstation dengan koneksi internet optimal dari Telkom Indonesia, serta berbagai fasilitas tambahan seperti *video village*, ruang konferensi pers, dan layanan informasi melalui siaran pers.

Media Center ini dirancang untuk menampung hingga 500 jurnalis dan dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan kapasitas *bandwidth* yang memadai, didukung oleh empat provider terpercaya untuk memastikan kecepatan internet yang optimal. Selain itu, terdapat layanan *hospitality* seperti snack dan minuman. Targetnya adalah agar jurnalis dapat bekerja dengan nyaman dan aman.

Infrastruktur telekomunikasi di media center telah dipersiapkan dengan dukungan Telkom Indonesia untuk memastikan koneksi optimal. Selain itu, protokol keamanan jaringan secara



ketat diterapkan dengan dukungan Badan Siber dan Sandi Negara, termasuk antisipasi terhadap potensi gangguan sinyal dan serangan siber.

Di sisi lain, Kominfo juga meng-*upgrade* jaringan data guna menjamin kelancaran komunikasi jurnalis. Kami memastikan semua alat komunikasi, baik elektronik maupun non-elektronik, berfungsi tanpa gangguan.

Menkominfo menyatakan penyediaan infrastruktur dan layanan digital andal ini untuk menyukseskan rangkaian High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 Tahun 2024. Menurutnya, infrastruktur digital yang optimal menjadi komitmen bersama agar forum internasional itu berjalan lancar.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Telkom Indonesia telah menyiapkan infrastruktur jaringan telekomunikasi dengan kapasitas *bandwidth* total sebesar 20.000 Gbps di lima venue utama acara ini," ungkapnya saat meninjau *Media Center* HLF-MSP dan IAF ke-2 Tahun 2024 di Pecatu Hall, Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Minggu (01/09/2024).

Kelima venue utama itu antara lain Nusa Dua Beach Hotel, Intercontinental Resort Jimbaran, Hotel Mulia Resort Nusa Dua, Bali Nusa Dua Convention Centre, dan Bali International Convention Centre. "Kesiapan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kelancaran acara dengan optimal," ujar Menteri Budi Arie.



Kementerian Kominfo bersama Telkom Indonesia mengatur layanan *dedicated* internet untuk beberapa titik strategis yang digunakan pegawai Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasukan Pengamanan Presiden seperti di Hotel Santika, BNDCC 2, dan Bandara VVIP.

Menkominfo mengapresiasi dukungan Telkom Indonesia dengan menghadirkan infrastruktur dan talenta digital terbaik. Menurutnya Telkom Indonesia melakukan pengawalan kualitas layanan agar bisa menghadirkan pengalaman dan kesan baik bagi jurnalis dari semua negara peserta.

"Kominfo berterima kasih kepada Telkom Group atas dukungan yang telah diberikan. Keberhasilan acara ini menunjukkan Indonesia mampu menyelenggarakan event internasional dengan infrastruktur telekomunikasi yang mumpuni, tentunya akan memperkuat reputasi Indonesia makin mendunia di tingkat global," jelasnya.

Untuk kecepatan internet di *media center*, Menteri Budi Arie menjelaskan telah disiapkan sebesar 3,6 Gbps. *Media center* juga dilengkapi dengan 48 *access point* LAN dan 7 *access point* (AP) terhubung melalui perangkat yang terpasang di meja. "Dengan persiapan ini, kami yakin tidak akan ada gangguan jaringan internet selama acara berlangsung," ujar Menteri Budi Arie.

Dalam kunjungannya ke *media center* yang dimulai pukul 16.00 WITA, Menkominfo didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Prabunindya Revta Revolusi. Menteri Budi Arie berkeliling untuk memeriksa infrastruktur yang telah disiapkan dan menyapa para jurnalis yang sedang bertugas dari dalam dan luar negeri.

"Kami berharap *media center* ini dapat memfasilitasi penyebaran informasi dengan cepat dan akurat, memberikan dampak positif bagi masyarakat. *Media center* ini dirancang untuk memberikan akses yang terverifikasi dan cepat bagi semua jurnalis yang hadir," ungkapnya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi memberikan apresiasi kepada para jurnalis dan menekankan

peran media dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berkualitas tentang forum ini.

“HLF-MSP dan IAF diharapkan akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan dan perdamaian dunia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global,” ungkapnya.

Menkominfo menjelaskan sebanyak 125 media dari dalam dan luar negeri telah terdaftar untuk meliput acara ini, dengan jumlah total jurnalis mencapai 486 orang. “Kehadiran jurnalis dari berbagai belahan dunia ini menunjukkan betapa besar perhatian global terhadap forum yang diadakan di Indonesia,” tambahnya.



Eksplorasi Peluang Kolaborasi Sektor Digital

Dalam rangkaian acara, Pemerintah Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Mesir untuk membahas potensi kerja sama dalam sektor digitalisasi. Menkominfo Budi Arie Setiadi dan Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Mesir Amr Talaat, mengeksplorasi peluang kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas generasi muda di sektor teknologi informasi dan komunikasi.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan pertemuan bilateral ini merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan mengembangkan kerja sama strategis dalam bidang teknologi dan digitalisasi. “Kami akan berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam transformasi digital serta menjajaki peluang untuk pengembangan konektivitas jaringan 5G dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.

Menkominfo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan bersama dalam forum internasional,

sejalan dengan semangat persahabatan dan kerja sama yang telah diwariskan oleh pemimpin bangsa terdahulu. “Presiden Jokowi telah berhasil membangun hubungan yang erat dengan banyak negara, termasuk negara-negara di benua Afrika,” tambahnya.

Menkominfo berharap HLF-MSP dan IAF memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan global dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. “Ini adalah langkah penting dalam perjalanan panjang Indonesia untuk berkontribusi pada kesejahteraan global dan mencapai tujuan bersama yang lebih besar,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menkominfo Budi Arie Setiadi yang didampingi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Prabunindya Revta Revolusi, menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi tuan rumah berbagai acara internasional dalam satu dekade terakhir. “Kami berharap HLF-MSP dan IAF ke-2 ini akan

meninggalkan kesan mendalam dan positif, sejalan dengan jejak sejarah panjang yang kita miliki," ujarnya.

Sebagai penggagas Konferensi Asia-Afrika tahun 1955, Indonesia memiliki sejarah yang kuat dalam mendukung kemerdekaan dan pembangunan negara-negara Afrika. Forum seperti HLF-MSP dan IAF menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam memfasilitasi dialog global yang membangun dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang.

Sehari kemudian, Senin (02/09/2024), masih berlokasi di tempat sama, Menkominfo Budi Arie Setiadi membahas potensi kerja sama pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas generasi muda di sektor teknologi informasi dan komunikasi bersama Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Mesir Amr Talaat.

"Pertemuan bilateral hari ini bertujuan mengeksplorasi potensi kerja sama dalam pengembangan infrastruktur digital dan

peningkatan kapasitas generasi muda di kedua negara," jelasnya.

Menteri Budi Arie mengungkap berbagai upaya dan capaian Indonesia dalam pembangunan infrastruktur digital dengan cakupan hampir 98 persen populasi nasional. "Saat ini telah dibangun Kabel Fiber Optik sepanjang 177.000 Kilometer, 34 Pusat Data, serta 265.900 Base Transceiver Station (BTS) termasuk 1.000 BTS 5G," tuturnya.

Menkominfo menyatakan ada kesamaan kebijakan dan pengelolaan isu teknologi informasi dan komunikasi di Mesir yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. "Kebijakan TIK di Mesir yang terfokus pada tiga pilar utama yaitu transformasi digital, kecakapan dan pekerjaan digital, serta inovasi digital," ungkapnya.

Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung sekitar 30 menit itu, Menteri Budi Arie juga menawarkan peluang kerja sama pengembangan konektivitas jaringan 5G dan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).



Komitmen Mesir Perluas Kerja Sama

Sementara itu, Menteri TIK Mesir Amr Talaat menyampaikan apresiasi dari Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi atas sambutan hangat Pemerintah Indonesia. Menurutnya, hubungan strategis dan historis yang telah berlangsung antara Mesir dan Indonesia.

“Mesir adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan hubungan ini telah berkembang secara signifikan,” tandasnya.

Menteri Talaat mengungkapkan komitmen Mesir untuk memperluas kerja sama, khususnya dalam pengembangan kabel bawah laut dan pelatihan kapasitas sumberdaya manusia digital. “Mesir menawarkan peluang untuk meningkatkan konektivitas digital melalui kabel bawah laut. Kami mengundang generasi muda Indonesia untuk merasakan manfaat dari program pelatihan yang kami laksanakan,” ungkapnya.

Menteri TIK Mesir menekankan tekad untuk memperkuat dan memperluas hubungan bilateral dengan Indonesia. “Kolaborasi yang dibangun dalam pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Indonesia dan Mesir serta mendorong kemajuan di sektor digital kedua negara,” tandasnya.

Dalam pertemuan bilateral Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Prabunindya Revta Revolusi, Sekretaris Ditjen IKP Mediodecci Lustrini, Direktur Tata Kelola Kemitraan Komunikasi Publik Ditjen IKP Hasyim Gautama dan Direktur Informasi dan Komunikasi Politik Hukum dan HAM Ditjen IKP Marroli J. Indarto. Sedangkan Menteri TIK Mesir Amr Talaat didampingi Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Elshemy, Asisten Menteri untuk Strategi dan Implementasi TIK Shereen Ahmed Awad Elguindy, dan Direktur Relasi Internasional Samah (Atia) Aziz.

Kementerian Kominfo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan HLF-MSP dan IAF ke-2 ini sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan dunia yang lebih sejahtera dan damai. Dukungan dari seluruh masyarakat, termasuk



media, sangat penting untuk memastikan informasi yang akurat dan berkualitas dapat tersebar luas ke seluruh dunia.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan yang kuat, Indonesia sukses menyelenggarakan HLF-MSP dan IAF 2024. Forum ini menjadi contoh nyata dari diplomasi global yang berfokus pada pembangunan dan kerja sama internasional. Dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk media, sangat penting untuk memastikan informasi yang akurat dan berkualitas dapat tersebar luas ke seluruh dunia.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, Indonesia berharap dapat memperkuat perannya di kancah internasional dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara di seluruh dunia. HLF-MSP dan IAF 2024 adalah langkah penting dalam perjalanan panjang Indonesia untuk berkontribusi pada kesejahteraan global dan mencapai tujuan bersama yang lebih besar.



Siapkan Kualitas Jaringan Andal, Gerak Cepat Kominfo Sambut HUT Ke-79 RI di IKN

Demi kelancaran jaringan komunikasi saat upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan infrastruktur serta layanan telekomunikasi yang memadai. Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Dany Suwardany menyatakan hal itu dibutuhkan guna menunjang konektivitas agar seluruh peserta upacara dapat menikmati layanan telekomunikasi yang lancar dan stabil.

“Akhir Juli 2024, Kementerian Kominfo melalui Tim Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran (PMT) melakukan pemantauan kualitas layanan telekomunikasi (Quality of Service) yang lancar dan stabil saat upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara,” ujarnya melalui keterangan tertulis, di Jakarta Pusat, Selasa (13/08/2024).



Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI Kominfo Dany Suwardany menyatakan kegiatan ini sejalan dengan Surat Edaran dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor B-04 /M/S/TU.00.03/07/2024 mengenai Pedoman Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI Tahun 2024.

“Kegiatan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024 akan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara IKN. Jadi, untuk mendukung hal itu Kementerian Kominfo melakukan pengukuran QoS dilakukan dengan dua metode yaitu statis test dan *drive test*,” jelasnya.

Direktur Dany menjelaskan statis test merupakan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan jaringan bergerak seluler secara tetap di titik-titik yang ditentukan.

“Pengukuran kualitas jaringan operator seluler dilakukan dengan metode *static test* pada satu kota atau kabupaten yang berfokus di pusat pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, pemukiman, dan point of interest lain yang diperlukan,” tuturnya.

Pengukuran statis test di IKN dilakukan di Lapangan Upacara Istana Negara, Kantor Presiden IKN, Kementerian Sekretaris Negara, Kemenko, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Rusun ASN, Hunian Pekerja Kontruksi, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit IKN, Rest Area IKN, dan Memorial Park.

“Dari hasil keseluruhan pengukuran menunjukkan kualitas layanan telekomunikasi dengan hasil yang baik di semua lokasi. Khususnya, di Rusun ASN memiliki hasil pengukuran tertinggi dengan rata-rata kecepatan *download* sebesar 216.25 Mbps dan rata-rata kecepatan *upload* sebesar 81.8 Mbps,” jelas Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI Kominfo Dany Suwardany.

Sedangkan *drive test*, kata Dany, yaitu metode pengambilan pengukuran parameter standar kualitas layanan penyelenggaraan bergerak seluler di satu area kota atau kabupaten dengan menggunakan kendaraan roda empat atau kendaraan umum lainnya mengikuti rute yang telah ditetapkan.

Direktur Pengendalian Pos dan Informatika Ditjen PPI Kominfo Dany Suwardany menjelaskan, pengukuran *drive test* dilakukan untuk mengetahui

kondisi titik *bad spot* di tiap area yang dilewati. Drive test dilakukan dari Kota Balikpapan menuju IKN dan di kawasan inti IKN.

“Dari Kota Balikpapan menuju IKN, ditemukan hasil tertinggi dengan rata-rata kecepatan *download* sebesar 87.44 dan rata-rata kecepatan *upload* sebesar 17.96, sementara di Kawasan inti IKN ditemukan hasil tertinggi dengan rata-rata kecepatan *download* sebesar 104.97 Mbps dan rata-rata kecepatan *upload* sebesar 26.91 Mbps,” jelasnya.

Selain melakukan pemantauan QoS telekomunikasi, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melalui Pusat Monitoring Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran Kementerian Kominfo juga melakukan verifikasi lapangan infrastruktur jaringan bergerak seluler yang telah dibangun oleh operator seluler

“Jadi tak hanya QoS, Kementerian Kominfo juga melakukan verifikasi dan validasi lapangan infrastruktur jaringan bergerak seluler atau tower Base Transceiver Station yang telah dibangun oleh operator seluler di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk memastikan konektivitas di Ibu Kota Nusantara, Direktur Dany menyatakan operator seluler telah membangun dan menyediakan infrastruktur bergerak seluler, seperti tower BTS permanen, tower pole kamuflase, maupun infrastruktur sementara mobile BTS di lokasi acara upacara IKN dan telah melaporkan data spasial infrastruktur tersebut kepada PMT.

“Oleh karena itu, tim PMT perlu melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap data infrastruktur jaringan bergerak seluler yang telah dibangun oleh operator seluler di IKN,” ujarnya.

Dari hasil uji jaringan bergerak seluler, terdapat 40 tower BTS jaringan bergerak seluler yang lokasinya telah sesuai dengan data spasial yang disampaikan oleh operator seluler.

“Diantaranya terdapat 3 BTS Macrocell, 17 BTS Microcell dan 20 Compact Mobile BTS (COMBAT),” ungkap Direktur Dany.

Dengan dilaksanakannya pemantauan kualitas layanan telekomunikasi dan verifikasi lapangan terhadap infrastruktur jaringan bergerak seluler di Ibu Kota Nusantara (IKN), PMT dapat memastikan kesiapan operator seluler dalam menjaga kualitas layanan telekomunikasi dalam rangka peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

Sebagai langkah lanjutan, hasil pengukuran QoS telekomunikasi yang kurang baik, PMT telah menyampaikan hasilnya kepada operator seluler untuk dianalisa dan dilakukan perbaikan.

Setelah itu, tim PMT akan melakukan monitoring kembali pasca dilakukan perbaikan oleh operator seluler. Dengan demikian, diharapkan tetap terjaganya kualitas layanan telekomunikasi yang lancar dan stabil selama kegiatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI.





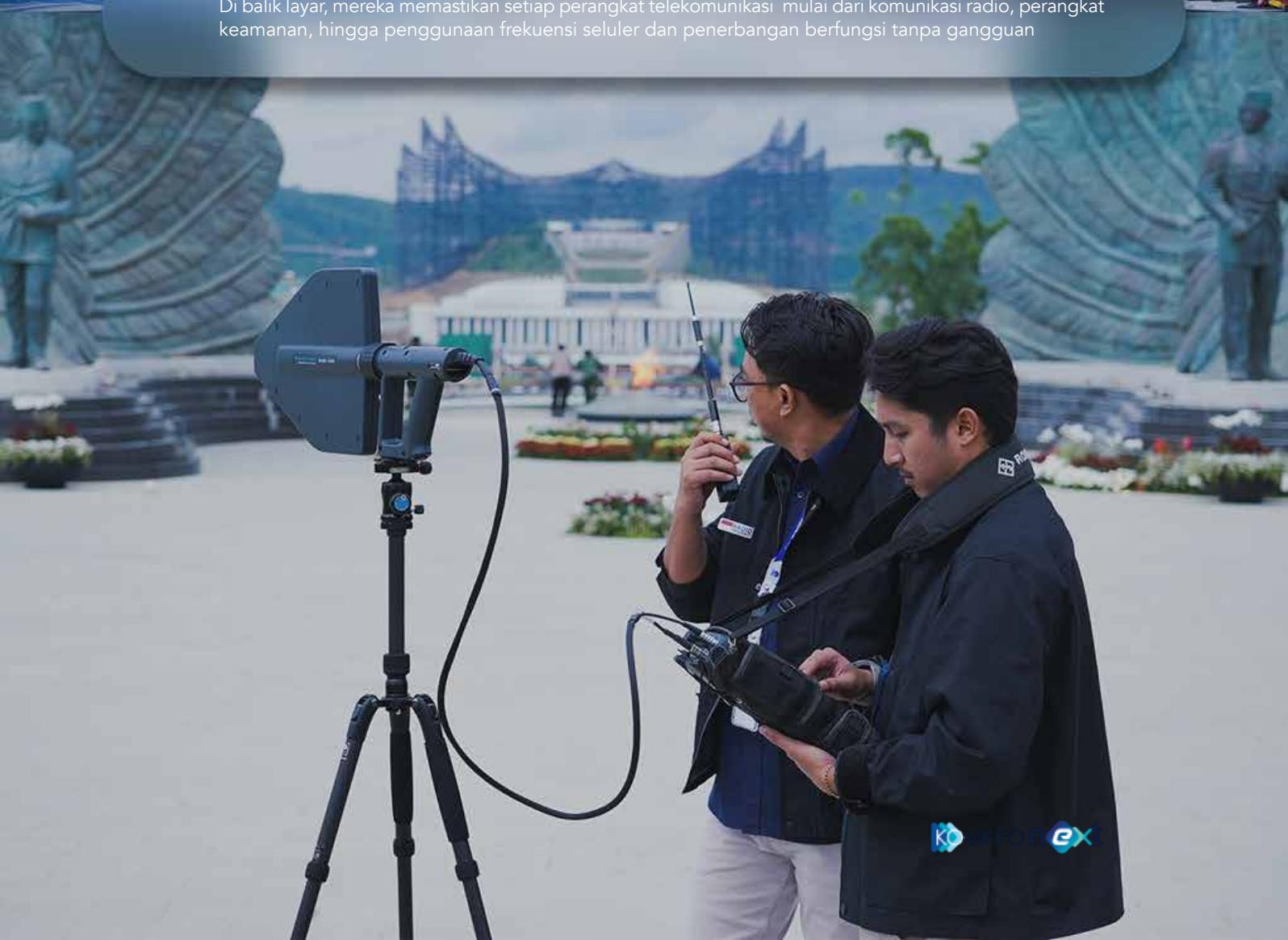
Jaga Frekuensi Ibu Kota Nusantara

Selama Gelaran HUT Ke-79 RI

Di tengah persiapan perayaan HUT Ke-79 Republik Indonesia, Tim Monitoring Ditjen SDPPI Kementerian Kominfo beraksi di Ibu Kota Nusantara. Selama tiga hari, dari 15 hingga 17 Agustus 2024, tim bekerja keras di empat titik strategis IKN untuk memastikan kelancaran dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio selama upacara.

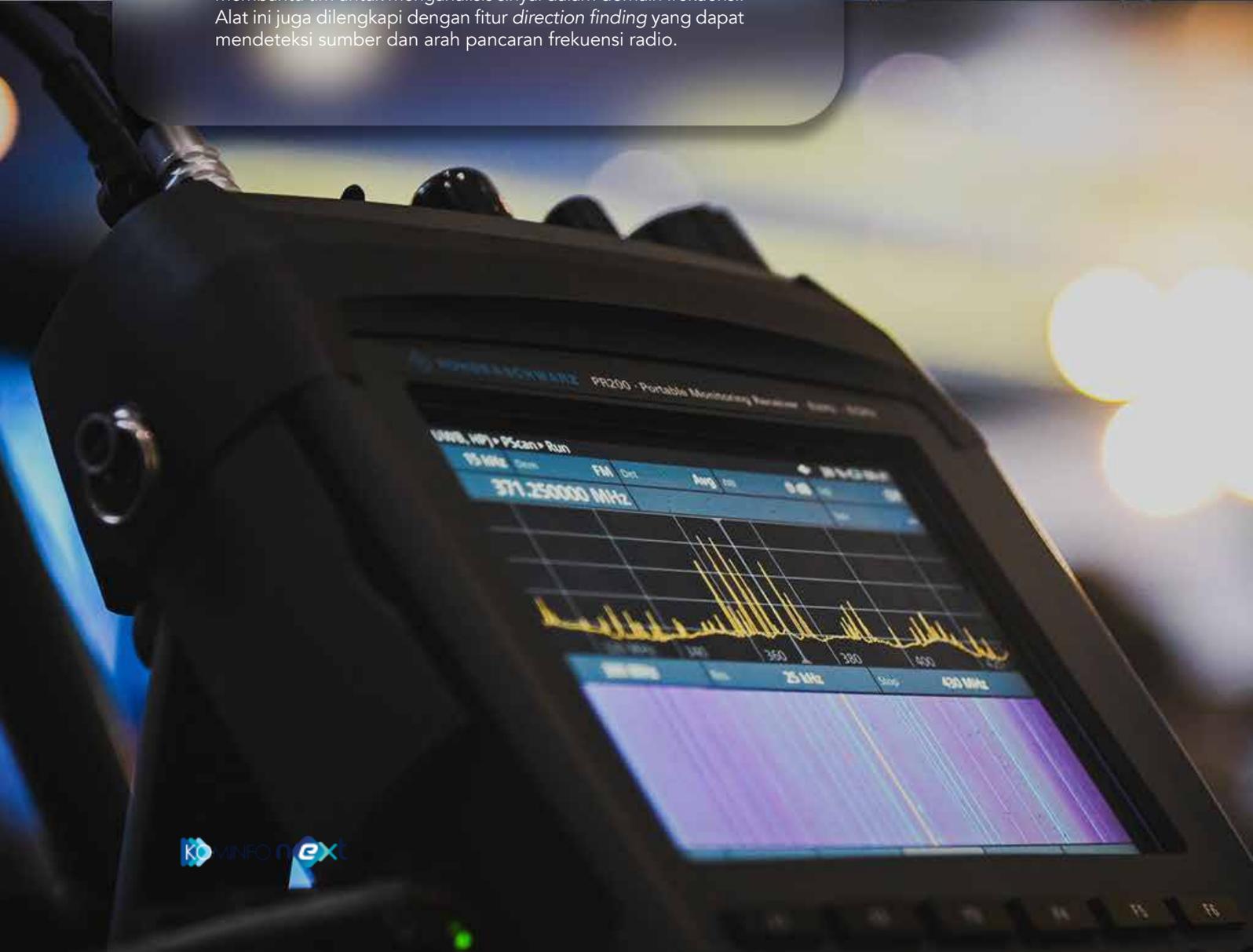


Di balik layar, mereka memastikan setiap perangkat telekomunikasi mulai dari komunikasi radio, perangkat keamanan, hingga penggunaan frekuensi seluler dan penerbangan berfungsi tanpa gangguan





Menggunakan alat *Spectrum Analyzer*, tim memantau setiap gelombang frekuensi, memastikan tidak ada interferensi yang dapat mengganggu jalannya upacara. *Spectrum Analyzer* membantu tim untuk menganalisis sinyal dalam domain frekuensi. Alat ini juga dilengkapi dengan fitur *direction finding* yang dapat mendeteksi sumber dan arah pancaran frekuensi radio.





Kolaborasi antar Direktorat Pengendalian SDPPI, Balai Monitor SFR Kelas I Samarinda, serta Balai Monitor Kelas II Pontianak, Manado, dan Lampung, menjadi kunci sukses operasi ini. Kerja keras berbuah manis. Perayaan HUT Ke-79 RI berjalan lancar dan bebas dari gangguan frekuensi.



Anugerah Jurnalistik Kominfo 2024

Dampak dan Tantangan Judi *Online* di Era Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik Kominfo (AJK) Tahun 2024 dengan tema "Dampak dan Tantangan Judi *Online* di Era Digital". Acara yang diselenggarakan untuk ketujuh kalinya ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif judi *online*, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya regulasi dan penegakan hukum terkait judi *online*, dan mendorong jurnalis untuk menghasilkan karya jurnalistik yang mendalam dan informatif mengenai dampak negatif judi *online*.

Judi *online* telah menjadi fenomena global yang merambah ke berbagai kalangan masyarakat. Dengan akses internet yang semakin luas dan perangkat *mobile* yang mudah diakses, perjudian dalam bentuk daring telah menjadi pilihan bagi banyak orang. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat banyak dampak negatif yang mengintai, termasuk masalah finansial, kesehatan mental, dan perubahan dinamika sosial.

Sepanjang 17 Juli 2023 sampai dengan 23 Juli 2024, Kementerian Kominfo sudah melakukan

take down sebanyak 2.645.081 konten judi *online*. Kementerian Kominfo juga bekerjasama dengan *stakeholder* terkait melakukan pemblokiran rekening dan *e-wallet* terafiliasi judi *online*. Sebanyak 5.779 rekening sudah diajukan ke OJK dan 573 akun *e-wallet* terkait judi *online* kepada Bank Indonesia.

"Maraknya judi *online* telah terbukti merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Terbukti dari banyaknya kasus yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara", ucap Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam launching Anugerah Jurnalistik Kominfo secara daring.

Tema ini diangkat karena melihat fenomena judi *online* selain merusak tatanan kehidupan masyarakat, juga telah menjadi suatu insiden yang mengancam laju perkembangan transformasi digital nasional. Kementerian Kominfo telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan judi *online*, dimulai dari pemblokiran jutaan situs/konten hingga penindakan tegas kepada pihak-pihak yang memfasilitasi permainan judi *online*.

Sejalan dengan hal tersebut, Wamenkominfo Nezar Patria berharap melalui AJK 2024, para jurnalis ikut memberitakan bahaya, dampak, dan resiko judi *online*. "Yang paling penting adalah judi *online* menghambat visi besar kita mewujudkan transformasi digital di semua sektor kehidupan masyarakat", lanjut Wamenkominfo.

Pendaftaran AJK 2024 dibuka dari tanggal 26 Agustus hingga 09 Oktober 2024 melalui ajk.kominfo.go.id. Jurnalis dari seluruh media, baik cetak, daring, maupun televisi, diundang untuk mengirimkan karya terbaik mereka yang relevan dengan tema. Terdapat lima kategori pada AJK 2024, yaitu Liputan Media Cetak, Liputan Media *Online*, Liputan Televisi, Liputan Radio, dan Foto Jurnalistik.

AJK 2024 dinilai oleh juri yang kompeten dari berbagai bidang jurnalistik. Terdapat 15 juri yang siap menilai secara objektif yaitu:

Liputan Media Cetak

1. Agus Sudibyo (Dewan Pengawas LPP TVRI)
2. Jajang Jamaludin (Corporate Secretary Tempo Media Group)
3. Maria Y. Benyamin (Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia)

Liputan Media *Online*

1. Asep Setiawan (Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers)
2. Maman Suherman (Penulis Buku, Presenter, Konsultan Media & Kreatif)
3. Wisnu Nugroho (Pemimpin Redaksi kompas.com)

Liputan Televisi

1. Kabul Indrawan (Pemimpin Redaksi Diskursus Net)
2. Retno Pinasti (Pemimpin Redaksi SCTV)
3. Titin Rosmasari (Pemimpin Redaksi CNN Indonesia)

Liputan Radio

1. M. Rafiq (Ketua Umum PRSSNI)
2. Rosarita Niken Widiastuti (Widyaiswara Utama Kementerian Kominfo)
3. Soleman Yusuf (Kepala LPP RRI Stasiun Luar Negeri)

Foto Jurnalistik

1. Agus Susanto (Fotografer Harian Kompas)
2. Dita Alangkara (Associated Press (AP) Chief Photographer for Indonesia)
3. Prasetyo Utomo (Kepala Redaksi Foto Antara)

Melalui AJK 2024, diharapkan karya jurnalistik dapat menjadi jembatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif judi *online*. Kementerian Kominfo berharap penghargaan ini akan menginspirasi lebih banyak jurnalis untuk mengangkat isu-isu penting dan relevan, serta menciptakan diskusi yang konstruktif di masyarakat.

AJK 2024 adalah kesempatan bagi jurnalis untuk berkontribusi dalam mengatasi tantangan judi *online* di era digital. Dengan menggali dampak dan tantangan dari fenomena ini, diharapkan jurnalis dapat memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat dan mendorong tindakan yang positif.

Kementerian Kominfo mengajak para jurnalis untuk membantu pemberitaan dalam memberantas judi *online* di Indonesia melalui AJK 2024. Mari bersama-sama mendukung AJK 2024 untuk menciptakan dunia jurnalistik yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab. (meita)



Temu Bisnis P3DN

Langkah Nyata Menuju Kemandirian Industri Lokal

Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Pertanian menggelar Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII di ICE BSD, Tangerang, Banten.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan Temu Bisnis ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan industri melalui peningkatan penggunaan produk lokal. "Melalui sinergi ini, produk lokal dapat tumbuh lebih cepat, baik dari sisi kualitas maupun daya saing. Ini adalah langkah konkret untuk menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan di tengah era digital," ujarnya dalam Temu Bisnis P3DN Tahap VIII di ICE BSD Tangerang, Banten, Selasa (17/09/2024).

Dengan tema "Membangun Ekosistem Ekonomi Digital untuk Produk Lokal", acara ini bertujuan meningkatkan daya saing produk lokal melalui teknologi digital. Menkominfo menegaskan bahwa penguatan industri lokal tidak hanya berdampak pada ekonomi domestik, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. "Kami berharap industri dalam negeri mampu berkontribusi terhadap PDB hingga 30%," tandasnya.

Menteri Budi Arie menjelaskan temu bisnis berkaitan erat dengan salah satu misi Asta Cita Presiden Terpilih Prabowo Subianto, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

"Salah satu fokus yang hendak dicapai adalah mengembangkan hilirisasi untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui, (1) pendalaman potensi hilirisasi dan industrialisasi baru, (2) membangun infrastruktur berkeadilan, (3) pembangunan industri untuk mengurangi ketergantungan impor, (4) melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi di berbagai sektor, serta (5) mengembangkan program-program pembiayaan inovatif (*innovative financing*)," tuurnya.

Temu Bisnis P3DN ini merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk mendorong perkembangan industri dalam negeri. Menurut Menkominfo, beberapa negara telah melakukan hal sama. Seperti Thailand dengan Program Made in Thailand, Malaysia dengan Buy Malaysia, dan Vietnam dengan kampanye Vietnamese People Give Priority to Using Vietnamese Goods. "Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk terus memperkuat industri lokal melalui program P3DN," ujarnya.

Targetkan Belanja Produk Dalam Negeri Rp500 Triliun

Temu Bisnis P3DN Tahap VIII menargetkan komitmen belanja sebesar Rp500 Triliun, dengan realisasi belanja Rp186 triliun.

“Jika hal ini tercapai maka realisasi belanja menjadi lebih dari Rp600 Triliun atau melampaui target komitmen Rp500 Triliun yang direncanakan,” kata Staf Ahli Kementerian Kominfo Bidang Sosial, Ekonomi, & Budaya sekaligus Ketua Teknis Penyelenggaraan Temu Bisnis P3DN Tahap VIII Wijaya Kusumawardhana.

Wijaya menambahkan, komitmen belanja produk lokal terus meningkat sejak 2022 hingga 2024, dengan realisasi mencapai 106% pada 2023. Di 2024, realisasi belanja per 13 September telah mencapai 52%, dengan target minimal 95% dari anggaran belanja. “Komitmen ini penting untuk terus memberikan dampak signifikan bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Menurutnya realisasi belanja PDN Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah telah berdampak

signifikan terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja.

“Oleh karenanya, komitmen belanja PDN harus dilanjutkan dan terus ditingkatkan agar terus memberi dampak ekonomi yang lebih signifikan dan menjadi stimulus bagi pengembangan industri,” kata Wijaya.

Aksi afirmasi belanja PDN dapat mewujudkan manfaat utama bagi pertumbuhan ekonomi lewat stimulus industri dalam negeri. Maka dari itu, sejumlah kunci keberlanjutan aksi afirmasi belanja PDN perlu diakselerasi.

Adapun 6 kunci keberlanjutan aksi afirmasi belanja PDN yakni kewajiban prioritas belanja PDN, kewajiban prioritas belanja UMK- Koperasi, perluasan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transformasi digital pengadaan, akselerasi standarisasi dan integrasi data pengadaan.

“Dan tentu saja penguatan dasar hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik,” ujar Wijaya. (viska)





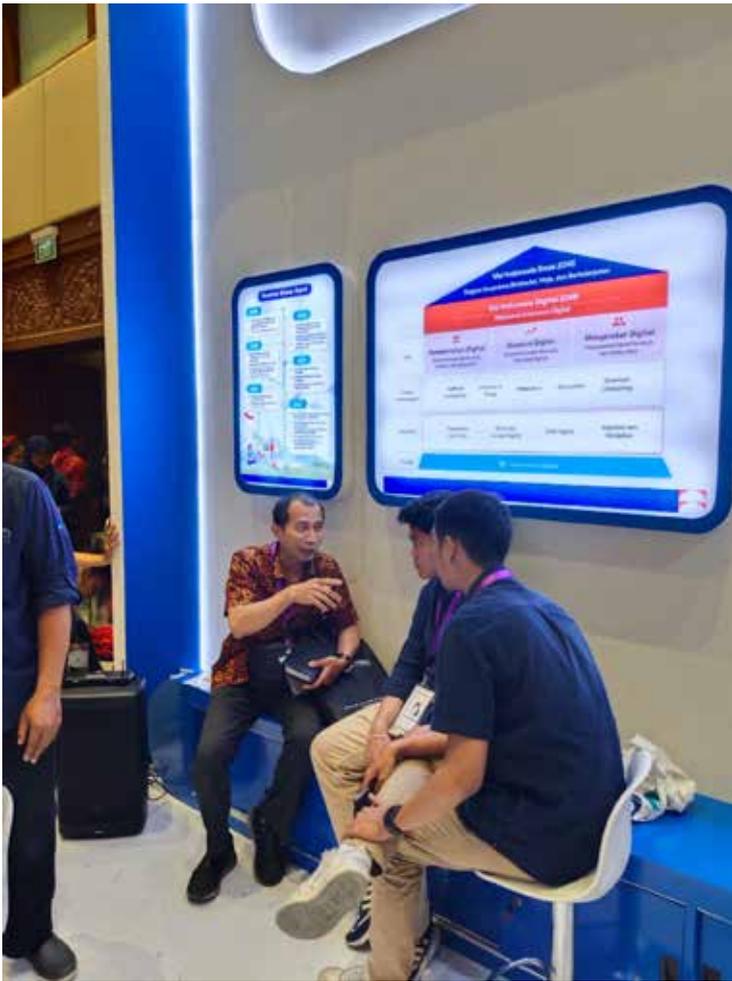
Kunjungan Menkominfo dan Pejabat Tinggi Madya ke Booth Pameran

Partisipasi pada Pameran DTICX 2024, Kominfo Raih Juara 1 Booth Terbaik

Konferensi dan pameran transformasi digital di Indonesia, Digital Transformation Indonesia-Conference & Expo (DTICX) 2024 kembali digelar pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2024 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta. DTICX Conference dan Expo ini menjadi ajang bagi pemimpin industri, penyedia teknologi, dan pemangku kepentingan untuk bertemu, berbagi pengetahuan, dan menemukan solusi digital terbaru untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor industri di Indonesia.

Pameran yang juga sekaligus ajang *business matching* DTICX ini juga turut mendukung perkembangan juga mempercepat proses transformasi digital Indonesia. Pada pameran kali ini booth Kementerian Kominfo selain menayangkan berbagai konten video terkait berbagai program, kebijakan dan kegiatan dari unit kerja, juga menampilkan konten terkait *roadmap* bidang digital mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2023, kedua terkait pilar, *future technologies*, ekosistem dan fondasi dari Visi Indonesia Digital 2045. Terakhir terkait infrastruktur digital, ekonomi digital, masyarakat digital dan pemerintah digital.

Tahun 2024 menjadi tahun ketiga Kementerian Komunikasi dan Informatika berpartisipasi pada Pameran DTICX dan kali ini Kementerian Kominfo berhasil meraih juara pertama booth terbaik pada Pameran Digital Transformation Indonesia-Conference & Expo (DTICX) 2024. Dalam dua hari perhelatan pameran, booth Kementerian Kominfo dikunjungi oleh 316 orang yang terdiri dari Pelaku Bisnis, *Startup*, Akademisi, Instansi Pemerintah, dan Masyarakat Umum. Antusias pengunjung juga terlihat dari banyaknya isu-isu yang ditanyakan mulai dari perizinan, Digitalent dan beasiswa dalam dan luar negeri, pemblokiran, UMKM Go *Online*, Pusat Data Nasional dan PSE lingkup privat dan pemerintah.





Keberhasilan meraih *booth* terbaik ini menjadi pematik bagi Kementerian Kominfo untuk terus melakukan sosialisasi dan diseminasi terkait berbagai program prioritas, kebijakan serta kegiatan dari unit-unit kerja yang ada di Kominfo melalui berbagai sarana termasuk pameran untuk diketahui oleh masyarakat serta mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan ekosistem digital yang inklusif dan kolaboratif berbasis inovasi menuju Indonesia Emas 2045. vera



Veddrig Leonardo

Medali Emas
Sport Climbing – Men Speed



Rizky Juniansyah

Medali Emas
Weightlifting – Men's 73 kg



**Gregoria Mariska
Tunjung**

Medali Perunggu
Badminton – Women's Singles



Ditjen SDPPI Jaga Penggunaan Frekuensi

Opening Ceremony PON XXI Aceh-Sumatera Utara

Oleh: Tim Direktorat Pengendalian SDPPI

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan ajang multi-olahraga nasional utama yang berlangsung dari tanggal 9 hingga 20 September 2024. Untuk kali pertama, PON diselenggarakan di dua provinsi sekaligus, yaitu di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. PON XXI Aceh-Sumatera Utara ini diikuti oleh 39 Kontingen, terdiri dari 38 kontingen provinsi dan 1 kontingen Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ditjen SDPPI melalui Tim Kerja Pengawasan SFR dan Perangkat Telekomunikasi pada Event Khusus dan Antar Negara Direktorat Pengendalian SDPPI mengadakan dukungan kegiatan pengawasan dan pengamanan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Perangkat Telekomunikasi PON XXI sejak pembukaan hingga acara penutupan PON XXI.

Dukungan kegiatan dilaksanakan mulai dari sejak persiapan hingga penyelenggaraan event selesai dilaksanakan. Pada tahapan persiapan, Ditjen SDPPI melakukan koordinasi dengan penyelenggara untuk melakukan inventarisasi data penggunaan frekuensi dan perangkat radio, lokasi

dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, Tim Ditjen SDPPI juga melakukan sosialisasi terkait penggunaan frekuensi radio, regulasi perizinan dan tugas pengawasan frekuensi radio yang dilaksanakan selama event berlangsung.

Penggunaan spektrum frekuensi dalam event PON XXI 2024 Aceh-SUMUT meliputi penggunaan sarana komunikasi radio Handy Talkie oleh official, kontingen, *event organizer*, *broadcasting* dan instansi pendukung lainnya, layanan komunikasi seluler yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan *live* selama pertandingan berlangsung, berbagi media gambar maupun video melalui social media atau layanan video singkat lainnya juga menggunakan sumber daya alam berupa spektrum frekuensi radio.

Selain koordinasi dengan pihak penyelenggara, tim Ditjen SDPPI juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak pendukung acara lainnya antara lain tim keamanan TNI/POLRI, Satgas pengamanan VVIP (Paspampres), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan *provider* telekomunikasi yang memberikan dukungan selama penyelenggaraan event berlangsung.



Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan PON XXI, Ditjen SDPPI melalui Direktorat Operasi Sumber Daya telah menerbitkan Izin Stasiun Radio untuk penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) yang bersifat sementara. Izin yang diterbitkan terdiri dari sebanyak 73 frekuensi yang digunakan untuk keperluan komunikasi radio seperti alat HT, *repeater* dan *intercom*. Pihak penyelenggara memanfaatkan penggunaan frekuensi tersebut untuk pelaksanaan upacara pembukaan, pelaksanaan pertandingan cabor, komunikasi tim *media center* hingga upacara penutupan PON XXI.

Seluruh kanal frekuensi radio yang terdapat dalam surat penetapan ISR untuk penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara ini tidak dikenakan Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan pertimbangan kegiatan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan kegiatan kenegaraan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Selain penggunaan frekuensi yang telah diterbitkan ISR sementara oleh Ditjen SDPPI, Penyelenggara PON XXI juga melaporkan menggunakan berbagai jenis perangkat radio yang termasuk dalam kategori izin kelas.

Terbitkan 73 Izin Penggunaan Frekuensi Sementara



Perangkat tersebut antara lain *wireless camera* dan *drone camera* yang digunakan oleh tim broadcasting yang menggunakan pita frekuensi izin kelas di 1500 MHz, 2400 MHz dan 5800 MHz, terdapat juga penggunaan perangkat *wireless audio* seperti *wireless microphone* dan *in ear monitor system* yang masuk dalam kategori perangkat short range device (SRD), perangkat tersebut menggunakan range frekuensi 500-600 MHz. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas.

Monitoring Frekuensi Wilayah Aceh

Pembukaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 9 September 2024 di Stadion Harapan Bangsa, Kota Banda Aceh. Tim Ditjen SDPPI secara proaktif melakukan monitoring dan pemantauan penggunaan frekuensi radio secara khusus dengan adanya penggunaan perangkat *jammer* dan anti *drone* oleh satgas pengamanan VVIP sehingga perlu dipastikan penggunaan frekuensi radio yang diberikan izin frekuensi sementara untuk PON XXI tetap dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pengawasan dilakukan di beberapa titik *venue* Stadion Harapan Bangsa seperti area tribun VVIP Presiden RI, panggung acara pertunjukan (*stage*), area tribun penonton dan area *outer* stadion yang menjadi titik-titik lokasi instalasi perangkat radio frekuensi.

Suksesnya pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio diukur dari komunikasi penyelenggara yang lancar dan perangkat broadcasting yang mampu menayangkan kualitas siaran yang baik selama acara berlangsung.

Tim pengawasan frekuensi yang dikoordinir oleh Direktorat Pengendalian SDPPI terdiri dari Direktorat Pengendalian SDPPI, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor SFR Kelas II Banda Aceh dan 3 UPT pendukung yaitu UPT Medan, Batam dan Mamuju.

Setelah kegiatan Pembukaan PON XXI, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Banda Aceh melakukan dukungan kegiatan pengawasan SFR Pada Penyelenggaraan Pertandingan Cabor PON XXI Tahun 2024. Balmon Banda Aceh menugaskan tim untuk melakukan *monitoring* frekuensi radio di *venue* cabang olahraga yang dipertandingkan di Aceh, mulai dari cabang olahraga Aerosport – Aeromodelling, Korfball, Selam (Laut), hingga cabang olahraga Terbang Layang dan olahraga Sepak takraw



Selain *monitoring* frekuensi radio di *venue* olahraga, Balmon Banda Aceh juga melakukan monitoring di Media Center PON XXI 2024 di Banda Aceh. Kegiatan monitoring di *Media Center* PON XXI 2024 ini dilakukan sejak tanggal 8 hingga tanggal 20 September 2024. Secara umum kegiatan *monitoring* selama kegiatan PON XXI 2024 ini berjalan lancar dan tidak ada laporan gangguan penggunaan spektrum frekuensi yang terjadi.

Monitoring Frekuensi Wilayah Sumut

Dalam pergelaran PON XXI Aceh-SUMUT 2024, Sumatera Utara menjadi tuan rumah untuk beberapa jenis olahraga yang dilaksanakan di beberapa venue yang tersebar di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota. Direktorat Pengendalian SDPPI menugaskan Unit Pelaksana Teknis Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan untuk melakukan dukungan kegiatan pengawasan SFR pada penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024.

Renny Kusumaningtyas selaku Ketua Tim Pengawasan SFR dan Perangkat Telekomunikasi Pada Event Khusus dan Antar Negara menyampaikan perlunya dukungan pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR pada event PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumatera Utara agar penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk layanan telekomunikasi dapat termanfaatkan dengan optimal tanpa menimbulkan gangguan.

Menindaklanjuti arahan Direktur Pengendalian SDPPI tersebut, Latuse selaku Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Medan membentuk tim yang terdiri dari Pejabat Pengendali Frekuensi Radio (PPFR) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Balmon SFR Kelas I Medan juga mendapat bantuan personal dari Direktorat Pengendalian SDPPI dan dari Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Makassar.



Operator seluler juga turut membantu dengan memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi penumpukan massa seperti area opening ceremony, closing ceremony, dan venue pertandingan yang diminati. Untuk mengantisipasi kebutuhan lonjakan trafik tersebut, operator seluler menambah kapasitas backbone melalui media optik dan menempatkan mobile Base Transceiver Station (BTS) di lokasi-lokasi yang diperkirakan akan terjadi lonjakan penggunaan data seluler. Di area media center dan area Sumatera Utara Sport Center penyelenggara seluler juga menyediakan layanan 5G yang memiliki kapasitas jauh lebih besar dari generasi sebelumnya yaitu 4G.



H-3 menuju upacara penutupan, Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menerima laporan aduan gangguan frekuensi pada pita 2300 MHz. Gangguan frekuensi radio tersebut menyebabkan penurunan performansi layanan seluler dari salah satu operator seluler. Dampak dari gangguan tersebut menyebabkan masyarakat di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun yang menjadi pelanggan operator tersebut mengalami perlambatan konektivitas atau jaringan lelet.

Latuse selaku Kepala Balmon SFR Kelas I Medan membagi tim PFR dan PPNS menjadi dua, satu tim fokus pada simulasi pemantauan frekuensi, dan tim kedua melakukan penanganan gangguan frekuensi radio di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun.

Tangani Gangguan Performa

Hasil dari penanganan gangguan tersebut, terdapat Radio Local Area Network (RLAN) yang dulunya digunakan oleh suatu instansi dengan kondisi tidak ada trafik namun perangkat masih tetap menyala. Perangkat RLAN maupun Wireless Local Area Network (WLAN) merupakan perangkat internet dengan izin kelas yang tidak perlu memperoleh Izin Stasiun Radio (ISR) untuk penggunaan outdoor perangkat tersebut harus memenuhi spesifikasi teknis sesuai PM KOMINFO No. 2 Tahun 2023. Perangkat tersebut hanya boleh dioperasikan pada pita 2400 MHz – 2483.5 MHz. Namun penggunaan perangkat tanpa tersertifikasi dari Direktorat Jenderal SDPPI dapat keluar dari pita yang sudah ditetapkan seperti pada pita 2300 MHz yang pada akhirnya dapat menyebabkan jatuhnya layanan komunikasi seluler.

Secara umum kegiatan dukungan pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan yang disupervisi Direktorat Pengendalian SDPPI melalui Tim Pengawasan SFR dan Perangkat Telekomunikasi Pada Event Khusus dan Antar Negara dalam event PON XXI 2024 Aceh-SUMUT terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan menyampaikan terimakasih kepada semua stakeholder yang secara bersama-sama mendukung dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) yang mengelola *Media Center*, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Perhubungan Angkatan Darat (HUBDAM) I Bukit Barisan, Bidang TIK POLDA Sumatera Utara, Satuan BRIMOB POLDA Sumatera Utara, BASARNAS Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Deli Serdang, Penyelenggara Layanan Seluler dan APJII serta stakeholder lainnya



Kata Sivitas:

Ucapan Kesan dan Pesan HUT Ke-23 Kominfo





Annisa Nur Muslimah
Ditjen IKP

Perjalananmu menjadi navigator transformasi digital di Indonesia masih panjang dan harus terus berjuang. Pemerataan akses informasi publik yang dibutuhkan masyarakat terus diupayakan dan berkelanjutan dengan membangun infrastruktur dan juga memperluas jejaring mitra strategis komunikasi publik. Di hari ulang tahunmu yang beranjak ke-23, Semoga Kominfo selalu dimudahkan dan diringankan langkahnya demi mewujudkan Indonesia Maju.



Renita S. Mayasari
BPSDM

Selamat HUT Ke-23 Kominfo! Terima kasih atas peran penting dalam menjaga keterbukaan informasi dan mendukung transformasi digital di Indonesia. Semoga terus maju, inovatif, dan membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Sukses selalu untuk Kominfo 

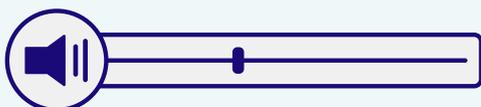


Randy Dwi Pranaputra
Sekretariat Jenderal

Pesan saya untuk perayaan HUT Kominfo berikutnya perlombaan ditambah lagi dan dapat dikemas dengan konsep kolaborasi dari setiap unit kerja bukan persaingan antar unit kerja (jadi dibentuk tim yang berisi pegawai dari berbagai unit kerja) sehingga kekompakan dan silaturahmi akan terjalin makin baik.

Dan terima kasih kepada seluruh pimpinan, panitia dan peserta yang telah mendukung dan meramaikan HUT 23 Kominfo

KOMINFO, Makin Digital Makin Maju



Search...



Afif Nur Rakhman
Ditjen Aptika

Saya sangat senang bisa ikut serta dalam memeriahkan kegiatan karnaval HUT Kominfo tahun 2024, khususnya tahun ini sudah ada kegiatan kompetisi bola basket 5x5 antar unit kerja. Acara ini bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antara seluruh pegawai dan keluarga besar di Kominfo. Suasana setiap kegiatan karnaval sangat meriah, penuh kreativitas, dan antusiasme dari semua peserta yang terlibat. Lomba-lombanya juga sangat menyenangkan, mengasah kerjasama tim, dan tentunya penuh keceriaan. Harapannya semoga setiap tahunnya acara dapat berlangsung lebih meriah dan lebih banyak kegiatan-kegiatan menarik lainnya. Selamat HUT Ke-23 Kominfo, semoga semakin tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan teknologi yang terus berkembang.



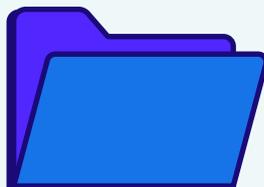
Thariq Abdullah M.
Ditjen PPI

Selamat ulang tahun yang ke-23 untuk Kominfo! Kominfolah yang menyadarkan saya tentang pentingnya terus beradaptasi dengan zaman dan pentingnya bertransformasi digital. Semoga semakin sukses dan terus memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa. Makin digital makin maju!



Maya Novinka
Kuasi
(Dewan Pers)

Selamat Ulang Tahun Kominfo. Semoga segala inovasi dan kebijakan yang diambil membawa pencerahan dan kemajuan bagi bangsa Indonesia. Terus berkarya dan berinovasi menuju Indonesia Emas !!



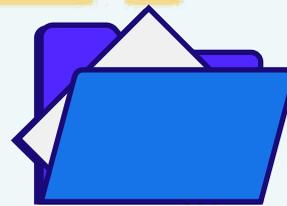


Muhammad Leozandy S
Ditjen IKP

Dirgahayu ke-23 Kementerian Komunikasi dan Informatika, semoga Kementerian Kominfo beserta seluruh sivitas di dalamnya terus berinovasi dalam menghadapi tantangan di era digital. Harapan besar bagi Kementerian Kominfo untuk menjaga keamanan dan perlindungan masyarakat di dunia siber, pemerataan akses internet di seluruh Indonesia serta menciptakan ekosistem komunikasi yang inklusif dan aman di Indonesia.

Error

Cancel



Setup.exe

Installing

Estimated time left : 2 hours



Andika Hendrasica
Itjen

Selamat ulang tahun yang ke-23 kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika! Semoga terus berinovasi dan memberikan dampak besar dalam memajukan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam setiap langkah. Dengan semangat kolaborasi, dan tanggung jawab yang tinggi, kita bersama-sama membangun negeri yang semakin cerdas dan terhubung. Terima kasih atas dedikasi, transparansi, serta kerja keras dalam melayani Masyarakat selama ini. Indonesia Terkoneksi, Makin Digital Makin Maju!



Aksi dan Ekspresi Semarak Kominfo Karnaval 2024



◆ *Games Karnaval* ◆ *Bazaar Makanan* ◆ *Festival Band Kominfo*

DOOR PRIZE

LOMBA KHAS 17-AN
14 Agustus 2024

LOMBA BUSANA PAHLAWAN NASIONAL
17 Agustus 2024

TARIK TAMBANG **BALAP KARUNG**
ESTAFET SARUNG **BALAP KELERENG**
AMBIL KOIN DALAM BUAH
LOMBA MASAK ESTAFET

UPACARA BENDERA HUT KE-79 RI
PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA 17-AN

Para sivitas Kominfo beraksi dalam Kominfo Karnaval 2024, yang berlangsung di Lapangan Antakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, pada 14 Agustus 2024.

Kominfo Karnaval 2024 merupakan rangkaian kegiatan kompetisi olahraga dan seni antar unit kerja di Kementerian Kominfo, dan digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Republik Indonesia dan juga HUT Ke-23 Kementerian Kominfo.

Sejumlah perlombaan khas perayaan 17-an telah diadakan dalam Kominfo Karnaval 2024, seperti balap karung, estafet sarung, balap kelereng, tarik tambang, ambil koin dalam buah, lomba masak estafet, dan masih banyak lagi.

Ratusan pegawai memadati lapangan Antakupa di Kantor Kementerian Kominfo dan menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti perlombaan. Berbagai ekspresi para peserta dan supporter membuat semarak suasana pagelaran lomba.

Sekjen Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, berharap Kominfo Karnaval 2024 ini dapat menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan seluruh pegawai Kominfo.

“Dengan perayaan yang melibatkan berbagai aktivitas sosial dan perlombaan, saya berharap kesempatan ini kita jadikan sebagai momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita kepada bangsa dan negara,” ujar Mira Tayyiba.

Mira juga berharap, perayaan ini akan menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat nasionalisme di kalangan pegawai.

“Saya ucapkan selamat berkompetisi kepada seluruh peserta dan terima kasih serta apresiasi kepada panitia yang telah menyiapkan rangkaian kegiatan ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga semangat sportivitas dan kekeluargaan,” pungkasnya.











Perlindungan Masyarakat Pengguna Perangkat Telekomunikasi

dengan Regulasi Ketentuan Batasan Specific Absorption Rate (SAR)

Cendrawasih Ardhi Putri

Analisis Standar Perangkat Dan Infrastruktur Telekomunikasi -
Direktorat Standardisasi

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, perangkat elektronik seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat nirkabel lainnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Keberadaan perangkat-perangkat ini memudahkan komunikasi, hiburan, serta pekerjaan, dan kini telah menjadi kebutuhan esensial bagi banyak orang. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ini, ada kekhawatiran mengenai potensi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat paparan radiasi elektromagnetik dari perangkat tersebut.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) ingin memastikan bahwa perangkat

telekomunikasi yang beredar di Indonesia aman dan tidak berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Ditjen SDPPI memberlakukan regulasi kewajiban pengujian tingkat Specific Absorption Rate (SAR) sebagai persyaratan sertifikasi perangkat telekomunikasi tertentu yang digunakan di Indonesia.

SAR adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan seberapa banyak energi elektromagnetik yang diserap oleh jaringan tubuh manusia saat terpapar radiasi dari perangkat elektronik. SAR diukur dalam satuan watt per kilogram (W/kg). Meskipun radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh perangkat elektronik umumnya berada dalam batas yang ditetapkan,

pengujian SAR memastikan bahwa perangkat tersebut tidak melebihi batas paparan yang aman bagi kesehatan.

Beberapa negara seperti Singapura, Korea, dan India telah memberlakukan pengujian SAR sebagai persyaratan untuk sertifikasi perangkat telekomunikasi. Di Indonesia, regulasi terkait nilai SAR merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1998 dan ICNIRP 2020.

Nilai-nilai batas ini telah ditetapkan oleh ICNIRP. Pada tahun 1998, ICNIRP membuat ketentuan dengan memperhatikan pengetahuan ilmiah yang ada saat ini dan hanya mempertahankan efek yang telah terbukti dari paparan gelombang tersebut, khususnya pemanasan jaringan. Sejak saat itu, ICNIRP terus mengikuti perkembangan ilmiah dan telah merevisi dengan mengeluarkan ICNIRP 2020. Tetapi, nilai batas SAR tetap tidak berubah.

Pedoman ini diadopsi secara global di 156 negara di dunia, serta telah disahkan oleh World Health Organization (WHO) dan International Telecommunication Union (ITU). Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif radiasi non-pengion, terlebih bisa berdampak buruk jika paparannya berlebihan.

Pada tahun 2022 Ditjen SDPPI telah melaksanakan kajian terkait pemberlakuan kewajiban pengujian SAR pada alat dan/atau perangkat telekomunikasi. Dengan ditetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 177 Tahun 2024 tentang Batasan Specific Absorption Rate (SAR) pada Perangkat Telekomunikasi Seluler dan Komputer Tablet pada tanggal 7 Maret 2024. Maka, setiap permohonan sertifikat perangkat telekomunikasi untuk perangkat telekomunikasi seluler dan komputer tablet wajib memenuhi ketentuan batasan SAR, terhitung sejak tanggal 1 April 2024 untuk pengujian kepala dan 1 Agustus 2024 untuk pengujian torso dan limb.

Ada tiga jenis pengukuran SAR yang mengevaluasi paparan terhadap peralatan radio yang digunakan di dekat tubuh manusia. Head SAR mencakup penggunaan telepon di pipi dan/atau telinga seperti selama panggilan suara. Torso SAR digunakan ketika telepon dibawa di dekat tubuh, misalnya di dalam saku jaket atau tas. Limb SAR

sesuai dengan penggunaan telepon di limb, misalnya dipegang di tangan, dibawa dengan gelang tangan, atau di saku celana.

Pengukuran besaran SAR memainkan peran yang krusial dalam menilai dan mengelola risiko kesehatan terkait dengan penggunaan perangkat elektronik. Dengan memastikan bahwa perangkat tidak melebihi batas paparan radiasi yang aman, pengujian SAR membantu melindungi kesehatan pengguna dan memastikan bahwa produk yang beredar di pasaran memenuhi standar keselamatan yang diperlukan. Sebagai konsumen yang bijak, penting untuk memahami proses ini dan memilih perangkat yang telah terbukti aman melalui pengujian SAR yang ketat.





Tingkatkan Kesiapsiagaan Bencana, Pemerintah Bangun Sistem Komunikasi Nasional

oleh: Tim Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, menghadapi berbagai tantangan terkait penanggulangan bencana. Dalam dua dasawarsa terakhir, negara yang memiliki lebih dari tujuh belas ribu pulau telah mengalami sejumlah bencana dahsyat yang menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa yang signifikan.

Contoh bencana tersebut meliputi gempa bumi berkekuatan 9,1 Skala Richter di Aceh pada 26 Desember 2004, gempa 6,3 Skala Richter di Yogyakarta pada 27 Mei 2006, letusan Gunung Merapi pada Oktober-November 2010, serta gempa 7,5 Skala Richter di Palu dan Donggala. Semua peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya Indonesia terhadap bencana alam.

Dengan adanya berbagai bencana tersebut, Indonesia membutuhkan sistem komunikasi yang efektif. Tanpa sistem komunikasi yang baik, upaya penanggulangan bencana menjadi tidak optimal.

Dalam situasi bencana, informasi yang cepat dan akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Namun, hingga saat ini, belum ada platform sistem komunikasi terpadu yang memadai. Ketiadaan platform yang terintegrasi menyebabkan kendala dalam koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Sistem komunikasi yang ada saat ini masih bergantung pada jaringan konvensional, yang

seringkali terbatas pada komunikasi suara. Keterbatasan ini menghambat penyebaran informasi dan koordinasi yang efisien dalam keadaan darurat.

Selain itu, sistem komunikasi yang ada sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat saat bencana terjadi. Hal inilah yang menyebabkan informasi dan koordinasi menjadi terhambat.

Dalam konteks ini, teknologi seluler dan penyiaran digital menawarkan potensi besar untuk meningkatkan sistem komunikasi dalam penanggulangan bencana. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyampaikan peringatan dini dan informasi bencana kepada masyarakat secara lebih efektif. Namun, sistem-sistem termasuk layanan nomor darurat 112, masih belum terintegrasi dengan baik dan beroperasi secara terpisah.

Kondisi tersebut mengakibatkan koordinasi antara lembaga terkait dan penyampaian informasi kepada masyarakat menjadi kurang efektif.

Susun Studi Kelayakan Siskomnas PMPB

Untuk mengatasi tantangan ini, Pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (Siskomnas PMPB).

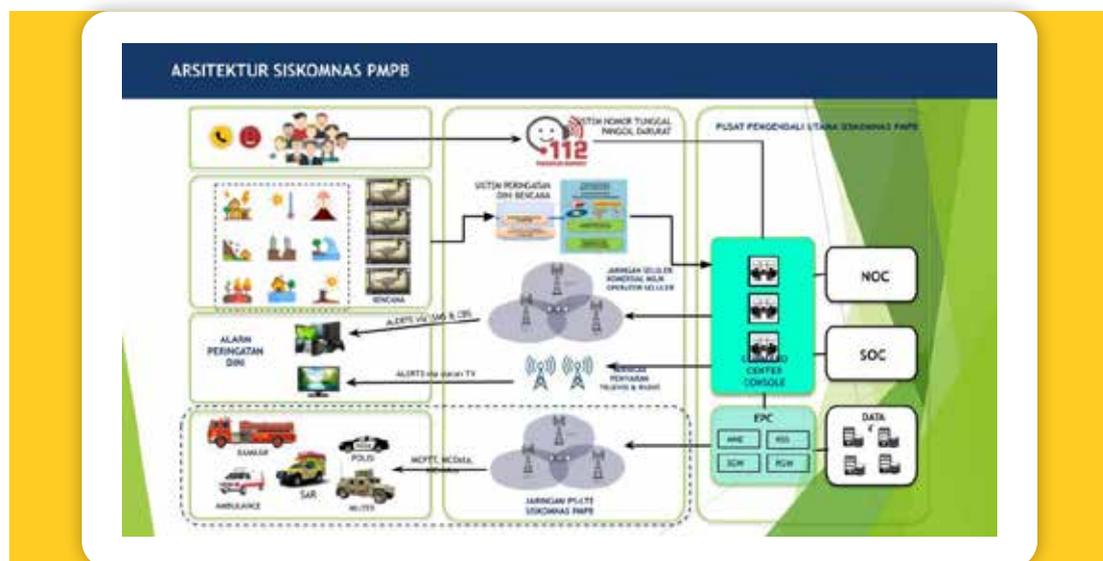
Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai platform komunikasi yang ada, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan bencana.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Wayan Toni Supriyanto menjelaskan Siskomnas PMPB bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai sistem komunikasi yang ada.

"Hari ini kita membahas dan mendiskusikan konsep yang harus sempurna. Salah satu hal yang ingin saya tekankan adalah pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi dalam mendukung pengembangan Siskomnas PMPB, agar memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat," jelasnya dalam Focus Group Discussion Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Siskomnas PMPB di Jakarta Pusat, Selasa (13/08/2024).

Siskomnas PMPB akan mencakup beberapa elemen utama untuk memperkuat dan mengoptimalkan penanganan bencana. Elemen-elemen tersebut meliputi Early Warning System (EWS) yang menggunakan berbagai metode seperti *SMS Blast*, *TV Digital*, dan *Cell Broadcast* untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Selain itu, Layanan Darurat 112 akan terintegrasi secara nasional, serta adanya Sistem Komunikasi Radio untuk komunikasi darurat yang terpadu.

"Ini adalah langkah besar untuk memastikan bahwa kita siap menghadapi berbagai situasi darurat



dengan lebih baik di masa depan,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan komunikasi yang terkoordinasi dan kolaboratif dapat memaksimalkan upaya penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.

Menurut Dirjen PPI Wayan Toni, salah satu negara yang telah berhasil menerapkan sistem komunikasi yang efektif dalam menghadapi bencana yaitu Jepang.

“Negara tersebut telah menunjukkan bahwa dengan persiapan dan teknologi yang tepat, dampak dari bencana dapat diminimalisir, korban jiwa dapat dikurangi, dan ekonomi dapat terus tumbuh meskipun ada bencana,” ungkapnya.

Menurut rencana, Siskomnas PMPB akan mengintegrasikan sistem komunikasi dan informasi seperti komunikasi radio, penyampaian informasi bencana, serta layanan 112. Sistem ini juga akan mencakup pembangunan jaringan tersendiri (*dedicated*) untuk sistem komunikasi radio teresterial pitalebar (*broadband*) bergerak selular serta pembangunan Pusat Pengendali (*command center*).

Dengan pengintegrasian berbagai sistem komunikasi, diharapkan akan tercipta efisiensi anggaran negara dan terjaganya keberlangsungan layanan dalam situasi darurat. Siskomnas PMPB merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam penanggulangan bencana.

“Ini bertujuan untuk memungkinkan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, baik saat bencana maupun keadaan darurat lainnya,” tutur Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto.

Dirjen PPI Kominfo Wayan Toni mengharapkan implementasi Siskomnas PMPB dapat mengatasi kendala-kendala yang ada saat ini dalam penanggulangan bencana.

“Dengan adanya sistem komunikasi yang terintegrasi, diharapkan dapat tercipta koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan pihak terkait. Ini tentunya akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyampaian informasi dan koordinasi dalam situasi darurat,” ungkapnya.

Menurut Dirjen PPI Wayan Toni, dengan langkah ini setidaknya dapat mengurangi dampak bencana, menyelamatkan nyawa, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mungkin timbul.



“Sistem komunikasi yang terintegrasi ini akan menjadi model bagi negara-negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa dalam penanggulangan bencana,” tandasnya.

Mengusung tema “Mewujudkan Siskomnas PMPB yang Terintegrasi, Andal, dan Adaptif”, FGD yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Kementerian Kominfo berlangsung selama dua hari, dari tanggal 13 hingga 14 Agustus 2024.

Selain Dirjen PPI Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto, pada hari pertama penyelenggaraan, tampak hadir Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ismail, Staf Khusus Menteri Kominfo sekaligus Ketua Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) Sarwoto Atmosutarno, Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Kementerian Kominfo Marvels Parsaoran Situmorang.

Turut hadir Ketua Tim Infrastruktur Keperluan Khusus Pengembangan Pitalebar Direktorat Pitalebar Ditjen PPI Kementerian Kominfo Harapan Takaryawan, PIC Bidang Perencanaan Spektrum Frekuensi Radio untuk Fixed dan Land Mobile Service Arif Budi Praceko, Director Network Technology Operations and International Engagement FirstNet Authority Bread Morell, Tenaga Ahli Konsultan Studi Penyelenggaraan Siskomnas PMPB Yuli Susanto, Kasatpel Sistem Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Cahya Amanah, serta Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono.

Sedangkan di hari kedua FGD, menghadirkan sejumlah pembicara, diantaranya Ketua Tim Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar Harapan Takaryawan, Director Network Technology Operations and International Engagement FirstNet Authority Bread Morell, Tenaga Ahli Konsultan Studi Penyelenggaraan Siskomnas PMPB Gunadi, serta Tenaga Ahli dan Penyusunan Draft Permen Siskomnas PMPB Ibrahim Jamal. Diskusi ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk mitra kerja di bidang telekomunikasi dan perlindungan masyarakat, untuk memastikan sistem komunikasi yang dirancang dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan yang ada.



Sistem komunikasi yang terintegrasi ini akan menjadi model bagi negara-negara lain yang juga menghadapi tantangan serupa dalam penanggulangan bencana



Ngopi Bareng

Juli



Ngopi Bareng Kominfo di awal Juli 2024, khusus menghadirkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Hary Budiarto, untuk membahas lebih jauh mengenai program pembangunan sarana dan prasarana *digital talent center*. "Saat ini, Pemerintah mengkalkulasi kebutuhan talenta digital dari tahun 2023 hingga 2030 mencapai 458.043 orang per tahun. Akan tetapi, pemerintah mencatat tenaga yang tersedia hanya 6.064.085 dari total kebutuhan 10.513.361 orang di tahun 2023.

Menjawab hal tersebut, pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana digital talent center untuk mencetak ahli tenaga kerja digital seperti *digital expert (leader)*, *digital specialist*, *advance digital skill*, *intermediate digital skill*, *basic digital skill*, *digital literacy*, dan *digital mindset*.

"Saat ini, pemerintah punya sembilan lokasi yang berada di Cikarang, Bandung, Manado, Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Kominfo juga akan membangun di daerah lain seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi dalam waktu dekat", ucap Hary.

Dalam pengembangannya, sarana dan prasarana tersebut akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu auditorium, *training center*, laboratorium *startup digital*, studio pembuatan konten pelatihan, ruang kelas dan studio pembelajaran *online*, ruang kantor dan rapat, ruang hijau, ruang kerja untuk *startup*, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga.

Ngopi Bareng selanjutnya menghadirkan Plt. Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi Badan Usaha BAKTI Yulis Widyo Marfiah yang membahas perkembangan pembangunan 630 base *transceiver station* (BTS) hingga akhir 2024. Pembangunan BTS dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu (1) 148 lokasi; (2) 220 lokasi; (3) 180 lokasi; dan (4) 75 lokasi.

Adapun dalam Pembangunan BTS ini BAKTI menghadapi beberapa tantangan. Sebanyak 630 lokasi masih kondisi kahar yang akan diselesaikan sampai akhir tahun. Area kahar merupakan area yang memiliki kondisi tidak terduga dan menjadi salah satu tantangan untuk menghadirkan infrastruktur BTS.

Selain itu, kondisi geografis yang sulit dijangkau dan tingkat keamanan yang rendah menjadi tantangan lainnya. Mitra penyedia infrastruktur menjadi terhambat untuk menyelesaikan pembangunan BTS ini. BAKTI telah bekerjasama dengan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah demi kelancaran pembangunan. "Namun jumlah lokasi yang disediakan TNI juga masih terbatas karena berhubungan dengan prioritas keamanan."

Yulis juga menegaskan tidak ada penambahan lokasi baru karena mempertimbangan ketersediaan anggaran yang ada. Selain itu, BAKTI akan berusaha untuk fokus menyelesaikan target sesuai dengan kontrak.



Ngopi Bareng pada minggu keempat Juli menghadirkan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong. Pada Sesi itu, Dirjen Usman membeberkan dukungan Kementerian Kominfo di penyediaan *media center* dan komunikasi dalam penyelenggaraan High Level Forum on Multi-Stakeholders Partnership (HLF MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 di Bali pada 1 s.d. 3 September 2024 mendatang di Nusa Dua, Bali. Usman mengatakan bahwa penyelenggaraan yang kedua kali itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama negara-negara Asia dan Afrika, terutama dalam bidang ekonomi.

Selain itu, Usman juga mengatakan bahwa para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Kominfo mulai ancap-ancang pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. Direktorat Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika (PPI) adalah direktorat pertama dari Kominfo yang akan pindah ke IKN.





Ngopi Bareng

Agustus



Ngopi Bareng Kominfo di awal Agustus ini menghadirkan Direktur Pengembangan Pita Lebar, Marvels Parsaoran Situmorang. Pada Ngopi bareng kali ini Direktur Pengembangan Pita Lebar menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo terus berusaha untuk melakukan pemerataan telekomunikasi yang dibagi menjadi empat zona, yaitu:

- Zona 1: Tergolong ekonomis sehingga tidak memerlukan insentif maupun intervensi Pemerintah karena Opsel (Operator Seluler)

akan langsung berinisiatif membangun infrastruktur.

- Zona 2: Terdapat “*market efficiency gap*” sehingga dibutuhkan insentif di sisi perizinan agar Opsel dapat menggelar jaringan dengan lebih efisien dan terakselerasi.
- Zona 3: Konsep “*Smart Subsidy*” diperlukan dimana Pemerintah memberi insentif secara temporer untuk merangsang *demand* pada profil penduduk berpendapatan rendah.
- Zona 4: Terjadi kondisi “*true access gap*” sehingga diperlukan peran Pemerintah melalui BAKTI sebagai penyedia infrastruktur dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Pemerintah juga terus berupaya melakukan berbagai hal di bidang penyiaran, yaitu:

Mendorong Lembaga Penyiaran Swasta untuk melakukan migrasi dari teknologi analog ke digital.

Pembagian bantuan pemerintah berupa set top box kepada rumah tangga miskin.

Pelaksanaan revitalisasi pemancar LPP TVRI melalui proyek Digitalization Broadcasting System (DBS)

Ngopi Bareng Kominfo pada minggu kedua menghadirkan Dirjen Aptika, Hokky Situngkir. Dirjen Aptika menyebutkan bahwa pada masa awal menjabat, ada 5 PR yang harus diselesaikan diantaranya:

- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE). Menurut Hokky, PAPSE ini menjadi perhatian Kominfo yang harus segera diselesaikan
- Rancangan Peraturan Pemerintah Perlindungan Data Pemerintah (RPP PDP).
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Perlindungan Data Pribadi (Rperpes PDP)
- kebijakan tindak lanjut insiden Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)
- penanganan judi *online* (judol)

Pada pertemuan ini, Hokky juga menceritakan terkait perkembangan pemulihan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang telah pulih sekitar 90 persen. Akan tetapi, masih terdapat beberapa data yang harus dipulihkan.

“Pembelajaran yang diambil terkait kebocoran Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2), Salah satunya terkait cara mengamankan pusat data (pemilihan *password*), *backup* data, dan memperkuat penggunaan *multifactor authentication*”, ucap Hokky.

Hokky juga mengatakan bahwa progres pembangunan PDN Cikarang saat ini terus berjalan dan akan bisa aktif di tahun depan awal. Pengelolaan PDN Cikarang di tahap awal pengoperasian akan menggunakan skema *managed service* atau layanan yang dikelola oleh pihak ketiga dan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Ngopi Bareng Kominfo pada akhir Agustus menghadirkan Dirjen PPI Bapak Wayan Toni Supriyanto. Pada pertemuan ini, Wayan menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo sedang mengembangkan sistem peringatan dini untuk menghadapi potensi bencana *megathrust* di Selat Sunda dan Mentawai-Siberut. Sistem ini akan menampilkan peringatan bencana secara *real time* melalui televisi digital dan WhatsApp.

“Langkah ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap gempa besar dengan memanfaatkan teknologi dari BMKG dan hibah pemerintah Jepang”, ucap Wayan.

Wayan juga menjelaskan bahwa Kementerian Kominfo tengah menyusun regulasi untuk layanan eSIM, yang memungkinkan penggunaan nomor telepon tanpa kartu SIM fisik. Regulasi ini mencakup format nomor, sistem *provisioning*, dan registrasi pelanggan.

“Proses regulasi sedang dalam tahap finalisasi dan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dengan target selesai pada Oktober 2024. Regulasi ini bertujuan mengatur transisi dari kartu fisik ke eSIM dan meningkatkan efisiensi serta dukungan terhadap perangkat yang mendukung eSIM”, lanjut Wayan.

Kementerian Kominfo menerima keluhan dari pengemudi ojek *online* (ojol) terkait kebijakan tarif dan program aplikasi. Koordinasi dilakukan dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan penyedia aplikasi untuk mencari solusi terbaik.

“Kominfo juga mengawasi tarif dan revisi regulasi untuk memastikan keadilan bagi mitra pengemudi ojol, serta menanggapi tuntutan untuk menghapus program tarif hemat dan menyetarakan tarif layanan”, tutup Wayan.



Ngopi Bareng

September

Ngopi bareng awal September menghadirkan Direktur Ekonomi Digital Bonifasius W Pujiyanto. Boni menjelaskan bahwa dalam mendukung pertumbuhan startup di Indonesia, pemerintah memprioritaskan pemberian modal dalam bentuk *in-kind* daripada modal tunai.

"Modal *in-kind* meliputi barang, jasa, atau program pelatihan yang tidak melibatkan uang langsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan startup yang dikembangkan dapat beroperasi dengan prinsip keberlanjutan yang baik", ucap Boni.

Pemerintah juga memberikan dukungan meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi

untuk membekali generasi muda yang ingin memulai startup dari dasar. "Program unggulan Kemenkominfo, 1000 Startup Digital, telah berjalan sejak 2016 dan menghasilkan sekitar 1.600 startup. Program ini menyediakan edukasi mendalam mengenai pendirian dan pengembangan startup dari ide hingga realisasi", lanjut Boni.

Boni juga mengatakan bahwa pemerintah menghadapi tantangan dalam mempertahankan startup. Dari ribuan startup yang lahir, hanya sekitar 238 yang bertahan hingga tahun ketiga. Kementerian Kominfo mencatat bahwa meskipun angka tersebut menunjukkan perbaikan, hanya sekitar 10-15% dari startup yang dapat bertahan dalam tahap awal pengembangan.

Menghadapi hal tersebut, Kementerian Kominfo memiliki program NextICorn, merupakan inisiatif untuk mencari startup terbaik di Indonesia yang siap menerima investasi dari domestik maupun asing. Saat ini, terdapat 63 startup dalam program NextICorn.

Kementerian Kominfo menekankan tidak akan memberikan pendanaan tunai langsung tetapi berfokus pada penyediaan program gerakan dan dukungan yang dapat membantu startup dalam mencari investasi dari pihak lain.



Pada minggu kedua Ngopi Bareng Kominfo menghadirkan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Prabunindya Revta Revolusi. Prabu menyampaikan pentingnya menjaga kualitas demokrasi di era digital dengan menciptakan ruang informasi yang sehat.

Prabu menekankan bahwa tujuan utama adalah memberantas hoaks dan disinformasi tanpa menghilangkan konten negatif atau kritik yang merupakan bagian dari demokrasi. Kementerian Kominfo bertemu dengan *platform* besar untuk mendiskusikan strategi menjaga ruang digital yang sehat.

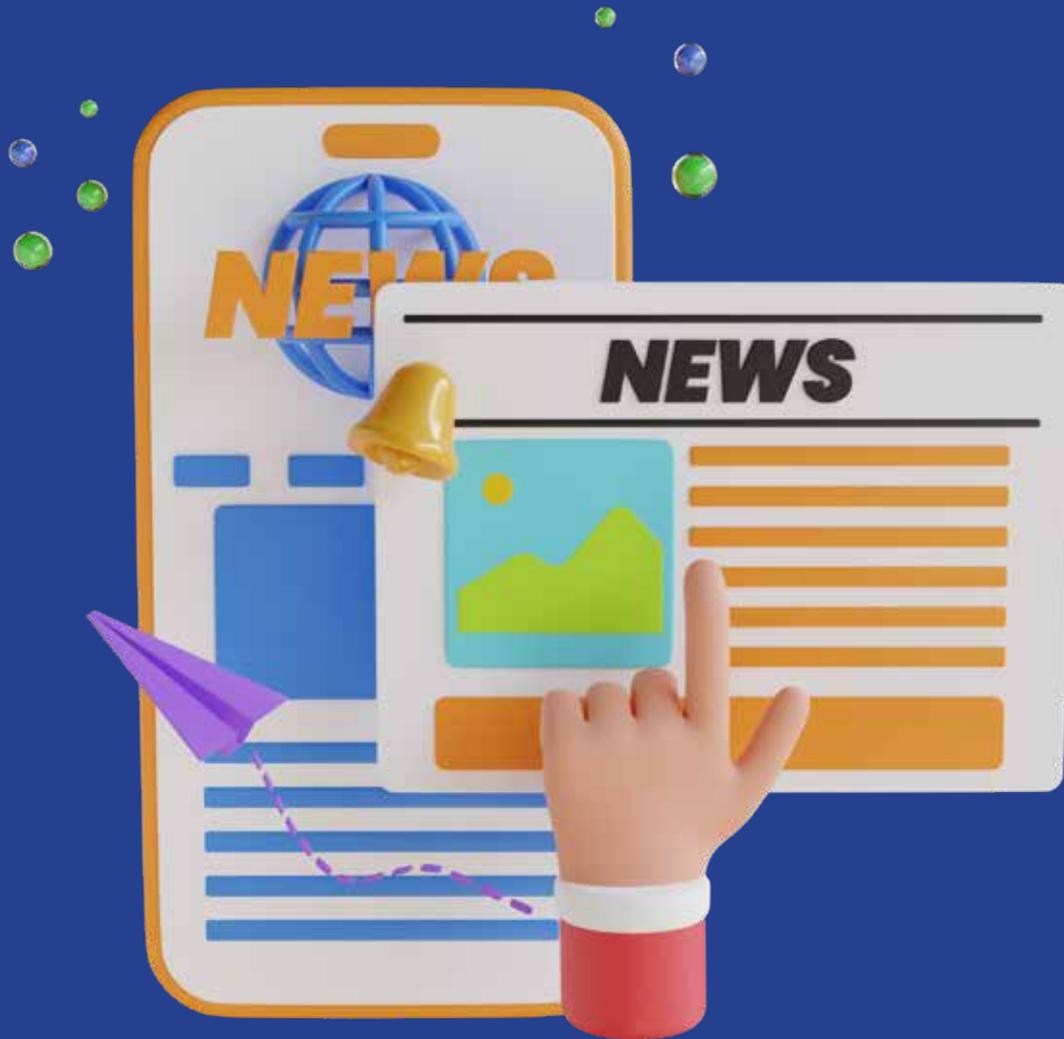
Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan berbagai *platform* media sosial untuk menangkal hoaks selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Kolaborasi ini melibatkan platform seperti YouTube, Meta, TikTok, Google, Snake, dan X untuk memantau dan mencegah peredaran hoaks serta menanganinya secara cepat. Kementerian Kominfo juga berencana membentuk Satuan Tugas Anti Hoaks untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis, aman, dan damai.

Kementerian Kominfo juga tengah mengkaji kemungkinan regulasi tentang pembatasan usia dalam bermain media sosial. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan inisiatif negara lain seperti Australia yang sedang menguji coba verifikasi usia anak. "Indonesia juga sedang mempersiapkan regulasi terkait batas usia anak dalam media sosial, meskipun belum ada kepastian mengenai bentuk regulasi tersebut," lanjut Prabu.

Prabu juga menjelaskan terkait tambahan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk sosialisasi Program Makan Siang Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Anggaran tambahan ini akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi melalui media sosial dan acara luring.

"Penambahan anggaran tersebut menunjukkan keseriusan Kemenkominfo dalam memastikan program ini diterima dan dipahami masyarakat secara luas. Sosialisasi juga akan dilakukan melalui penyuluh informasi di daerah, termasuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil)," ucap Prabu.





Portal Kominfo

Siaran Pers No. 419/HM/KOMINFO/07/2024

Rabu, 3 Juli 2024
tentang

Wamenkominfo Dorong Industri Penyiaran Adaptasi Dinamika Masyarakat



Setahun setelah penerapan Analog Switch Off (ASO) atau peralihan siaran televisi analog ke digital, tingkat kepemirsaaan siaran televisi digital berangsur pulih. Meskipun demikian, peningkatan itu masih dalam tingkat mencapai 96% dari tingkat sebelum migrasi penyiaran dari analog ke digital terrestrial.

Menurut Wamen Nezar Patria, adaptasi diperlukan agar ekosistem industri penyiaran dapat memiliki daya saing di tengah perkembangan pesat teknologi multiplatform dan kebiasaan masyarakat. "Saat ini adalah momen yang tepat bagi pelaku industri mempersiapkan lembaga penyiaran, baik televisi, maupun radio untuk memiliki daya saing dan hadir secara multiplatform," ungkapnya.

Wamen Nezar Patria menyatakan Pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan ekosistem

industri penyiaran. "Selain pendekatan melalui perubahan undang-undang penyiaran, pemerintah juga berkesempatan untuk membantu industri penyiaran melalui program pemerintah, salah satunya Kominfo juga menyiapkan rencana strategis Kementerian Kominfo," tuturnya.

Wamenkominfo menyatakan tengah mengkaji masukan dari ekosistem untuk menjaga keberlanjutan industri penyiaran nasional. "Kami menangkap dan memahami keprihatinan dari berbagai elemen industri dan masyarakat, mulai dari kekhawatiran persaingan komersial yang menghidupi lembaga penyiaran, hingga masyarakat sipil yang mendorong penyiaran berkualitas dan konten-konten yang sehat di platform digital," ungkapnya.

Dalam acara yang diselenggarakan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) bersama Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI) itu, Wamenkominfo Nezar Patria didampingi Direktur Penyiaran Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Geryantika Kurnia.

Tampak hadir Ketua Bidang Hukum Masyarakat Telematika Johnny Siswadi, Ketua Bidang Media Digital dan Penyiaran Broadcast Mastel Neil R. Tobing, Sekretaris Komisi Sistem dan Teknologi Penyiaran Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Rahmat Akbari dan para utusan dari perusahaan media.

Siaran Pers No. 425/HM/KOMINFO/07/2024

Rabu, 10 Juli 2024
tentang**Wamen Nezar Patria Tekankan Lima Prinsip Etika dan
Tanggung Jawab Ruang Digital**

Perkembangan teknologi membawa dampak krusial di semua sektor. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan kehadiran teknologi berbasis machine learning dan software bots yang didukung media sosial meningkatkan potensi produksi dan penyebaran misinformasi secara luas.

Oleh karena itu, Wamen Nezar Patria menekankan arti penting penerapan etika dan tanggung jawab di ruang digital agar pemanfaatan digital lebih optimal.

“Setidaknya terdapat lima prinsip yang bisa menjadi acuan untuk memastikan etika dalam pemanfaatan teknologi digital,” tandasnya dalam orasi ilmiah Wisuda Program Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan Periode

II Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) Yogyakarta, di STMM Yogyakarta, Rabu (10/07/2024).

Menurut Wamenkominfo, kelima prinsip itu mencakup, pertama prinsip keadilan yang perlu diperhatikan untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara kemanusiaan dan non-diskriminatif.

Kedua, prinsip otonomi yaitu pendekatan human-centric dalam menggunakan teknologi digital dan data.

Selanjutnya, prinsip ketiga mengacu pada teknologi digital harus digunakan untuk menghasilkan manfaat bagi individu maupun masyarakat. Adapun keempat, prinsip *non-maleficience* yang menekankan nilai kelayakan dan penilaian berbasis risiko

dan kelima, prinsip transparansi harus diperhatikan agar bisa dipertanggungjawabkan.

Mengenai penerapan etika dan tanggung jawab sosial di ruang digital, Wamen Nezar Patria menyontohkan inisiatif Mediawise Teen Fact-Checking Network (TFCN).

“Sebuah inisiatif global Generasi Z dalam melawan disinformasi dan menyelenggarakan literasi digital. Dan berhasil memproduksi video *fact-checking* di berbagai media sosial dengan jumlah penonton mencapai 12 juta dalam 4 tahun, serta melakukan jurnalisme berbasis literasi digital pada Pemilu Brasil 2022,” jelasnya.

Wamenkominfo mendorong lulusan STMM Yogyakarta meningkatkan dan mengembangkan literasi digital sebagai dukungan terciptanya ruang digital sehat dan pemanfaatan teknologi digital yang bertanggung jawab.

“Selain untuk meningkatkan adopsi teknologi, literasi digital menyediakan akses masyarakat ke berbagai pekerjaan, meningkatkan inklusi digital, serta membantu akselerasi pembangunan sumberdaya manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara etis dan produktif,” tuturnya.

Wamen Nezar Patria menjelaskan upaya Kementerian Kominfo

dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Menurutnya, sejak tahun 2017, Kementerian Kominfo telah menginisiasi Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital.

“Khususnya pada empat pilar literasi digital meliputi, *digital skills, digital safety, digital culture, dan digital ethics,*” tandasnya.

Sebelumnya, lewat rekaman video, Menkominfo Budi Arie Setiadi mengucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati STMM Yogyakarta Periode II Tahun Akademik 2023-2024.

“Semoga ilmu yang telah diperoleh dan proses pembelajaran yang sudah ditempuh, dapat menjadi manfaat untuk pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.

Menurut Menteri Budi Arie, prosesi wisuda ini menjadi sebuah momen perayaan atas kesuksesan, kerja keras, dan dedikasi wisudawan.

“Dengan menyelesaikan studi di kampus ini. masa depan tentunya penuh tantangan, namun harus dihadapi dengan semangat dan tekad yang bulat, berbekal ilmu yang sudah dimiliki” tuturnya.

Siaran Pers No. 462/HM/KOMINFO/07/2024

Rabu, 31 Juli 2024
tentang

Atasi Tantangan Transformasi Digital, Menkominfo Ajak Pelaku Industri Perkuat Kolaborasi



Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX) 2024 menjadi momentum bagi pemerintah dan ekosistem digital berkolaborasi mewujudkan transformasi digital nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika

Budi Arie Setiadi mengajak pelaku industri digital bersama-sama mengatasi tantangan dalam agenda transformasi digital.

“Karena transformasi digital sesuai dengan yang kita canangkan untuk menuju Indonesia Emas 2045 memerlukan kerja keras dan kerja bersama kita semua, terutama dari sisi infrastruktur digital, masyarakat, pemerintahan dan juga ekonomi digital,” ungkapnya dalam Power Breakfast DTI-CX 2024 di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (31/07/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi merupakan ihwal penting dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Untuk infrastruktur digital nanti kita serahkan kepada pakarnya. Karena ini ada adopsi teknologi, pilihan kecepatan teknologi yang luar biasa juga. Dan memerlukan akselerasi adaptasi dan adopsi berbagai teknologi yang memungkinkan kita untuk melakukan percepatan,” jelasnya.

Menkominfo menekankan tolok ukur pembangunan infrastruktur digital bukan lagi bersifat opsional melainkan kewajiban Pemerintah maupun industri. Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dari negara lain, termasuk di ASEAN dalam kecepatan akses internet.

“Karena sekarang alat ukurnya sudah tidak main-main. Alat ukurnya itu ranking. Kecepatan internet kita itu masih 23 Mbps, kita nomor 10 dari 12 negara ASEAN. Itu kan bukan kabar yang baik buat kita semua,” tandasnya.

Menteri Budi Arie telah mengajak ekosistem industri terus memperkuat kolaborasi dalam menghasilkan kebijakan infrastruktur digital sebagai penyokong utama.

“Saya selalu bilang sama Pak Ismail (Dirjen SDPPI Kominfo) sama Pak Wayan (Dirjen PPI Kominfo) berikan kebijakan apa yang membuat teman-teman industri Telko bisa lebih mudah berinvestasi secara banyak sehingga bisa membantu dari sisi kecepatan bandwidth,” tuturnya.

Menkominfo berharap industri telekomunikasi diberikan kemudahan agar masyarakat dapat menikmati dan mendapat manfaat dari kecepatan internet yang lebih mumpuni.

“Mungkin kita tidak bisa lebih cepat dari Singapura, karena itu, kita berharap ada terobosan, konsen saya selalu kecepatan supaya kalau dibanding-bandingkan setidaknya Indonesia bisa membanggakan,” tegasnya.

Dalam DTI-CX, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Fadhilah Mathar.

Tampak hadir Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno, President Director DTI-CX Adhouse Clarion Event Toerangga Putra serta pimpinan perusahaan telekomunikasi dan industri digital nasional.

Siaran Pers No. 469/HM/KOMINFO/08/2024

Kamis, 1 Agustus 2024
tentang

UMKM Level Up, Menteri Budi Arie: Kolaborasi Tingkatkan Kapabilitas Digital



Pemerintah terus berupaya memajukan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan salah satu langkah yang ditempuh dengan memfasilitasi pelaku untuk mengadopsi teknologi digital lewat Program UMKM Level Up 2024.

“Program ini bertujuan mendorong pelaku UMKM agar lebih ekstensif dalam mengadopsi teknologi digital. Utamanya untuk memperluas akses pemasaran, meningkatkan efisiensi, daya saing dan inovasi hingga meningkatkan nilai transaksi,” tuturnya dalam Launching UMKM Level Up di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (01/08/2024).

Menteri Budi Arie menjelaskan program yang diinisiasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo ini berfokus pada peningkatan kapabilitas digital pelaku UMKM.

“Program ini juga sebagai akselerasi bisnis UMKM melalui berbagai workshop, pelatihan, dan program 1-on-1 antara *business coach* dengan UMKM yang bertujuan untuk memperkuat rencana bisnis UMKM,” jelasnya.

Menkominfo mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan peluncuran UMKM Level Up.

“Saya harap segala ilmu dan jejaring yang didapatkan dalam acara hari ini dapat membantu UMKM dalam mengembangkan ekonomi nasional, berkontribusi yang sangat positif bagi kemajuan Indonesia terutama menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

KOLABORASI

Guna mendukung pengembangan UMKM di Indonesia, Ditjen Aptika Kementerian Kominfo melaksanakan dua program yakni pendampingan UMKM Level Up dan Akselerasi Bisnis UMKM.

“Untuk program pendampingan UMKM Level Up akan fokus kepada peningkatan kapabilitas digital UMKM di Indonesia. Dan program Akselerasi Bisnis UMKM yang fokus mengembangkan rencana bisnis UMKM yang didukung pemanfaatan teknologi digital,” jelas Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Hokky Situngkir.

Pada tahun 2023, Kementerian Kominfo telah memfasilitasi wilayah Maluku Utara dan Papua. Tahun ini Program UMKM Level Up berlangsung di 19 kota dan kabupaten Pulau Jawa, Bali dan Sumatera. Sementara untuk Akselerasi Bisnis UMKM, mencakup lima kawasan di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Dirjen Hokky, kedua program tersebut dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Melibatkan hingga 100 fasilitator, 20 koordinator, 10 *business coach*, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dengan *output* berupa UMKM yang sudah *level up* secara digital,” tuturnya.

Pada tahun ini, Kementerian Kominfo melibatkan pelaku UMKM produsen di sektor makanan, minuman, *fashion*, kerajinan tangan dan kosmetik untuk bergabung dan mendapatkan pendampingan selama lima bulan secara daring maupun luring untuk mengembangkan bisnis.

“Program adopsi teknologi digital ini merupakan satu momen penting dimana

kekayaan keberagaman dan kerajinan kita yang bhinneka membanjiri sudut-sudut ruang digital,” tegasnya.

Dirjen Aptika Kementerian Kominfo optimis melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan dapat bersama bergerak mewujudkan pelaku UMKM yang berdaya secara digital, kuat, dan makin maju.

Dalam Launching UMKM Level Up, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Hokky Situngkir, Inspektur Jenderal Arief Tri Hardiyanto, Staf Ahli Menteri Wijaya Kusumawardhana serta Staf Khusus Menkominfo Sugiharto.

Siaran Pers No. 479/HM/KOMINFO/08/2024

Selasa, 6 Agustus 2024
tentang

Menkominfo Dorong APT Tingkatkan Transformasi Digital Inklusif



Saat ini negara-negara di kawasan Asia Pasifik menghadapi tantangan untuk mengatasi kesenjangan digital. Asia-Pacific Telecommunity (APT) berupaya mengembangkan inisiatif dan solusi konkret untuk meningkatkan konektivitas dan transformasi digital di Asia Pasifik.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong APT untuk terus mewujudkan masa depan transformasi digital yang inklusif.

"APT telah mencapai tonggak penting dalam meningkatkan kerja sama regional di sektor telekomunikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Mari kita bersama-sama menuju masa depan digital

yang lebih inklusif dan berkelanjutan," ungkapnya saat membuka The 21st APT Telecommunication/ICT Development Forum (ADF-21) di Jakarta Pusat, Selasa (06/08/2024).

Menteri Budi Arie menyatakan APT telah berhasil menjadikan setiap negara memanfaatkan potensi TIK guna mengurangi kesenjangan digital dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

"Menurut International Telecommunication Union (ITU) dan United Nations Development Programme (UNDP), teknologi digital berkontribusi hingga 70 persen dalam pencapaian

Agenda 2030 dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) PBB," tuturnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengembangkan rencana komprehensif Visi Indonesia Digital 2045 berdasarkan pendekatan ekosistem, sektoral, dan teritorial guna mengatasi kesenjangan digital.

"Pada tahun 2023, hanya 52 persen penduduk pedesaan yang menggunakan internet, dibandingkan dengan 80 persen penduduk perkotaan. Proyek percontohan TIK untuk daerah pedesaan sangat penting untuk menutup kesenjangan tersebut dan memastikan manfaat digital bagi seluruh rakyat Indonesia," jelas Menkominfo.

Menteri Budi Arie juga mengungkap upaya Indonesia meningkatkan konektivitas melalui pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Mulai dari jaringan telekomunikasi 5G, kabel serat optik, Base Transceiver Station (BTS) serta Satelit Multifungsi SATRIA-1.

"Infrastruktur ini sangat penting untuk ekonomi digital dan pertumbuhan inklusif Indonesia. Inisiatif ini bertujuan menjembatani kesenjangan digital, menyediakan internet yang andal dan cepat untuk seluruh rakyat Indonesia," tuturnya.

Siaran Pers No. 538/HM/KOMINFO/08/2024

Jumat, 30 Agustus 2024
tentang

Wujudkan Indonesia Emas, Menteri Budi Arie: Seimbangkan Empat Sektor Digital Strategis



Sektor komunikasi dan informatika memiliki potensi besar dalam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kontribusi sektor ini setara USD77 pada Tahun 2022 dan diharapkan mencapai USD130 pada Tahun 2025.

Guna menumbuhkan potensi sektor komunikasi dan informatika, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendorong pembangunan dan gerak pemangku kepentingan selaras dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

"VID telah dirilis sebagai salah satu alternatif Peta Jalan Transformasi Digital Nasional bagi seluruh pemangku kepentingan. Terdapat empat sektor strategis yang menjadi fokus mencakup infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital," jelasnya dalam Forum Group Discussion bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Jakarta Selatan, Jumat (30/08/2024).

Menteri Budi Arie menekankan VID 2045 menjadi pemandu

dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, Menkominfo mendorong setiap pihak menyeimbangkan setiap upaya untuk mengembangkan empat sektor digital strategis.

"Saya selalu katakan bahwa empat bidang ini tidak boleh satu duluan melampaui yang lain, ini harus bareng-bareng, paralel. Kemajuannya harus sama, jangan sampai pemerintahannya sudah digital, masyarakat digitalnya problem," tandasnya.

Menurut Menteri Budi Arie, sektor telekomunikasi mendapatkan perhatian serius dalam VID 2045, khususnya berkaitan dengan penggelaran infrastruktur digital dengan mencakup tiga sasaran.

“Yang pertama adalah *mobile broadband coverage per population* ditargetkan mencapai 100% di rentang waktu Tahun 2030 s.d 2034. Yang kedua, 514 kabupaten dan kota dengan rata-rata kecepatan internet mencapai 1 Gbps di rentang Tahun 2040 s.d 2045,” jelasnya.

Menkominfo menjelaskan *mobile broadband coverage* di Indonesia saat ini di posisi 29 Mbps. Dengan penerapan VID 2045, diharapkan bisa mencapai target 1Gbps. Selain itu, kecepatan teknologi 6G akan dapat menjadi kisaran satu tera atau 1.000 Gbps. Selanjutnya, selama kurun waktu 21 tahun ke depan, Kementerian Kominfo juga berupaya meningkatkan rata-rata kecepatan unduh internet *mobile broadband* mencapai 760 Mbps.

“Untuk mencapai sasaran tersebut, Kominfo mendorong konektivitas melalui kombinasi berbagai teknologi seperti *fiber to the home, fixed wireless acces*, dan seluler diikuti adopsi teknologi IPv6 untuk konektivitas gigabit *ethernet*,” jelasnya.

Menteri Budi Arie menyebut strategi penggelaran jaringan melalui penerapan berbagi

infrastruktur, penguatan skema Universal Service Obligation (USO) dan *joint planning* dengan operator telekomunikasi sebagai solusi.

“Terbuka pada berbagai pilihan teknologi seperti kombinasi teknologi nonterrestrial network yang terkini dan penerapan regulasi bagi industri telekomunikasi untuk ciptakan iklim kompetisi yang sehat,” ungkapnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Firlie Ganinduto menyatakan diskusi mengenai pengembangan potensi sektor komunikasi dan informatika ini membahas aspek teknologi informasi, telekomunikasi hingga media digital.

“Peran sektor komunikasi dan informatika ini sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi dan kemajuan nasional,” ujarnya.

Menurut Waketum Firlie Ganinduto, digitalisasi dan transformasi digital memungkinkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Termasuk, layanan publik yang makin mudah diakses masyarakat berkat platform digital untuk memudahkan administrasi dan pelayanan.

“Belum lagi, sektor manufaktur di Indonesia kini lebih mampu bersaing di pasar global karena adopsi teknologi digital yang

memungkinkan produksi lebih efisien dan berkualitas,” tuturnya.

Waketum Kadin menilai adopsi solusi digital baik dalam pemerintahan, bisnis maupun layanan publik. Indonesia akan dapat memperluas akses layanan dan mengurangi biaya operasional secara signifikan.

“Saya berharap kita bisa bekerjasama untuk merumuskan dan menerapkan solusi yang akan memajukan sektor komunikasi dan informatika. Saya percaya dengan kita bekerjasama akan membawa kita lebih dekat ke masa depan digital yang lebih efektif dan lebih baik kedepannya,” ungkapnya.

Dalam FGD Kadin Indonesia bertema “Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang di Sektor Komunikasi dan Informasi Indonesia”, Menkominfo Budi Arie hadir didampingi Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Slamet Santoso.

Siaran Pers No. 552/HM/KOMINFO/09/2024

Selasa, 3 September 2024
tentang

Jamin TTE Sah, Wamen Nezar Patria Ingatkan Enam Syarat dalam UU ITE



Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) merupakan solusi atas masalah jaminan identitas dan integritas dalam dokumen elektronik pada sistem transaksi elektronik. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan meski terjamin, tidak semua TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

“Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada 6 syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memberikan jaminan identitas penandatanganan, integritas dokumen yang ditandatangani, dan faktor yang kita sebut sebagai faktor nirsangkal,” tuturnya dalam VIDA Executive Summit 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (03/09/2024).

Faktor nirsangkal meliputi data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan. Selanjutnya, data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

Selain itu, segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui. Kemudian, segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.

Ada pula syarat terdapat cara tertentu yang digunakan

untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya. Dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang berada dalam sistem elektronik.

Menurut Wamen Nezar Patria, jaminan tersebut memberikan kepercayaan terhadap dokumen dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Dan pada gilirannya dapat memastikan keabsahan individu atau pihak yang bertransaksi.

“Oleh karena itu, muncul Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dengan memanfaatkan teknologi Infrastruktur Kunci Publik atau IKP dengan menggunakan proses

enkripsi, autentikasi, dan verifikasi identitas dan telah terbukti keamanannya,” jelasnya seraya menambahkan dengan teknologi IKP, integritas atau keutuhan dokumen elektronik akan terjamin, terdapat identitas penandatanganan dan memenuhi aspek nirsangkal.

Wamenkominfo menekankan pengawasan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PsrE) sebagai penerbit sertifikat elektronik dan penyelenggara TTE oleh Kementerian Kominfo melalui sejumlah regulasi.

“Seperti misalnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Ini menjadi dasar bagi Kominfo dalam melakukan standarisasi operasional PsrE dan melakukan pengawasan terhadap PSrE,” tandasnya.

Menurut Wamen Nezar Patria, PsrE Indonesia menyediakan solusi tandatangan digital yang mudah, efisien, dan berkekuatan hukum. Hal itu ditujukan untuk menyederhanakan proses administrasi sekaligus mencegah penipuan penggunaan dokumen dan transaksi elektronik.

“Bahkan pemanfaatan teknologi AI dan sistem verifikasi identitas dengan menggunakan teknologi biometrik, liveness, dan teknologi lainnya dapat menurunkan angka *cybercrime* di Indonesia,” tegasnya.

Selain Wamen Nezar Patria, VIDA Executive Summit 2024 juga dihadiri Founder dan Group CEO VIDA Niki Luhur, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta pembicara perwakilan industri, media, pemerintah serta partner VIDA.

Siaran Pers No. 556/HM/KOMINFO/09/2024

**Rabu, 4 September 2024
tentang**

Percepat Realisasi Transformasi Digital, Menteri Budi Arie Usulkan Optimalisasi PNBP



Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah melaksanakan percepatan transformasi digital. Sebagai agenda prioritas, upaya itu memerlukan dukungan alokasi anggaran yang memadai.

Tren realisasi PNBP Kementerian Kominfo memiliki kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi PNBP Kominfo mencapai Rp25,54 Triliun,

dan pada tahun 2021 sebesar Rp25,45 Triliun. Tahun 2022, sebesar Rp27,12 Triliun, selanjutnya tahun 2023 mencapai Rp26,51 Triliun atau 105,74 persen dari target awal. "Untuk tahun 2024, hingga 31 Agustus 2024, realisasi PNBK Kementerian Kominfo tercatat sebesar Rp13,02 Triliun dengan target akhir tahun sebesar Rp25,58 Triliun. Pada tahun 2025, target PNBK Kementerian Kominfo ditetapkan sebesar Rp24,74 triliun," jelas Menkominfo.

Namun demikian, menurut Menteri Budi Arie ada kecenderungan penurunan signifikan dalam izin penggunaan PNBK. Terutama dari BHP Frekuensi yang turun dari 43 persen pada tahun 2022 menjadi 28,35 persen pada tahun 2024.

"Untuk tahun 2025, izin penggunaan BHP Frekuensi diperkirakan hanya sebesar 3,32 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada di angka 4 persen," tuturnya.

Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan dukungan dalam meningkatkan alokasi izin penggunaan PNBK.

"Guna memenuhi kebutuhan anggaran program prioritas yang tidak dapat sepenuhnya dibiayai dengan dana rupiah murni," tandasnya.

Rapat kerja itu membahas kinerja Kementerian Kominfo selama Tahun Anggaran 2020-2024, serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan anggaran Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2025. Rapat juga membahas revisi anggaran APBN Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2024.

Dalam raker, Menkominfo Budi Arie Setiadi didampingi Wamenkominfo Nezar Patria, Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya maupun Pratama di lingkungan Kementerian Kominfo.

Tampak hadir Ketua Komisi Penyiaran Informasi Pusat Ubaidillah Sadewa, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, serta Ketua Dewan Pers Niniek Rahayu.

Siaran Pers No. 563/HM/KOMINFO/09/2024

Selasa, 10 September 2024
tentang**Percepat Pemerataan Akses Internet, Menkominfo:
Buka Kesempatan Setara**

Pemerintah berupaya mempercepat pemerataan akses internet dengan membangun infrastruktur digital di seluruh pelosok Indonesia. Pada saat bersamaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan pelatihan literasi digital bagi masyarakat.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan upaya pemerataan akses internet selain mengikis kesenjangan digital juga akan dapat memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga Indonesia.

"Kita perlu mengingat pentingnya menciptakan kesempatan yang setara dalam pembangunan, khususnya dalam upaya mencapai transformasi digital yang inklusif dan memberdayakan,"

andasnya dalam Keynote Speech Datacomm Solution Day 2024 di Ritz Carlton Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/09/2024).

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo terus melakukan upaya memperkecil kesenjangan digital lewat program dan kebijakan strategis.

"Solusinya melalui *upskilling* dan *reskilling*, meningkatkan literasi digital masyarakat dengan pelatihan dan investasi sektor pendidikan. Juga memanfaatkan konstelasi satelit sebagai upaya menciptakan akses *broadband* yang aksesibel di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," jelasnya.

Menkominfo menjelaskan penerapan solusi itu diperkuat melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan, sehingga bisa memfasilitasi *transfer of knowledge* dan menciptakan ekosistem digital yang inklusif.

"Pemerintah terus melakukan upaya untuk memperkecil *digital divide* di tingkat nasional. Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur berupa Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, perluasan cakupan akses

internet untuk fasilitas layanan publik, penggelaran jaringan kabel serat optik palapa ring, dan peluncuran Satelit Multifungsi SATRIA-1," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga menginisiasi beberapa program *upskilling* dan *reskilling* yang mencakup tiga tingkat kecakapan digital. Menteri Budi Arie menilai inisiatif itu sebagai upaya mencetak sumberdaya manusia digital yang berdaya saing tinggi.

"Di tingkat dasar, terdapat Gerakan Nasional Literasi Digital untuk mendorong peningkatan kecakapan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital. Di tingkat menengah, terdapat Program Digital Talent Scholarship (DTS) yang memberikan berbagai pelatihan seperti *cyber security* dan *artificial intelligence*," jelasnya.

Sedangkan di tingkat lanjut, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Leadership Academy yang memberikan pelatihan kepemimpinan digital kepada para C-Level, pimpinan, dan pengambil kebijakan, dari sektor privat maupun publik. Semua upaya itu ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi digital yang baik agar bisa mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur digital.

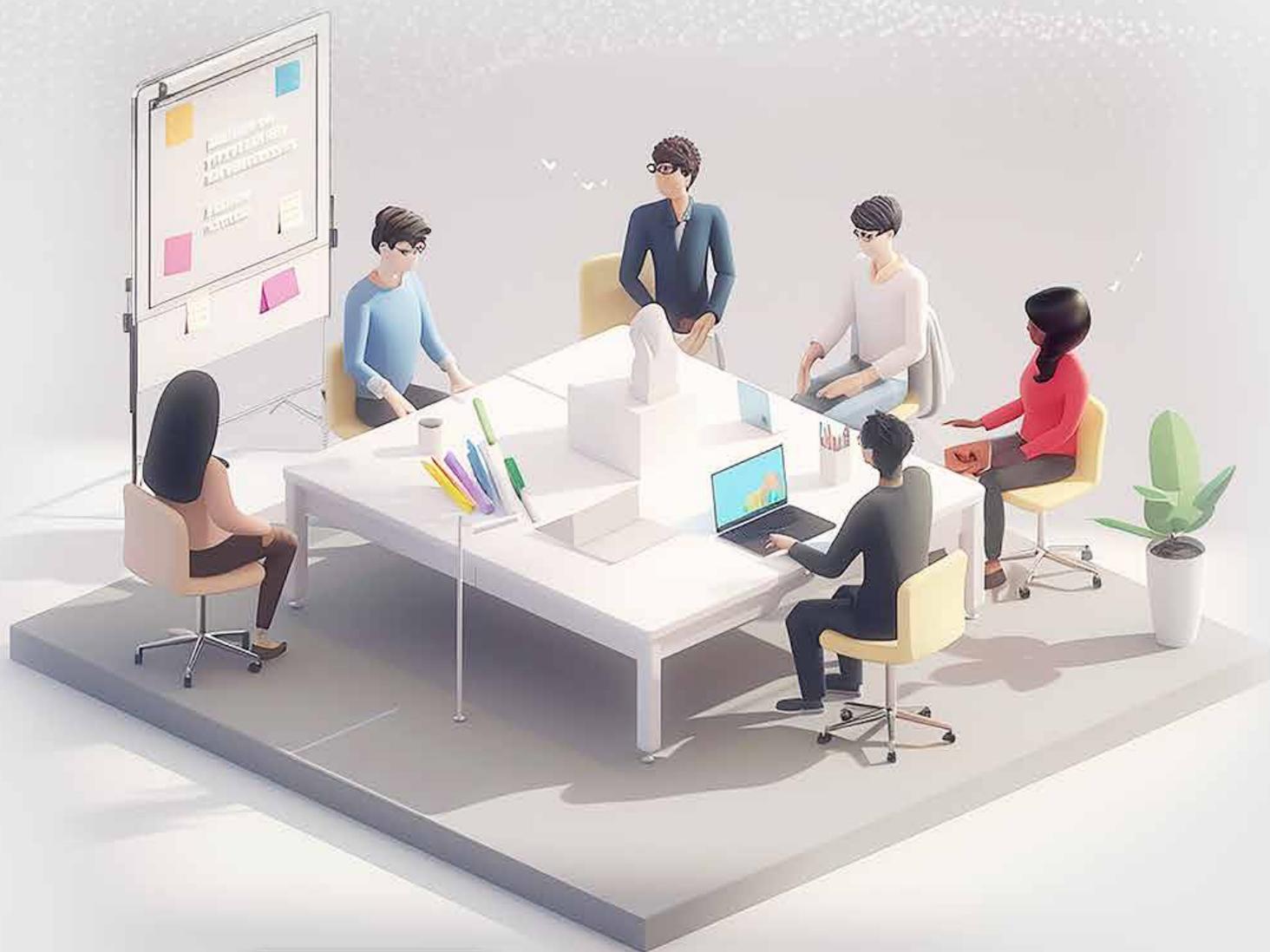
"Dalam pendidikan formal, Kementerian Kominfo juga menyediakan beasiswa S2 bidang digital, baik di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri," ungkap Menkominfo.

Saat ini di Indonesia, tingkat penetrasi internet terus bertumbuh dan mencapai 79,5% populasi nasional. Selain itu, koneksi 4G juga sudah mencakup 97,42% wilayah pemukiman, sementara koneksi 5G baru mencakup 3,53% wilayah pemukiman di Indonesia.

Dalam Datacomm Solution Day 2024, Menkominfo Budi Arie Setiadi disampingi Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Aris Kurniawan. Tampak hadir Presiden Direktur Datacomm Diangraha Tan Wie Tjin, Pakar Teknologi Informatika Richardus Eko Indrajit, Kepala Bidang Aplikasi dan Persandian Dinas Kominfo Kota Pekalongan Kusuma Adi Achmad, dan jajaran pimpinan Datacomm Diangraha.

Program Strategis 2024

Kementerian Komunikasi dan Informatika



Selengkapnya:

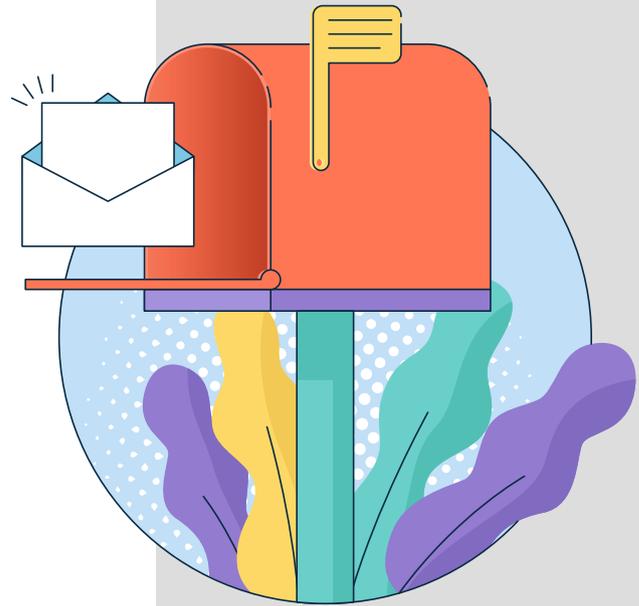
s.id/ProgramStrategisKominfo2024

INDEKS INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK

2019	2020	2021	2022	2023	DIREKTORAT
9.1	9	9.067	8.83	8.60	PENYIARAN
8.76	8.76	9.01	9.74	9.03	POS
9.33	9.55	9.69	9.72	9.67	TELEKOMUNIKASI

INDEKS KEPUASAN MASARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

2019	2020	2021	2022	2023	DIREKTORAT
3.37	3.52	3.54	3.53	3.67	PENYIARAN
3.5	3.52	3.51	3.88	3.76	POS
3.52	3.69	3.66	3.72	3.78	TELEKOMUNIKASI



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKKAN/APRESIASI

1. Call Center 159
2. Tatap muka melalui PTSP Kominfo
3. Instagram @ditjenppi.kominfo dan @direktoratpos
4. Twitter @ditjenppi dan @direktorat_pos
5. Email izinpos@kominfo.go.id



Info lebih lanjut hubungi
PTSP Kominfo: Jl. Medan Merdeka
Barat No. 9, Jakarta 10110
Call Center: 159





**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT POS**

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami seluruh petugas pelayanan perizinan Penyelenggaraan Pos, Direktorat Pos menyatakan:

1. Akan Menyelenggarakan pelayanan perizinan penyelenggaraan pos sesuai kewajiban dan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai yang Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK).
3. Akan melakukan perbaikan dan peningkatan standar pelayanan secara terus-menerus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami tidak sesuai dengan pernyataan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 3 April 2024

Indonesia - Malaysia Bahas Updating Penggunaan Frekuensi Perbatasan



Indonesia dan Malaysia membahas updating penggunaan spektrum frekuensi radio perbatasan pada 4th Special JCC Meeting on Frequency Registration, Coordination Guideline, and Compilation of Agreements between The Republic of Indonesia and Malaysia.

“Kegiatan ini merupakan upaya me-review hasil koordinasi frekuensi JCC yang dilakukan setiap bulan dan mengupdate hasil-hasil perjanjian dengan Malaysia dalam Compilation of Agreement. Pertemuan ini diharapkan memberikan kebijakan yang menguntungkan posisi Indonesia di bagian perbatasan atau setidaknya menghasilkan kesepakatan equal treatment untuk kedua negara”. ujar Nurmala Dewi selaku Ketua Tim Kerja Koordinasi Teknis Serta Perencanaan Spektrum Untuk Public Service Dan Spectrum Outlook, Rabu (7/8/2024), di Jakarta.

Pelatihan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Minahasa Utara

Direktorat Pengembangan Pitalabar DJPPI Kominfo bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) menyelenggarakan Program Pelatihan Jaringan Fiber Optik (FO) selama 3 hari di SMKN 1 Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara. Pelatihan diikuti oleh 11 orang guru dan 39 orang siswa dari enam SMK di wilayah Minahasa Utara dan Manado.

Program ini bertujuan untuk melatih para pengajar dan siswa dalam pemasangan, pengoperasian, serta perawatan jaringan fiber optik, guna mendukung penetrasi akses fixed broadband di Indonesia. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan memperoleh keterampilan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di industri telekomunikasi.





Alibaba Cloud Bermitra dengan Kominfo dan Pemprov Jawa Barat di Hackathon GenAI ke-2

Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan kecerdasan buatan Alibaba Group, telah sukses menyelenggarakan GenAI Hackathon 2024 yang ke-2 bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kementerian Kominfo) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Jakarta. Hackathon ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan berharga bagi para developer di Indonesia untuk menciptakan solusi berbasis AI generatif yang inovatif dalam mengatasi permasalahan sehari-hari di berbagai sektor, khususnya di bidang transportasi, pengelolaan sampah, dan literasi digital.

Acara yang berlangsung selama dua hari dari 31 Agustus hingga 1 September 2024, dan telah menarik lebih dari 120 peserta untuk ikut secara offline ini didukung oleh 15 mentor industri dari Alibaba Cloud International, DKatalis, dan perusahaan teknologi terkemuka lainnya di Indonesia. Para mentor industri ini memainkan peran kunci dalam mendampingi peserta selama Hackathon, memberikan insight terkait penerapan teknologi AI, serta membimbing peserta dalam proses pengembangan solusi mereka. Dengan dukungan mentor, para peserta mendapatkan umpan balik yang konstruktif, pembinaan keterampilan teknis, dan dorongan untuk mengeksplorasi pendekatan inovatif dalam proyek mereka.

Direktorat Operasi Sumber Daya Raih Penghargaan The Best Contact Center Indonesia 2023

Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai pengelola Contact Center 159 pelayanan publik Ditjen SDPPI berhasil memperoleh Penghargaan "Silver" pada kategori "Teamwork - The Best Customer Experience", dalam Acara Awards Ceremony of the Best Contact Center Indonesia 2023, Selasa (26/09/2023)

The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) adalah suatu ajang penghargaan dunia Contact Center tingkat nasional di Indonesia, yang mendapatkan pengakuan secara internasional oleh Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). Kategori lomba yang diselenggarakan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Program Korporat, Individual, dan Teamwork. Perusahaan atau Lembaga Negara yang berhak mengikuti lomba merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai anggota aktif ICCA.





Ikuti Bimtek Masterplan Smart City, Kabupaten Gianyar Mantap Menuju Kota Cerdas!

Kab. Gianyar, Ditjen Aptika – Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali makin memantapkan diri menuju kota cerdas dengan mengikuti Bimbingan Teknis Tahap IV penyusunan masterplan smart city yang diselenggarakan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan pada 4-5 September 2024.

Bimtek tahap IV ini merupakan tahapan terakhir dari rangkaian bimtek penyusunan masterplan smart city yang telah digelar sejak bulan juni 2024 lalu. Acara ini dihadiri secara langsung maupun daring oleh 176 peserta yang mewakili berbagai unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Gianyar dan lembaga lain yang terkait.

Setda Kabupaten Gianyar, I Dewa Gede Alit Mudiarta yang mewakili PJ Bupati Kabupaten Gianyar menyampaikan bahwa sesuai dengan visi Gianyar Smart City tahun 2025-2034, dibutuhkan langkah strategis yang efektif dengan mempertimbangkan analisis yang mendalam terhadap masa depan kesiapan daerah serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).



AIoT Smart Solution : Kembangkan Infrastruktur IoT Indonesia

Jakarta (SDPPI) – Untuk mengembangkan penggunaan serta berjalannya industri IoT di Indonesia, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bersama dengan Asosiasi IoT Indonesia (ASIoTI) adakan AIoT Smart Solution untuk pastikan IoT dapat mendukung transformasi digital Indonesia.

“Infrastruktur di Indonesia perlu dikembangkan secara lebih luas lagi melalui layanan 5G dan kita harus memastikan bahwa Indonesia itu tidak hanya sebagai smart user tetapi menjadi juga smart player” ucap Direktur Standardisasi PPI Mulyadi, Rabu (11/9/2024).

Jadi pemerintah ingin infrastruktur digital yang sedang dikembangkan memiliki kandungan produk lokal. “perangkat IoT yang beredar di Indonesia sangat banyak, kita harus bisa memastikan bahwa kita berkontribusi di dalamnya” sambungnya.

Mantap Menuju Kota Cerdas Kabupaten Pekalongan Ikuti Bimtek Masterplan Smart City Tahap III

Kab. Pekalongan, Ditjen Aptika – Kabupaten Pekalongan makin memantapkan langkah menuju kota cerdas dengan mengikuti Bimbingan Teknis Tahap III penyusunan masterplan smart city pada tanggal 30-31 Juli 2024. Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan ini merupakan tahap ketiga dari 4 rangkaian bimtek yang bertujuan mematangkan rancangan masterplan kota cerdas bagi 10 kota/kabupaten yang terpilih dalam program Menuju Kota Cerdas 2024, dan Kabupaten Pekalongan adalah salah satunya.

Kegiatan yang dihadiri 65 peserta dari 40 lembaga atau satuan kerja di dalam maupun di luar



pemerintah Kabupaten Pekalongan ini bertujuan untuk menajamkan draft buku 2 yang berisi strategi pembangunan smart city daerah, rencana aksi dan peta jalan (road map smart city).

Balmon Kupang Musnahkan 15 Perangkat Tidak Bersertifikat

Kupang (SDPPI) – Balai Monitor Kelas I Kupang melakukan pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi sebanyak 15 perangkat terdiri dari transceiver SSB, Rig dan handy talky, berasal dari 8 pengguna baik badan hukum maupun perorangan hasil penertiban Tahun 2011 sampai dengan 2023. Adapun Pemusnahan dilakukan di Halaman Kantor balmon Kelas I Kupang dengan metode pembakaran.

Kabalmon Kelas I Kupang Mujiyo menjelaskan, ada hal-hal yang melatarbelakangi pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi tersebut, yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang (UU) No.6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya di Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang wajib memperhatikan persyaratan teknis, mendapatkan izin dari Pemerintah, sesuai dengan peruntukannya dan tidak saling mengganggu demi terwujudnya tertib administrasi dan tertib hukum.



Pentingnya Literasi Digital bagi Prajurit TNI untuk Cegah Serangan Siber



Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menekankan pentingnya pemahaman literasi digital bagi prajurit TNI untuk mencegah serangan siber. Hal itu karena dalam era transformasi digital serangan siber menjadi musuh utama.

“Pada era transformasi digital seperti saat ini, bukan lagi serangan terbuka yang menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, tetapi serangan siber. Karena Prajurit TNI memiliki tugas pokok menjaga stabilitas dan keamanan negara, maka sangat penting bagi seluruh prajurit TNI memiliki pemahaman dan kesadaran terkait literasi digital,” kata Direktur Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Slamet Santoso, pada saat membuka acara Literasi Digital kepada Prajurit TNI Gelombang 2, di BSD Tangerang, Senin (15/07/2024).

Ditjen SDPPI Berikan Kenyamanan Penggunaan Frekuensi Pada Kunjungan Paus Fransiskus

Jakarta (SDPPI) – Untuk menyambut serta memberikan keamanan dan kenyamanan kedatangan Pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan Paus Fransiskus, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) jaga penggunaan spektrum frekuensi radio selama Ibadah Misa Agung di Senayan Jakarta.

Tim monitoring Ditjen SDPPI dalam hal ini Direktorat Pengendalian bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis (Jakarta, Tangerang, Bandung, Denpasar dan Kupang) pada kegiatan kunjungan Paus Fransiskus di Senayan Jakarta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (SFR) yang digunakan oleh pihak penyelenggara dan mitra kerja yang bertugas selama kegiatan kunjungan Paus berlangsung.



Ketersediaan Frekuensi 5G Berikan Dampak Positif Bagi Industri Indonesia

Jakarta (SDPPI) – Penggunaan spektrum frekuensi mid-band mempunyai peran yang signifikan dalam pertumbuhan teknologi 5G. Penggunaan spektrum frekuensi mid-band mendorong peningkatan Gross Domestic Product (GDP) global lebih dari \$610 milyar pada tahun 2030 yang mencakup hampir 65% dari total nilai sosial-ekonomi yang dihasilkan oleh teknologi 5G.

Direktur Penataan Sumber Daya Denny Setiawan hadir mewakili Dirjen SDPPI sebagai Keynote Speaker dengan topik Economic Growth and Innovation: Implementation of 5G pada event tahunan The Regional Association Cloud & Hosting Indonesia (ACHI) bersama Indonesia 4.0 Conference & Expo 2024 dengan tema yang diusung yakni “Together Towards The Sustainability”.

Peningkatan Kompetensi Guru Bidang TIK Sekolah Penerima Bantuan Akses Internet BAKTI

BAKTI Kominfo bekerja sama dengan Balai Layanan Platform Teknologi (BLPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Guru Bidang TIK Sekolah Penerima Bantuan Akses Internet BAKTI di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah pada tanggal 27-29 Agustus 2024.

Rangkaian acara bimbingan teknis selama 3 hari yang berlokasi di Aula Bupati Kabupaten Buol ini mencakup pembelajaran tentang ekosistem pemanfaatan belajar.id, pemanfaatan platform Merdeka Belajar, penggunaan Google Drive dan Canva sehingga pembuatan modul pembelajaran menjadi lebih menarik di sekolah. Sementara itu, di hari terakhir bimbingan teknis ditutup dengan pembelajaran literasi digital dan pembuatan konten podcast pendidikan.



Ditjen SDPPI Lakukan 5G SA Open RAN Untuk Ibu Kota Nusantara

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) telah melaksanakan uji coba Open RAN 5G Stand Alone bekerja sama dengan Telkomsel, NTT DOCOMO, Telecom Infra Project (TIP) Universitas Telkom, PT INTI, Edgcore, PLN Icon Plus, dan International Fiber Alliance (IFA) untuk wujudkan Smart City pada Ibu Kota Nusantara.

“Uji coba ini merupakan kolaborasi strategis dengan Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) guna mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi masa depan Indonesia dengan diluncurkannya Showcase Teknologi Jaringan Terbuka di Ibu Kota Negara Nusantara” Ucap Direktur Standardisasi PPI Mulyadi, Selasa (20/8/2024).

Loket Pelayanan MOTS Garda Terdepan Keselamatan Penggunaan Frekuensi di Laut

Yogyakarta (SDPPI) – Untuk meningkatkan kesadaran pengguna frekuensi di perairan Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) mengajak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tingkatkan kesadaran penggunaan frekuensi kepada nelayan serta memberantas adanya harmful interference.

Untuk menanggulangi masalah itu, sejak tahun 2019 Direktorat Jenderal SDPPI memiliki program kerja Maritime on the Spot (MOTS) yang tersebar di 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) ujung tombak pelayanan dan juga untuk memberikan edukasi maupun update informasi terbaru kepada pengguna frekuensi di seluruh perairan Indonesia.

Selamat Hari Bhakti Postel Ke-79

Nusantara Digital untuk Indonesia Maju

27 September 2024





Kamu Ikuti, Kamu Terinformasi

Ikuti Sosial Media Kominfo

-  @Kemenkominfo
-  @kemkominfo
-  Kemkominfo
-  Kemkominfo TV
-  @kemkominfo

Program Menarik Kominfo

- Miss Lambe Hoaks VS Fact Boy
- TokTok Kominfo
- Kominfopedia
- Netizen Bertanya Kominfo Menjawab
- Kominfo News

Retweet / Share / Like / Follow / Subscribe / Love / Comment

Judi Online

adalah
Penipuan

